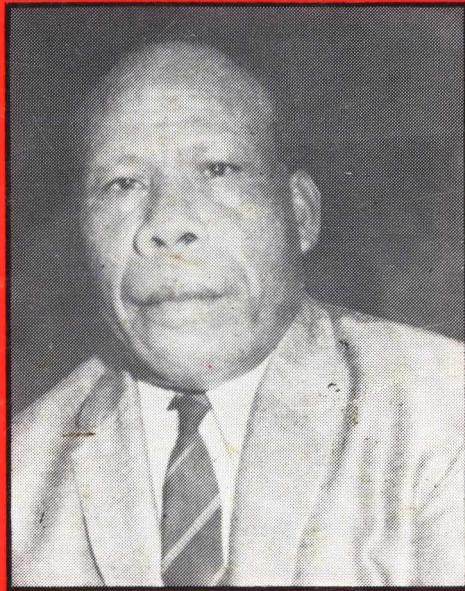


PAHLAWAN NASIONAL
FRANS KAISIEPO



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1996

PAHLAWAN NASIONAL

FRANS KAISIEPO

Tim Penulis :
Pius Suryo Haryono
Muchtaruddin Ibrahim
Espita Riama
Lismiarti

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1996

PAHLAWAN NASIONAL FRANS KAISIEPO

Tim Penulis : Pius Suryo Haryono
Muchtaruddin Ibrahim
Espita Riama
Lismiarti

Penyunting : Muchtaruddin Ibrahim

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Cetakan Pertama Tahun 1996

Edisi 1996

Dicetak oleh : cv. DEFIT PRIMA KARYA, Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya proyek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Biografi *Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo* ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 1993/1994.

Penulisan Biografi Pahlawan Nasional ini merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan gambaran mengenai pahlawan nasional yang berasal dari Irian Jaya yang meliputi sosok perjuangan serta sumbangan maupun perannya dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi pahlawan ini ialah untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebangsaan nasional, serta melestarikan Jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Selain itu penulisan ini diharapkan akan menjadi semacam jembatan untuk memahami kehidupan kebudayaan di suatu lingkungan masyarakat budaya, serta dapat membangkitkan kesadaran sejarah

bagi generasi penerus terhadap gagasan-gagasan dan karya-karya yang pernah diciptakan oleh para pendahulunya.

Dengan diterbitkannya buku biografi pahlawan ini diharapkan akan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberi embaran yang memadai bagi masyarakat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1996

**Pimpinan Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. G.A. Ohorella', with a large, stylized flourish above the name.

Dra. G.A. Ohorella

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Ruang Lingkup Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	5
1.5 Sistematika Laporan	5
Bab II Latar Sosio-Kultural Frans Kaisiepo	
2.1 Letak dan Keadaan Geografi	7
2.2 Sistem Kemasyarakatan	9
2.3 Masa Kecil Sampai Masa Remaja	10
Bab III Frans Kaisiepo dalam Menggeluti Pendidikan dan Pekerjaan	
3.1 Pendidikan Dalam Keluarga	13
3.2 Pendidikan Formal	14
3.3 Meniti Pekerjaan	19

Bab IV Perjuangan Frans Kaisiepo Menyambut Kemerdekaan	23
Bab V Peran Frans Kaisiepo Dalam Arus Sejarah	33
Bab VI Frans Kaisiepo dan Keluarga	
6.1 Mengenal Pribadi	55
6.2 Membangun Rumah Tangga	57
6.3 Masa-masa Akhir Frans Kaisiepo	64
Bab VII Penutup	69
Daftar Pustaka	73
Lampiran	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar

Kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai ini sebenarnya tidaklah terlepas dari peran serta seluruh lapisan rakyat Indonesia yang bergerak secara serentak mulai dari Sabang sampai Merauke, wilayah Irian Barat. Perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan itu dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan baik fisik maupun pikiran, serta menuntut pengorbanan harta dan nyawa.

Dalam proses menegakkan kemerdekaan tersebut telah muncul para tokoh, pemuka masyarakat dan patriot-patriot bangsa heroik dan menyatukan langkahnya ke dalam satu tujuan, yaitu untuk menancapkan panji-panji kemenangan. Dan untuk dapat mewujudkan cita-cita suci tersebut telah dilakukanlah sebagai cara dan taktik. Bagi pemuda yang berani dan gagah perkasa ikut ke baris depan untuk memanggul senjata dan berlaga di meda pertempuran. Sedang bagi cerdik pandai dan pemuka masyarakat untuk turut aktif memberikan sumbangan buah pikiran terutama dalam mengatur taktik atau langkah-langkah dalam perjuangan baik melalui bidang diplomasi di forum internasional, maupun duduk beradu argumentasi di meja-meja perundingan dan berhadapan langsung dengan pihak lawan. Sementara itu bagi si kaya turut menyumbangkan harta bendanya demi untuk melancarkan roda perjuangan dan si papa cukuplah dengan do'a saja.

Begitu juga halnya dalam taktik perang, meskipun dengan peralatan yang minim, tapi dengan didasari oleh semangat pejuang kemerdekaan telah mampu berhadapan secara frontal dengan musuh yang memiliki persenjataan lengkap dan semakin mahir dalam melakukan taktik perang gerilya. Sehingga karenanya tidak mengherankan di dalam berbagai pertempuran banyak pihak musuh mendapat kerugian.

Demikianlah gambaran sekilas yang dilakukan dalam masa perjuangan menegakkan kemerdekaan dan agaknya boleh dikatakan bahwa perjuangan pada masa itu adalah perjuangan yang murni. Dalam artian setiap orang yang turut dalam barisan perjuangan rela berkorban dan tidak pernah terlintas sedikitpun dalam benaknya untuk mendapat balasan berupa jasa, kedudukan, pangkat serta harta benda. Dan apa yang telah mereka berikan baik tenaga pikiran maupun harta, semuanya diserahkan demi untuk menegakkan kemerdekaan.

Dalam situasi yang demikian ini munculah patriot-patriot bangsa dan mereka itu bangkit serentak di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Mereka itu dengan rela menyerahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan memegakkan kemerdekaan. Dalam kaitannya dengan semangat kepatriotan tersebut akhirnya tercatatlah sederetan nama yang terhormat, yang dalam hal ini, oleh Pemerintah Republik Indonesia telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional, dan salah satunya adalah Kaisiepo, seorang putra bangsa yang terbaik, yang berasal dari daerah Irian Barat.

Kondisi dan situasi daerah Irian Barat tanah tempat kelahiran Frans Kaisiepo sangat berbeda bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah ini memiliki ciri tersendiri dan corak budaya yang sangat khas, serta latar belakang sejarah yang khusus juga.

Berangkat dari hal tersebut, maka pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka itu dapat lebih memperpanjang tahta imperialismenya di bumi Indonesia, khususnya di Irian Barat untuk memperkokoh kedudukannya itu, Pemerintah Kolonial Belanda telah menghalalkan segala cara, sehingga Irian Barat tetap dipertahankan sebagai miliknya.

Akan tetapi setelah digoncang oleh topan perjuangan secara terus menerus, baik melalui meja-meja perundingan maupun melalui diplomasi dan kemudian dengan mengangkat senjata, sehingga menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda semakin terpojok dan keredanya meskipun sangat berat hati terpaksa menyerahkannya kepada Pemerintah Republik Indonesia, setelah 12 tahun dikuasainya.

Keberhasilan ini sebenarnya tidaklah terlepas dari peran aktif dari putra-putra daerah Irian Barat juga, seperti Frans Kaisiepo, Silas Papare, Marthin Indey dan pemuda-pemuda militan lainnya. Bangkitnya semangat kebangsaan putra-putra Irian Barat seperti yang telah diperankan oleh Frans Kaisiepo dan kawan-kawan tidak terlepas dari peran aktif pejuang yang digulkan. Hal ini karena mereka telah bergaul akrab dengan tokoh-tokoh eks Digulis yang telah lama bermukim di Irian Barat (Kota Baru). Para eks Digulis tersebut bukan saja berperan sebagai inspirator, melainkan juga telah bertindak sebagai motivator sehingga putra-putra Irian Barat bangkit untuk menuntut haknya kepada Pemerintah Kolonial Belanda agar mereka dapat bersatu ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Tuntutan itu bukanlah slogan kosong belaka, karena mereka berani bertindak secara terang-terangan, meskipun sebagai akibatnya mereka disingkirkan dan bahkan dipenjarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

1.2 Tujuan Penelitian

Berangkat dari kriteria kepahlawanan seperti ditentukan, yang di dalamnya terkandung semangat dan nilai-nilai edukatif dan inspiratif, maka tidak dapat disangkal betapa pentingnya penulisan Biografi Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo. Hal ini karena Frans Kaisiepo semasa hidupnya telah berjasa besar kepada nusa dan bangsanya. Tindakan serta sikap yang diperankannya mencerminkan pribadi yang kuat dan ini menjadi suri tauladan yang penting untuk disajikan serta disebarkan secara luas, terutama dikalangan generasi penerus.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa di dalam penulisan Biografi Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sangat penting artinya

bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam tahap membangun, dan dalam upaya mengisi kemerdekaan. Hal ini karena hampir seluruh aktivitas Frans Kaisiepo tidaklah terlepas kaitannya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia secara umumnya dan Perjuangan Bangsa di tingkat lokal atau daerah. Karenanya penulisan ini kiranya merupakan upaya mengisi muatan lokal khususnya tentang perjuangan Frans Kaisiepo beserta rakyat Irian Barat Seluruhnya.

Dengan kata lain penulisan Biografi pahlawan Nasional Frans Kaisiepo dapat diharapkan mengisi muatan lokal. Selain itu kiranya dapat menjadi kebanggaan daerah atau nasional, karena integritas Frans Kaisiepo telah tercurah untuk nusa dan bangsa.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Mengikuti akan kelaziman penulisan sebuah biografi, maka sesungguhnya ada keinginan supaya ruang lingkup penulisan Biografi Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo akan disajikan secara utuh sesempurna mungkin. Akan tetapi berhubung karena adanya berbagai kendala yang tak terhindarkan, maka kajian ini dibatasi hanya pada uraian-uraian yang agaknya kurang memadai yang meliputi tentang asal-usul, pendidikan, riwayat pekerjaan, sepak terjang dalam perjuangan dan keadaan di masa akhir hidupnya. Sedangkan uraian yang mencerminkan karakter seorang tokoh yang utuh belum dapat disajikan secara sempurna dan mamadai.

Namun demikian, untuk sedikit dapat menghidupkan suasana dan alur kehidupan Frans Kaisiepo, uraian ini tidak akan lupa mengetengahkan tanah tempat kelahiran serta gambaran mengenai adat tradisi masyarakat tempat Frans Kaisiepo dilahirkan dan dibesarkan. Juga untuk membangun hubungan dengan situasi zaman uraian akan menyinggung usaha-usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat. Karena di dalam aktivitas ini Frans Kaisiepo turut memberikan andil yang besar dalam menentang Kolonialisme dan Imperialisme Belanda.¹⁾

1) Bondan Soeharto dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya*, Kerjasama Universitas Cenderawasih dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya, Jayapura, 1989, hal. 1-12.

1.4 Metode Penulisan

Dengan berpegang pada kaidah ilmu sejarah, maka penulisan Biografi Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo dilakukan dengan metode pengumpulan, penyeleksian, pengisian dan penulisan. Dalam usaha mengumpulkan data telah dilakukan antara lain studi :

1.4.1 Kepustakaan

Dalam pengumpulan data kepustakaan ini telah dilakukan penelitian pada buku-buku, majalah, koran, brosur, dokumen (dokumen resmi atau pribadi) yang disimpan oleh keluarga (saudara, anak dan istri).

1.4.2 Wawancara

Dalam kegiatan ini telah dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh yang mengenal dekat dan mengetahui tentang gerak perjuangan Frans Kaisiepo semasa hidupnya. Selain itu untuk mendapat gambaran keluarga di lakukan wawancara dengan istrinya yang kedua yang sekarang menetap di Bogor. Untuk mendapatkan data yang maksimal kami telah berulang kali menemui dan mewancarainya di tempat kediamannya.

Dengan data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengujian (seleksi) dan dari hasil itu selanjutnya dilakukan penulisan.

1.5 Sistematika Laporan

Laporan hasil penelitian ini disajikan dalam tujuh bab. Bab I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian penulisan, metode penelitian, dan sistematika laporan. Bab II Latar Belakang Sosio Kultural Frans Kaisiepo, memuat uraian tentang letak dan keadaan geografi, sistem kemasyarakatan, masa kecil sampai masa remaja. Bab III Frans Kaisiepo Dalam Menggeluti Pendidikan Dan Pekerjaan, memuat uraian tentang pendidikan dalam keluarga, pendidikan formal dan meniti pekerjaan. Bab IV Perjuangan Frans Kaisiepo Menyambut

Kemerdekaan, memuat uraian tentang ektivitas perjuangan Frans Kaisiepo. Bab V Peran Frans Kaisiepo Dalam Arus Sejarah, memuat uraian tentang peranan Frans Kaisiepo dalam proses pengambilan Irian Barat. Bab VI Frans Kaisiepo Dan Keluarga, memuat uraian antara lain mengenai peribadinya, membangun rumah tangga, dan masa-masa akhir kehidupannya. Bab VII Penutup, memuat uraian mengenai beberapa kesimpulan yang merupakan benang merah dari seluruh uraian dan harapan-harapan ataupun pesan-pesan sejarah yang ditujukan demi pembinaan di masa mendatang.

BAB II

LATAR BELAKANG SOSIO KULTURAL FRANS KAISIEPO

2.1 Letak dan Keadaan Geografis

Frans Kaisiepo berasal dari suku bangsa Biak Numfor. Masyarakat Biak Numfor adalah salah satu kelompok penduduk Irian Jaya yang mendiami Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih. Wilayahnya meliputi gugusan pulau-pulau yang terletak di bagian utara Teluk Cenderawasih, dan gugusan ini dinamai Kepulauan Biak. Secara astronomis gugusan kepulauan ini terletak antara $134^{\circ} 47'$ sampai $136^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 35'$ sampai $1^{\circ} 20'$ Lintang Selatan.

Kepulauan Biak terdiri dari tiga pulau besar, masing-masing adalah pulau Biak yang luasnya $1795,75 \text{ km}^2$, pulau Supiori luasnya $471,75 \text{ km}^2$ dan pulau Numfor luasnya $322,50 \text{ km}^2$. Selain dari ketiga pulau tersebut di atas, terdapat pula gugusan pulau kecil, seperti pulau-pulau Padaido yang terletak di sebelah Tenggara pulau Biak, pulau Inumbabi dan pulau Rani terletak di sebelah Selatan Supiori, pulau Meosbofondi, pulau Ayau dan pulau Mapia terletak di sebelah Barat Laut Supiori. Pulau Biak dan pulau Supiori dipisahkan oleh Selat Sorendori dan selat ini merupakan terusan buatan, yang menerobos hutan bakau sepanjang 8 km. Lebar terusan itu kira-kira 10 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter dan hanya dapat dilayari dengan perahu. Sedangkan pulau Supiori dan Numfor dipisahkan oleh Selat Aruri dengan jarak terdekatnya 113 km (67 mil).

Secara keseluruhan wilayah ini dikelilingi oleh lautan, pada bagian sebelah Selatannya berbatasan dengan pulau Yapen (Soren Arwa), sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudera Pasifik (Soren Karwar) dan sebelah barat dengan Selat Woniai.

Pulau Biak sebagian besar terdiri dari tanan karang kapur sekitar 70 %, sedangkan daerah subur yang memungkinkan untuk areal pertanian yang baik hanya sekitar 30%. Daerah pantai umumnya berinding karang yang terjal dan membentuk garis pantai yang curam dengan ketinggiannya rata-rata 40 m di atas permukaan laut. Daerah-daerah sekitar pantai ini pada umumnya tidak subur, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai areal pertanian. Di beberapa daerah di bagian pedalaman terdapat areal dataran tinggi yang relatif subur, misalnya di Adibai yang terletak di wilayah Biak Timur, wirmaker, Womdisau, dan Yomdori di bagian (Biak Barat), Sarwom. Soor, Arwam dan Warsa di bagian Utara. Ketinggiannya rata-rata 70 sampai 150 m di atas permukaan laut.

Daerah-daerah tersebut merupakan daerah *Literland* dan dewasa ini Sedang diusahakan untuk dapat mendukung kebutuhan ekonomi daerah perkotaan. Kesuburan daerah-daerah tersebut ditentukan oleh jenis batuan induk tanahnya di samping curah hujan yang cukup tinggi dan banyaknya sungai-sungai di daerah tersebut. Jenis hutannya adalah hutan primer (70%) dan hutan sekunder (30%).

Kepulauan Biak dipengaruhi oleh iklim tropis. Beberapa data dari Badan Meteorologi Biak menunjukkan bahwa jumlah curah hujan rata-rata per bulan 237 milimeter. Sedangkan suhu rata-rata per bulan pada permukaan laut adalah 1009,5 millibars dengan kelembaban udara rata-rata per bulan 83% RH (*Relative Humidity*).

Hutan di daerah Kepulauan Biak termasuk tipe hutan tropis basah dengan komposisi yang amat heterogen. Hutan di daerah ini terbagi atas dua bagian yaitu hutan pantai dan hutan gunung. Hutan pantai terdiri dari beberapa jenis tumbuhan bakau, sedangkan hutan gunung ditumbuhi oleh beberapa jenis pohon.

2.2 Sistem Kemasyarakatan

Dari ciri-ciri fisiknya menunjukkan bahwa suku bangsa Biak adalah suku bangsa campuran. Beberapa ahli antropologi mengemukakan pendapatnya, bahwa di Teluk Sairera pada mulanya didiami oleh bangsa atau suku bangsa dengan ciri-ciri *Weddoid*, seperti orang *Wedda* di Ceylon, orang *Sakai* di Malaya dan orang *Toala* di Sulawesi Selatan. Selain itu ada yang berpendapat bahwa orang Biak lebih menampakkan ciri-ciri ras Meianesia dan penduduk pribumi Irian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Biak merupakan campuran pengaruh Indonesia dan *Micronesia*.

Mobilitas penduduk Biak merupakan yang relatif paling tinggi di Irian Jaya. Di pantai utara Irian Jaya mulai dari pulau-pulau Kumamba, Mamberamo, Hulu Teluk Cenderawasih (Sairera), Karundu, Yapen Utara, pantai utara Kepala Burung sampai ke pulau-pulau Raja Ampat di sebelah terdapat pemukiman-pemukiman orang Biak. Penyebaran ini sudah dimulai berabad-abad yang lalu bahkan masih terus berlangsung hingga sekarang. Di samping pemukiman-pemukiman tetap, di kota-kota Kabupaten di Irian Jaya terdapat orang Biak yang bekerja sebagai pegawai negeri, swasta, muliter, guru, injil, guru sekolah, nelayan, petani, buruh dan sebagainya. Emigrasi ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain karena percecokkan keluarga dalam kampung, usaha mencari lokasi atau tempat pemukiman yang baru, aman, subur serta kegiatan mencari pekerjaan di kota-kota.

Sistem kekerabatan orang Biak mengikuti pola *patrilineal* dengan tiga kelompok kekerabatan yaitu "*sim*" (Keluarga Inti), "*rum*" (keluarga luas) dan "*keret*" (klen kecil). Dahulu suatu keluarga luas biasanya menempati sebuah rumah besar (*rum*) yang disebut "*Aberdado*". Rumah tradisional ini dibagi-bagi dalam bilik atau kamar (*sim*) yang ditempati oleh keluarga inti. Oleh karena itu keluarga inti disebut "*sim*". Jika dilihat dari jumlah istri dalam sebuah *sim*, maka kelompok kekerabatan ini ada dua bentuk yaitu "*Sim Inbesefek*" (keluarga batih) dan "*Sim Imbekva*" (keluarga poligini). *Rum* atau keluarga luas adalah gabungan *virilokal* dari *Sim* atau keluarga inti, sedangkan *Keret* atau klen kecil adalah gabungan *patrilineal* dari *Rum*

atau keluarga luas. Lokasi tempat tinggal *Keret* dalam kampung berbentuk compound keret. Kampung-kampung di Biak pada umumnya didiami oleh lebih dari 1 keret (klen kecil). Kampung-kampung terkecil kadangkala didiami oleh 1 atau 2 keret saja. Bahkan keret-keret itu bisa terdiri dari hanya 1 atau 2 keret saja. Bagi kampung-kampung berukuran sedang terdapat 5 sampai 7 keret. Sedangkan kampung-kampung besar didiami oleh 10 sampai 16 *keret*. Kampung-kampung di Biak umumnya tersebar di sepanjang pantai, hal ini disebabkan hubungan antar pulau di mana dahulu penduduk mempunyai kepentingan dagang dengan suku-suku lain yang tersebar di Teluk Sairera (Teluk Cenderawasih).¹⁾

2.3 Masa Kecil Sampai Masa Remaja

Kehidupan masa kecil Frans Kaisiepo tidak banyak yang dapat diungkapkan, kecuali bahwa Frans Kaisiepo dilahirkan di sebuah desa yang terletak di tepi sebuah sungai dengan latar belakang tebing yang curam, pada sebuah dataran yang subur bernama kampung Wardo dalam wilayah Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Teluk Cenderawasih. Frans Kaisiepo dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1921 dalam urutan kelahiran ia adalah anak tertua dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Albert Kaisiepo dengan Alberthina Maker. Saudara-saudaranya yaitu Bertha Kaisiepo, Dorothea Kaisiepo, Cornelia Kaisiepo, Daniel Kaisiepo, dan Willem Kaisiepo.

Albert Ayah Frans Kaisiepo adalah Kepala Suku mempunyai keahlian sebagai pandai besi, terutama dalam peralatan kehidupan rumah tangga dan juga alat senjata. Dengan kedudukan sebagai Kepala Suku, ia sangat dihormati oleh para pengikutnya. Sehubungan dengan itulah maka ia mendapat kepercayaan untuk mengepalai atau memimpin pasukan dari Kampung Wardo apabila terjadi Perang Suku dengan lainnya. Hal demikian ini sudah menjadi tradisi suku bangsa di Irian, khususnya suku bangsa Biak Nunfor bahwa Kepala Suku merupakan Panglima Perang, yang dalam bahasa Biak disebut "*Mambre*" (orang yang berani, patriot, dan Ksatria) yang membela orang lemah dan menjaga kehormatan desanya beserta warganya jikalau kedaulatannya diinjak-injak oleh suku bangsa lain.

1) August Kafiari, MA., *Arsitektur Tradisional Daerah Irian Jaya*, Proyek IDKD, Depdikbud, Jakarta, 1986, hal 12-12.

Frans Kaisiepo sebagai suku bangsa Biak Numfor telah banyak merasakan kegetiran hidup, karena sewaktu ia masih kecil, kira-kira berumur antara 1 sampai 2 tahun, ibunya meninggal dunia. Kemudian oleh ayahnya, Kaisiepo dititipkan agar diasuh oleh tantenya (adik dari ayah Frans Kaisiepo) yang bertempat tinggal di Numfor. Pada masa-masa ini Frans Kaisiepo tumbuh dan besar di bawah asuhan tantenya. Ia telah memanfaatkan waktu-waktunya untuk bermain dan bergaul dengan teman-teman sebayanya dan bercengkerama akrab dengan alam sekitarnya serta masyarakatnya. Sungai yang mengalir dan membentang yang memisahkan rumah tempat tinggal dengan lokasi sekolahnya telah menjadi arena tempat bermain-main dan bersenang-senang untuk menghabiskan waktunya bersama teman sebayanya

Kepemimpinan Frans Kaisiepo sejak masih kecil telah nampak. Di dalam setiap permainan yang dilakukan dengan anak sebayanya, Frans Kaisiepo selalu tampil untuk mengepalai teman-temannya, bahkan apabila ada perselisihan di kalangan mereka dengan kelompok lainnya umpamanya, ia maju sebagai pimpinan untuk melawan anak-anak dari kampung lainnya.

Sejalan dengan pertumbuhan fisik, kepribadian Frans Kaisiepo juga berjalan semakin matang dan sesuai dengan pergantian hari, bulan, dan tahun tanpa terasa ia telah tumbuh menjadi seorang anak dewasa. Kedewasaan tersebut selain ditentukan oleh faktor lingkungan budaya dan sosial ekonominya, juga ditentukan oleh faktor pendidikan informal dan formal yang telah ditekuninya selama ini seperti pengalaman hidup dalam keluarga, dalam hal ini tantenya dan ajaran agama Kristen Protestan yang diterimanya telah menjadikan Frans Kaisiepo menjadi seorang anak yang semakin dewasa dan mengerti akan arti serta makna kehidupan yang sebenarnya. Melengkapi sifat positif yang telah dimiliki oleh Frans Kaisiepo adalah ditunjang oleh cepatnya ia beradaptasi dengan alam lingkungannya. Hal ini telah menyebabkan banyak orang cepat menyenangi kepribadiannya. Begitu juga jiwa kepemimpinan Frans Kaisiepo terus tumbuh sebagai tunas di dalam lingkungan keluarga dan tunas tersebut terus mekar mengikuti arus zaman.²⁾

2) Wawancara dengan Bapak Dr. David Prawar, tanggal 19 Februari 1986 di Mess Cenderawasih, Jalan K.H. Mas Mansyur 63, Jakarta Pusat; wawancara dengan ibu Maria Magdalena Moorwahyudi, tanggal 17 April 1995 di Jalan Setasiun Batutulis, Bogor

BAB III

FRANS KAISIEPO DALAM MENGGELUTI PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

3.1 Pendidikan dalam Keluarga

Dalam setiap masyarakat, betapapun kecil dan sederhananya, anak-anak adalah harapan sebagai generasi penerus dan karenanya harus diberikan pendidikan. Setiap keluarga dalam lingkungan hidupnya harus tahu bagaimana membekali kecakapan dan ketrampilan kepada tunas-tunas mudanya demi kelanjutan keturunannya. Jadi pendidikan adalah segala daya upaya untuk memungkinkan masyarakat hidup terus dan berkembang lebih meningkat. Dalam masyarakat yang masih sedernaha taraf hidupnya, hal yang menyangkut kebudayaan dan pengetahuan belum dituliskan dalam buku. Orang tua hanya mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang telah dipelajari dari orang tuanya dahulu dengan jalan berceritera. Dalam ceritera-ceritera lisan itulah tersimpul adat dan kepercayaan/agama, Cara bekerja, dan bermasyarakat. Hal itulah yang pada awal mulanya diterapkan oleh ayah Frans Kaisiepo terhadap dirinya maupun terhadap saudara-saudaranya yang lain.

Begitu juga pendidikan yang mula-mula didapat oleh Frans Kaisiepo adalah pendidikan di dalam keluarga. Pengasuhan dan pendidikan anak-anak dalam masyarakat Biak Numfor merupakan tanggungjawab bersama antara orang tua anak, bibi, paman, dan seluruh keluarga besar. Anak-anak yang masih kecil diasuh dan diawasi oleh ibunya. Apabila anak laki-laki sudah berumur 12 tahun ke atas, mereka harus dipisahkan dari ibunya dan wanita lainnya, serta

wajib menjalani suatu upacara melambangkan bahwa mereka itu dapat diterima dalam pergaulan orang-orang pria. Sesudah mereka mengalami inisiasi, mereka dapat dimasukkan ke dalam *Rum Sim* untuk mengikuti pendidikan yang meliputi pendidikan moral, adat istiadat, mitos, religi, serta kecakapan kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Biak Numfor. Pendidikan kepahlawanan yang diajarkan kepada anak laki-laki ini meliputi cara-cara menggunakan alat perang ; antara lain cara memanah, melempar tombak, mempergunakan perisai, dan bahkan belajar tari-tarian perang.

Bagi anak-anak perempuan yang sebaya dengan anak laki-laki tersebut masih tetap dalam suhan dan pendidikan ibunya. Mereka diasuh tentang kecakapan/ketrampilan kewanitaan yang mencakup antara lain memasak, menganyam, dan memetik hasil kebun. Di sini terlihat adanya perbedaan pendidikan antara anak laki-laki dan anak perempuan serta terpisah tempatnya mengingat kewajibannya yang berbeda pula di masa depan.

3.2 Pendidikan Formal

Pendidikan formal yang mula-mula didapat oleh Frans Kaisiepo ialah Sekolah Desa Klas 3 atau yang disebut Dorpsschool B atau Volkshool di Wardo. Adapun yang memasukan Frans Kaisiepo pada sekolah ini adalah tantenya yang mengasuh dan membesarkannya, Lokasi sekolah Frans Kaisiepo terletak di seberang sungai dan berhadapan dengan rumah tempat tinggalnya. Berhubung karena tidak memiliki jembatan penyeberangan, maka untuk mencapai sekolah tersebut harus naik perahu atau berenang. Karena itu setiap harinya Frans Kaisiepo pulang pergi ke sekolah harus bertelanjang dan berenang untuk menyeberangi sungai tersebut.

Mata pelajaran yang diberikan di Sekolah Desa ini pada waktu itu meliputi Sejarah Kitab Suci, membaca, berhitung, menulis, bahasa, dan menyanyi. Dan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana pelajaran (Kurikulum) Sekolah Negerai pada masa itu.

Dalam mengikuti pelajaran, untuk Klas I diberikan mata pelajaran membaca dan buku pegangan yang dipergunakan ialah Kitab Bacaan I, II, dan III; sedangkan mata pelajaran berhitung dipegunakan Majulah I

mulai 1 sampai dengan 20. Mata pelajaran bahasa dipergunakan Contoh Percakapan I, dan mata pelajaran menyanyi dipergunakan Biduan Kecil I. Sedangkan media untuk menulis waktu itu dipakai adalah batu tulis dengan mempergunakan anak batu tulis sebagai alat penulisannya.

Sedangkan mata pelajaran yang diberikan untuk klas II meliputi pelajaran membaca dan buku pegangan yang dipergunakan adalah Dekat dan Jauh I, dan II. Mata pelajaran berhitung dipergunakan buku Majulah II mulai dari 1 sampai dengan 100 sedangkan dalam mata pelajaran bahasa dipergunakan Contoh Percakapan II; dan pelajaran menyanyi dipergunakan buku Biduan Kecil II, dan menulis masih mempergunakan batu tulis dan sudah memulai di atas kertas atau buku tulis dengan pensil.

Selanjutnya mata pelajaran untuk klas III, dalam mata pelajaran membaca dipergunakan buku Matahari Terbit I, II, III. Mata pelajaran berhitung dipergunakan buku Majulah III dan sebagian IV mulai dari 1 sampai dengan 1000 dan bilangan pecahan sederhana. Dalam pelajaran bahasa dipergunakan Contoh Percakapan III, dan pelajaran menyanyi dipergunakan buku Biduan Kecil II dan menyanyi-nyanyi lainnya. Menulis tetap di atas batu tulis dengan anak batu tulis atau di kertas / buku tulis dengan pena dan tinta.

Waktu-waktu sekolah diselenggarakan setiap hari kerja yaitu hari Senen sampai Sabtu, dan dimulai dari pukul 07.30 sampai pukul 10.00 untuk anak Klas I, dan dari pukul 10.30 sampai 13.00 untuk anak Klas II, dan III, sedangkan waktu istirahat adalah pukul 10.00 sampai 10.30 dan waktu-waktu itu biasanya dipakai Guru untuk makan pagi. Untuk menunjang kebersihan, maka setiap pagi sebelum sekolah dimulai murid-murid sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, memasuki ruangan kelas wajib membersihkan ruangan Klas. Pada setiap harinya sebelum memasuki ruangan kelas murid-murid berbaris rapi dan kemudian guru memeriksa kedua tangan setiap murid-murid apakah sudah dalam keadaan bersih, kalau yang belum bersih akan terkena hukuman atau setidak-tidaknya harus membersihkannya. Begitu juga lamanya waktu belajar sesuai dengan kurikulum, dan setiap hari diajarkan lima mata pelajaran dan setiap pelajaran memakan waktu 30 menit.

Dalam kaitan ini terlihat bahwa penduduk asli Irian Barat, lebih-lebih yang sudah berkenalan dengan Zending / agama Kristen Pretestan seperti keluarga besar Frans Kaisiepo makin menyadari betapa pentingnya Sekolah Desa. Sekolah tersebut berperan penting untuk mendidik anak-anak dalam upaya untuk memperoleh ilmu dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Dan ini telah dilalui Oleh Frans Kaisiepo dengan baik karena periode tahun 1928-1931 ia telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sekolah tersebut dengan baik dan tamat.

Setelah menamatkan pendidikannya di Sekolah Desa Klas 3, Frans Kaisiepo melanjutkan pendidikannya ke Vervolgschool atau Sekolah Sambungan di Korido, Kecamatan Supiori. Dengan didorong oleh kemauan yang keras serta dukungan orang tuanya yang sudah berpikiran maju pada tahun 1934 Frans Kaisiepo dapat menyelesaikannya dengan nilai yang baik.

Selubungan dengan prestasinya yang baik itu, maka setelah menamatkan pendidikannya pada Vervolgschool di Korido pada tahun 1934, Frans Kaisiepo dapat melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Guru di Miei, daerah Wandamen yang terletak dekat Manokwari. Sekolah tersebut merupakan satu-satunya Sekolah Guru waktu itu di daerah Irian Barat yang dikelola oleh Zending. Frans Kaisiepo dapat berhasil menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut pada tahun 1936.¹⁾

Sejak awal tahun 1945 Frans Kaisiepo melanjutkan pendidikannya pada Kursus Bestuur (pamong Praja) di Kotanica, yang sekarang bernama kampung Bestuur, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, tepatnya tempat ini terletak antara Abepura dan Sentani. Pendidikan Pamong Praja ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1945 oleh NICA (*Nederlands Indische Civil Administration*), pemerintah Penjajah Belanda di Indonesia sesudah berakhirnya perang. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah penjajah akan tenaga-tenaga dari penduduk asli di bidang pemerintah tingkat bawah. Dengan demikian para murid tersebut setelah selesai mengikuti pendidikan akan ditempatkan di pos-pos pemerintah di daerah-daerah Irian Barat.

1) Tarmidja Kartawidjaja, *Sejarah Pendidikan Daerah Irian Jaya (1855-1980)*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek IDKD Daerah Irian Jaya, Depdikbud Irian Jaya, 1980/1981, hal. 15-17; 27-50

Sehubungan dengan itu peserta pendidikan didatangkan dari berbagai daerah Irian Barat, sehingga jumlahnya mencapai 200 orang. Untuk efisiensi, belajar mengajar, para murid ditempatkan di dalam asrama. Mata pelajaran yang diberikan selain teori juga praktek. Dengan demikian apabila ditugaskan di lapangan tidak akan mengalami kesulitan.

Adapun pemimpin kursus Pamong Praja ini yang pertama adalah Subratawidjaja sebagai direktur dan wakilnya adalah Soegoro Atmoprasodjo. Tetapi kemudian karena adanya kepentingan lain Subratawidjaja dipindahkan dan sebagai penggantinya diangkat Soegoro Atmoprasodjo.

Dengan aktifnya Soegoro Atmoprasodjo menjalankan tugasnya di sekolah tersebut, telah dapat mempertemukan kembali ia dengan Frans Kaisiepo yang pernah menjadi muridnya sewaktu mengikuti pendidikan Sekolah Guru di Kotanica, Manokwari, dan murid-murid lainnya dari Keynen. Mereka itu telah banyak menerima ajaran tentang faham kebangsaan dari Soegoro Atmoprasodjo dan mereka menganggap Keynen sebagai "Bapak Pendidikan".

Soegoro Atmoprodjo yang telah menjadi Direktur Kursus Pamong Praja adalah sang pendidik Taman Siswa dan aktivitas pejuang kelahiran Yogyakarta tahun 1913. Karena gerak aktivitasnya tidak pernah berhenti terutama dalam menentang penjajah, maka ia sering keluar masuk penjara. Dan kali terakhir karena ia dianggap membahayakan stabilitas pemerintah Belanda, ia dibuang ke Boven Digul, Irian Barat.

Kepercayaan yang diberikan terhadap Soegoro Atmoprasodjo untuk duduk dalam lembaga pendidikan Kursus Pamong Praja ini adalah berawal dari gagasannyayang gemilang, yang dituangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berjudul "Pendidikan dan Pengajaran Sebelum Perang Tak Berguna Selama dan Sesudah Perang". Tulisan tersebut dikirimkannya kepada NICA yang berkedudukan di Australis.

Menanggapi akan isi tulisan tersebut, Van der Plaas selaku anggota Read Van Indie dan juga mewakili Gubernur Jenderal Hindia

Belanda, dengan ditemani oleh Abdul Kadir Wijoyoatmojo mengunjungi Soegoro Atmoprasodjo di Makey Australia dan mereka itu menawarkan untuk dapat dipraktekkan Tawaran tersebut baru dapat diterima Soegoro Atmoprasodjo setelah mendapat persetujuan dan dukungan dari kawan-kawan seperjuangan.

Dengan tekad untuk menghancurkan kedudukan NICA, Soegoro Atmoprasodjo bertolak ke Hollandia (Jayapura), yang telah dibebaskan oleh Sekutu dan sesuai dengan konsepsi yang telah dikemukakannya, maka ia diangkat sebagai *Advisieur Directeur Ondervijs en Eeresdienst*. Selain itu ia diberi juga tugas untuk memimpin Sekolah Bestuur (Pamong Praja).

Duduknya Soegoro Atmoprasodjo di lembaga pendidikan tersebut bukan saja kedudukannya sebagai Guru, melainkan juga lebih jauh ia telah berperan sebagai Bapak untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak didiknya untuk menghadapi masa depannya. Untuk kepentingan tersebut pertemuan-pertemuan secara teratur dengan para murid di luar jam pelajaran. Salah satu yang ditekankannya pada anak didiknya adalah menanamkan pengertian, agar generasi penerus bukan hanya bercita-cita untuk menjadi pegawai, akan tetapi yang lebih utama bercita-cita menjadi pemimpin dan penggembala. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Soegoro Atmoprasodjo kepada murid-murid ini sesungguhnya adalah terkandung makna kemerdekaan, patriotisme dalam kerangka Indonesia Merdeka. Karena kegiatan itu ia ditangkap dan dimasukkan penjara di Abepura.

Agaknya Frans Kaisiepo sebagai salah seorang murid yang aktif di sekolah tersebut telah dapat menyalin sempurna ajaran-ajaran ataupun gagasan-gagasan vital yang diberikan oleh Soegoro Atmoprasodjo. Hal ini dapat terlihat bahwa Frans Kaisiepo bersama kawan-kawan seperti Marcus Kaisiepo, Lucas Rumkorem, Jan Worumy dan Corinus Kre duduk sebagai katalisator politik yang bertugas untuk membantu Soegoro Atmoprasodjo.

Kemudian dalam periode tahun 1952-1954 Frans Kaisiepo mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada OSIBA (Sekolah Pendidikan Kantor Pamong Praja di Kotabaru (Abepura) dan berhasil menamatkan pendidikannya pada tahun 1954. Kesempatan ini

telah mengantar karir Frans Kaisiepo pada jenjang-jenjang berikutnya, terutama dalam menjalankan tugas dalam bidang pemerintahan.²⁾

3.3 Meniti Pekerjaan

Sejalan dengan bidang kajian ilmu yang telah diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan Guru Normal di Manokwari pada tahun 1937 Frans Kaisiepo mulai menjalankan tugasnya sebagai guru SR (Sekolah Rakyat) atau (SD) dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 1937. Dalam periode ini secara berturut-turut sampai dengan tahun 1942 telah berpindah-pindah tempat dalam menjalankan tugasnya, yang pertama sebagai Guru Bantu pada SR (Sekolah Rakyat) atau Sekolah Dasar (SD) di Wardo, Biak. Selanjutnya dipindahkan dan diangkat sebagai Guru penuh pada SR (Sekolah Rakyat) atau Sekolah Dasar (SD) di Korido, Biak.

Pada masa-masa selanjutnya, karena ditunjang oleh kemampuan Frans Kaisiepo diangkat dan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SR (Sekolah Rakyat) atau Sekolah Dasar (SD) di Mokmer Biak. Kemudian pindah sebagai Kepala Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) di Soweik Biak dan terakhir sebelum kedatangan Balatentara Jepang ia ditunjuk sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) di Kpudori, Biak.

Pada waktu pecah perang Pacifik. Balatentara Jepang menyapu bersih seluruh kekuatan imperialisme Barat di Timur jauh dan pasukan Jepang dapat menduduki Irian Barat. Bersamaan dengan itu, seperti pegawai pemerintah Belanda lainnya, Frans Kaisiepo turut ditawan oleh Jepang dan kemudian diangkut ke Manokwari. Namun demikian, nasib baik masih berpihak selama pendudukan Jepang di Indonesia Frans kaisiepo diangkat sebagai Mandor pada sebuah Perusahaan Kapas milik Jepang NKK (Kanjo Kohatsu Kaisha) di Waren Manokwari.

Pada waktu selanjutnya, setelah Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu, Frans Kaisiepo mendapat kesempatan untuk mengikuti Kursus pada Sekolah Bestuur (Pamong Praja) di Kotanica dan selanjutnya ia pindah kerja dan semenjak itu memulai kariernya dalam bidang

2) Bondan Soedharto dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya, Kerjasama Universitas Cenderawasih dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*, Daerah Tingkat I Irian Jaya, Jayapura, 1989, hal 110-115. Badan Pembina Pahlawan Daerah Tingkat I Irian Jaya Riwayat Perjuangan Frans Kaisiepo (Naskah).

pemerintahan. Terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1945 ia diangkat sebagai Kepala Distrik di Biak Utara. Kemudian dalam periode 1951--1952 ia diangkat dan dipindahkan menjadi Kepala Distrik Supiori Selatan, Biak Numfor, di tempat tanah kelahiran Frans Kaisiepo sendiri.

Pada tanggal 1 Maret 1953 Frans Kaisiepo mendapat kesempatan lagi untuk mengikuti aplikasi pada Bestuur School (Sekolah Pendidikan Kader Pamong Praja) di Kotabaru (Abepura) dan setamat dari pendidikan tersebut ia diangkat menjadi Kepala Distrik Ransiki Manokwari dalam periode tahun 1954-1956.

Setelah tahun 1953 tepatnya sejak tanggal 1 April 1953 Frans Kaisiepo diangkat sebagai *Ongediplomeend Hoof a Bestuur Assisten le Klasse*. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1954 diangkat menjadi *Gediplomeend Bestuur assisten le Klasse*, dan setelah mengikuti aplikasi pada tanggal 1 Januari 1957 di Hollandia (Jayapura) pangkatnya disesuaikan menjadi *Bestuur Assisten le Klasse*.

Dalam periode tahun 1957-1958 jenjang kepangkatan Frans Kaisiepo tambah mengikat dan ini terlihat pada 10 Oktober 1957 ia dipindahkan dan diperbantukan pada *Hoofd van Plaatselijk Bestuur (HPB) di Onder Afdeling* Teminabuan dengan jabatan sebagai *Terbeschiking Onder Afdelling Chef*.

Dalam periode 1959-1962 sebagai konsekwensi dari usulan yang disampaikan dalam konferensi Malino maupun penolakannya menjadi Ketua Delegasi Nederland Nieuw Guinea ke Konferensi Meja Bundar (KMB) Den Haag Negeri Belanda maka ia ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan ini terlihat sejak tanggal 20 Oktober 1959 ditempatkan di Kokas sebagai Kepala Distrik Kokas Fak-Fak.

Kemudian pada tanggal 22 Desember 1959 Frans Kaisiepo dipindahkan lagi dan menjabat *Onder Afdeling Hoofd Fak-Fak*. Pada tanggal 29 Agustus 1961 dipindah lagi dan diangkat sebagai Kepala Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak. Melihat prestasi kerja yang dilakukannya, maka terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1962 pangkatnya dinaikkan menjadi *Hoofd Bestuur Assisten*.

Setelah bekerja sekian lama sebagai Pamong Praja yang ditugaskan dari satu kota ke kota yang lain di seluruh pelosok terpencil

di Irian Barat, sejak tahun 1962 Frans Kaisiepo ditarik ke Ibukota Propinsi Irian Barat. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1963 ia diangkat menjadi *Bestuurs Ambtenaren* dalam jabatan sebagai Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Sukarnopura. Dan pada tahun 1963 disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Tata Praja. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Nopember 1964 Frans Kaisiepo diangkat sebagai wakil Residen di Sukarnopura.

Terhitung mulai tanggal 10 Nopember 1964 sampai dengan 4 Juni 1973 Frans Kaisiepo diangkat sebagai Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Selama dua kali masa jabatan. Pada masa ini tugas berat yang diemban Frans Kaisiepo adalah ditunjuk sebagai Kelompok Pemerintahan Komando Proyek XII/ Irian Barat, yaitu dalam rangka Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Selain sebagai anggota MPR, ia ditunjuk menjadi ketua dan merangkap anggota Panitia Pemeliharaan Daerah Tingkat I Irian Barat, dan dengan kedudukannya sebagai Gubernur, maka ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina KORPRI Propinsi Irian Jaya.

Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Gubernur dalam dua kali masa jabatan, Frans Kaisiepo ditarik ke pusat dan ditempatkan sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Dalam Negeri. Di samping itu pada tahun 1973 Frans Kaisiepo diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sampai akhir hayatnya.³⁾

3) *Ibid*

BAB IV

PERJUANGAN FRANS KAISIEPO MENYAMBUT KEMERDEKAAN

Berbicara tentang berbagai aktivitas dalam gerak langkah perjuangan, Frans Kaisiepo agaknya telah melakukan berbagai jalan yang cukup panjang. Hal ini disebabkan oleh karena jauh sebelum Republik Indonesia ini ada, Frans Kaisiepo sudah aktif menunjukkan aktivitasnya dalam gelanggang perjuangan kebangsaan. Perjuangan yang dilakukannya tidaklah berupa tindakan mengangkat senjata untuk melawan penjajah, akan tetapi perjuangan yang dilakukan Frans Kaisiepo adalah usaha mengangkat derajat bangsanya melalui gerakan-gerakan dalam organisasi kebangsaan. Kesemua itu disumbangkannya untuk kepentingan negara dan bangsanya. Dan ini dibuktikannya lewat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Frans Kaisiepo wilayah kesatuan Republik Indonesia. Peran-peran yang dilakukan Frans Kaisiepo bukan saja sewaktu ia duduk sebagai Gubernur Irian Barat, tetapi jauh sebelumnya, yaitu sebelum Indonesia Merdeka ia telah menunjukkan jati dirinya bahwa ia adalah putra bangsa, bangsa Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia mencapai titik puncak adalah sewaktu Soekarno - Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah diucapkan oleh Soekarno-Hatta itu disambut seluruh rakyat dengan perasaan gembira dan berita tersebut kemudian menyebar luas keseluruhan pelosok tanah air dan akhirnya didengar oleh rakyat Irian Barat. Berita Kemerdekaan

tersebut terus menerus disiarkan oleh putra-putra Indonesia melalui kantor berita Domei dan berita tersebut dapat ditangkap di Australia. Atas inisiatif dan usaha orang-orang Indonesia, khususnya para pejuang eks Digulis yang sudah berada di Australia, segera menyebarluaskan berita proklamasi tersebut lewat pamflet-pamflet. Selanjutnya Pamflet tersebut disebarluaskan antara lain ke Brisbane, Kamp Kasino, Sidney, Melbourne, Merauke dan bahkan sampai ke Ujung Pandang (dahulu Makassar) dan Balikpapan. Dari kota Merauke inilah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui para pejuang kemerdekaan di Irian Barat.

Sementara itu pihak Kolonial Berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat Irian Barat agar dapat menegakkan kembali dominasi kolonialnya di Irian Barat, maka Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) membujuk para pejuang eks Digulis yang melarikan diri ke Australi pada masa penduduk Jepang untuk ditarik kembali bekerja di Irian Barat. Hal tersebut karena Pemerintah Kolonial Belanda sangat membutuhkan tenaga mereka itu dalam bidang pemerintahan. Sehubungan dengan itu maka para pejuang eks Digulis disertai beberapa jabatan dalam bidang pemerintahan, Namun di sisi lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kolonial Belanda, para pejuang eks Digul ini menggunakan kesempatan yang baik itu untuk menanamkan benih kebangsaan dalam jiwa para pejuang Irian Barat.

Salah satu eks pejuang Digul adalah yang bernama Soegoro Atmoprasodjo. Ia adalah seorang bekas pemuka Taman Siswa yang diangkat oleh Pemerintah Kolonial sebagai Penasehat Direktur Pendidikan dan Agama untuk daerah-daerah yang dibebaskan. Di samping jabatan tersebut Soegoro Atmoprasodjo dipercayai juga untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yaitu Sekolah *Bestuur* (Pamong Praja) di Kampung Harapan yang semula bernama Kotanica. Salah seorang murid sekolah tersebut adalah Frans Kaisiepo. Dan di sekolah inilah Frans Kaisiepo berkenalan dengan tokoh-tokoh pejuang bangsa. Penyelenggaraan pendidikan *Bestuur* ini telah dimanfaatkan oleh Soegoro Atmoprasodjo untuk menanamkan paham kebangsaan kepada murid-muridnya dan ajaran-ajaran tentang arti kemerdekaan serta menumbuhkan semangat patriotisme dalam rangka menyambut Indonesia merdeka.

Dalam usaha menyampaikan cita-cita tersebut Soegoro Atmoprasodjo mengadakan rapat-rapat pertemuan secara rahasia dengan pemuda Irian Barat, diantaranya dengan Frans Kaisiepo, Silas Papare, Corinus Krey, Lukas Rumkorem, dan Marthen Indey guna membahas tentang penyatuan Nederlands Nieuw Guinea ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut para pemuda dilatih menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Hasil nyata dari kegiatan-kegiatan tersebut terlibat adanya sambutan rakyat Irian Barat yang ditandai dengan terjadinya insiden pengibaran bendera merah putih pada tanggal 31 Agustus yang bertepatan dengan hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina. Ketika *Senior Officer Nica* yaitu R. Abdul Kadir Widjoatmodjo mempersiapkan perayaan hari ulang tahun Ratu Belanda, maka seluruh rakyat diperintahkan untuk mengibarkan bendera tiga warna yaitu Merah Putih Biru. Akan tetapi didalam kenyataannya yang terjadi adalah rakyat di Irian Barat mengibarkan bendera Sang Merah Putih secara penuh, sedangkan bendera Belanda dan bendera Amerika dikibarkan setengah tiang.

Insiden tersebut jelas mencerminkan manifestasi gejala hati putra-putri Irian Barat untuk menghirup alam kemerdekaan Indonesia. Pengibaran bendera Merah Putih ini dilakukan di Bosnik Timur, bertempat di halaman rumah Lukas Rumkorem dan dihadiri oleh Frans Kaisiepo, Corinus Krey, Marcus Kaisiepo dan M. Youwe. Dalam upacara pengibaran bendera tersebut dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin Oleh M. Rumkabu.

Kegiatan-kegiatan tersebut terus diselenggarakan oleh para pemuda pejuang kemerdekaan Irian Barat dengan melakukan rapat-rapat pertemuan di Jayapura. Bahkan sebenarnya aktivitas rakyat Irian Barat telah terlihat tiga hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Frans Kaisiepo bertempat di kampung Harapan Jayapura telah berani mengumandangkan lagu Indonesia Raya bersama pemuda-pemuda militan lainnya seperti : Marcus Kaisiepo, Nicolas Youwe dan kawan-kawan.

Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Frans Kaisiepo bersama teman-teman murid-murid Kursus Sekolah Bestuur pimpinan Soegoro Atmoprasodjo, lepasan Digul, telah menunjukkan dirinya bahwa mereka itu adalah pejuang-pejuang yang militan. Murid-murid lepasan sekolah ini telah turut berperan aktif, mereka itu telah ditempa menjadi manusia terdidik dan terpelajar dan yang paling penting bahwa mereka itu telah berperan sebagai eksponen pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka itu telah berjasa besar dalam melakukan kegiatan, teristimewa dalam usaha menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan.

Untuk meraih cita-cita kemerdekaan itu, pemuda-pemuda berusaha mengikat tali rasa persatuan kebangsaan dan ini ditandai dengan terbentuknya *Dewan Purwa Kelan Suku* yang anggotanya datang dari berbagai suku Irian Barat. Berdirinya badan ini bukan saja untuk kepentingan sekolah dalam arti kepentingan mereka untuk memperoleh ilmu belaka tetapi melainkan juga telah dimanfaatkan sebagai forum kontak untuk tukar pikiran antara murid dan murid antara murid dengan guru, sehingga karenanya wawasan mereka semakin luas dalam menjiwai cita-cita kemerdekaan. Kesemua aktivitas tersebut telah menjadi bahagian hidup yang tak terpisahkan dari kehidupan Frans Kaisiepo bersama rekannya Lukas Romkorem, Yan Waromi, Corinus Krey, Marthin Indey, Silas Papare, G. Saweri, SD Kawab. Mereka telah menyebarkan semangat kemerdekaan kepada seluruh lapisan rakyat Irian Barat agar dapat disambut dengan dada lapang dan ditegakkan bersama-sama.

Bertolak dari faham kebangsaan yang telah diserap dan dihayati oleh Frans Kaisiepo telah pula membangkitkan semangat yang ditandai masuknya gerakan tersebut ke dalam tubuh Batalyon Papua. Badan ini sebelumnya telah dibentuk bertepatan dengan pendaratan Sekutu di Irian dengan semangat kemerdekaan itu putra-putra Irian Barat baik yang menjadi anggota Batalyon Papua, maupun Polisi serta Sipil telah bersepakat dan bersatu dalam satu barisan untuk melakukan gerakan perlawanan. Untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan, maka diadakan kontak dengan para tokoh pejuang lainnya seperti Silas Papare, Marthen Indey dan Corinus Krey. Dengan memperoleh kata dan sesuai dengan kesepakatan diputuskan bahwa gerakan perlawanan akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 1945.

Pemberontakan ini merupakan suatu aksi yang sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan di Irian Barat. Namun demikian rencana pemberontakan ini telah dapat tercium oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Dan dengan bantuan pasukan dari Rabaul (Irian Timur yang sekarang bernama Papua New Guinea melakukan penangkapan terhadap 250 orang pemberontak termasuk Soegoro Atmoprasodjo, Silas Papare, dan Marthen Indey. Sedang sebagai pananggunjawab dari pemberontakan ini adalah Silas Papare, Soegoro Atmoprasodjo dan Marthen Indey. Mereka ini dijatuhi hukuman penjara, sedangkan anggota lainnya dibebaskan dari tuduhan.

Meskipun mereka itu ditahan dalam penjara tetapi para pejuang tersebut secara diam-diam terus melanjutkan kegiatannya dengan melakukan aksi. Berikutnya mereka menetapkan pada tanggal 17 Juli 1946. Pemberontakan kali ini ditetapkan akan dipimpin oleh Penggoncang Alam, seorang pejuang asal Minangkabau. Sasaran pemberontakan direncanakan adalah melucuti persenjataan tentara KNIL, menangkap pembesar-pembesar Belanda, menduduki stasiun radio dan tempat vital lainnya. Akan tetapi rancana yang telah terinci dan matang ini tercium lagi, karena ada oknum yang membocorkan, maka sebelum dilakukan aksi Pemerintah Kolonial Belanda telah mengadakan pembersihan. Sehubungan dengan hal ini, Silas yang sudah mendekam dalam penjara dianggap sebagai tokoh penggeraknya, maka dipindahkan dari Jayapura ke Serui.

Melihat kenyataan yang demikian, bahwa setiap adanya usaha untuk menggerakkan aksi pemberontakan selalu mengalami kegagalan, maka para kaum penggerak kemudian membentuk suatu organisasi yang tersusun rapi. Hal ini disadari bahwa untuk dapat mencapai suatu tujuan haruslah dapat menghimpun serta mengerahkan seluruh kekuatan rakyat dan untuk itu agaknya diperlukan suatu wadah organisasi politik. Tanpa wadah yang baik sebagai alat penampung aspirasi rakyat, maka akan sedikit sekali hasil yang akan dapat diperoleh untuk mengatur gerak langkah perjuangan menegakan cita-cita kemerdekaan.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut atas bimbingan para pejuang eks Digul, seperti Haryono dan Suprpto telah berperan

membentuk organisasi Komite Indonesia Merdeka (KIM). Komite Indonesia Merdeka ini dibentuk berpusat di Melbourne yang didirikan pada tanggal 29 September 1945 dengan diketahui oleh Jamaluddin Tamin, sedang anggota-anggotanya antara lain adalah Maskun, Kandur Maryono dan lain-lain. Berdirinya Badan ini di samping untuk membela dan mempertahankan proklamasi 1945, Komite Indonesia Merdeka juga bertugas dalam urusan repatriasi atas pemulangan orang-orang Indo ke tanah airnya dan menolak campur tangan Belanda. Selanjutnya Komite Indonesia didirikan di Jayapura pada bulan Oktober 1946 yang diketahui oleh Dr. J.A. Gerungan, yang disebut terakhir ini adalah seorang dokter wanita yang bertugas untuk mengepalai rumah sakit di Abepura Jayapura. Sebagai wakil adalah Lattuparisa, Sekretaris I Corinus Krey, sekarang II: Subroto. Sedangkan Marthen Indey pada saat itu hanya sebagai anggota biasa. Dalam perkembangan selanjutnya pengurus Komite Indonesia Merdeka ini beralih dipegang oleh putra Irian, dengan ketuanya Marthen Indey, Corinus Krey sebagai wakilnya, dan Petrus Watebossy sebagai sekretaris.

Sementara itu di Biak, di kampung halaman Frans Kaisiepo kedatangan Lukas Rumkorem telah membantu perjuangan kemerdekaan yang diawali dengan kegiatan yang antara lain memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat Biak tentang arti kemerdekaan sehingga mereka sadar dan semangatnya bangkit untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun demikian kegiatan yang dilakukan hanya secara diam-diam dan sangat rahasia, hal ini dikhawatirkan karena adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi dengan dorongan kuat semangat kemerdekaan, dalam suatu kesempatan, yaitu ketika diadakan peringatan hari kelahiran Ratu Belanda, para aktivis kemerdekaan tersebut secara demonstratif mengadakan upacara dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran bendera Merah Putih ini diadakan di Bosnik Timur, tepatnya di halaman rumah Lukas Rumkorem. Upacara tersebut dihadiri oleh anggota dari Komite Indonesia Merdeka, seperti Frans Kaisiepo, Corinus Krey, Marcus Kaisiepo dan M. Youwe serta rakyat dan para simpatisan. Dalam upacara tersebut dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin

oleh Lukas Rumkorem. Wakil ketuanya Corinus Krey, sedangkan mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu sebagai tindak lanjut, mereka kemudian mendirikan Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Juli 1946 dengan diketuai oleh Lukas Rumkorem. wakil ketuanya Corinus Krey, sedangkan sekretarisnya ialah Petrus Warikar.

Perlu diingat bahwa salah satu pencetus gagasan berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) adalah Frans Kaisiepo yang waktu itu ia menjadi Kepala Distrik Biak Utara di Warsa. Misi organisasi ini seperti halnya Komite Indonesia Merdeka yang telah didirikan di Jayapura juga bertujuan untuk memberi penerangan tentang arti dan tujuan Indonesia Merdeka. Selanjutnya kegiatan rutin partai ini diisi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan anggota secara rahasia terutama untuk membicarakan ataupun mengatur rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam usaha mendukung terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut di bumi Irian Barat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka segeralah disusun suatu rencana untuk mengadakan perlawanan bersenjata terhadap kedudukan kolonial Belanda. Ternyata rencana tersebut telah tercium. Hal ini karena telah dapat diketahui oleh kaki tangan pihak Pemerintah Kolonial Belanda. Dan sebagai akibatnya Lukas Rumkorem ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pemerintahan Kolonial Belanda dan mendekam dalam penjara di Jayapura dari tahun 1947 sampai pada akhir tahun 1948.

Sementara itu pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 Juli 1946 di Ujung Pandang (dahulu namanya Makassar) diadakan Konferensi Malino. Konferensi ini dimaksudkan untuk mendukung gagasan Van Mook tentang pembentukan Negara Federal Indonesia. Bentuk negara federal ini di dalamnya akan bergabung satu uni dengan Kerajaan Belanda. Dalam konferensi tersebut, Frans Kaisiepo duduk sebagai wakil dari Irian Barat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) untuk menghindari Konferensi Malino. Sebelum keberangkatan ke Konferensi Malino, Frans Kaisiepo telah diberi bekal, terutama fikiran-fikiran yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melalui pertemuan di Jayapura antara Frans kaisiepo dengan Corinus M. Krey serta Marcus

Keisiepo bersama Soegoro Atmoprasodjo untuk membicarakan masalah keberangkatan wakil-wakil Irian Barat dalam Konferensi Malino itu. Salah satu masukan yang akan disampaikan dalam forum tersebut adalah untuk melontarkan kata Papua diganti dengan kata *IRIAN*. Hal ini agaknya merupakan peringatan bersejarah, karena di dalam kesempatan menyampaikan pidato dihadapan para peserta Konferensi Malino tanggal 18 Juli 1946, Frans Kaisiepo mengusulkan gagasan tersebut dan ini sangat mengejutkan pihak Belanda. Karena ia mengusulkan agar nama Papua dan *Nederlands Nieuw Guinea* yang dipakai selama ini ditiadakan dan diganti dengan kata atau nama *IRIAN*. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pengertian *IRIAN* adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands. Pidato Frans Kaisiepo tersebut pada malam harinya disiarkan oleh Radio Makassar (Ujung Pandang) tentang penggantian nama Papua dan *Nederlands Nieuw Guinea* menjadi *IRIAN*.

Penggantian kata Papua dengan kata *IRIAN* itu mempunyai makna tersendiri, karena dengan itu rakyat Irian Barat hendak menunjukkan identitas yang bersumber dari budaya bangsanya. Kata *IRIAN* berarti panas dan kata ini berasal dari bahasa Biak, sedangkan kata Papua mula-mula digunakan oleh pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol. Sejak diucapkan Frans Kaisiepo maka Pemerintah Indonesia terus menggunakan kata kata *IRIAN* dan tetap menggunakan kata Papua.

Kata *IRIAN* yang diucapkan Frans Kaisiepo di depan sidang Konferensi Maino sebenarnya sudah lebih dahulu diberitahukan oleh Surat Kabar Penyuluh di Brisbane, Australia. Pengirim artikel tentang penggantian nama *Papua* menjadi *IRIAN* kepada surat kabar tersebut sebenarnya dilakukan oleh dua bersaudara yaitu Markus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo. Gagasan untuk mengganti nama tersebut telah di cetuskan oleh Frans kaisiepo, sewaktu mengikuti Kursus Kilat Bestuur di Kota Nica Holandia. Ia tidak setuju dengan papan nama kursus/sekolah yang bertuliskan "*PAPUA BESTUUR SCHOOL*". Karena itu ia menyuruh saudaranya, Marcus Kaisiepo untuk mengganti dengan nama "*IRIAN BESTUUR SCHOOL*". Tercetusnya gagasan dua bersaudara tersebut adalah atas saran Soegoro Atmoprsodjo.

Kehadiran Frans Kaisiepo dalam Konferensi Malino telah mengecewakan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga diadakan lagi

Konperensi Denpasar sebagai kelanjutan Konperensi Malino yang diselenggarakan pada tanggal 20-24 Desember 1946, Irian Barat tidak diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Konperensi tersebut. Agaknya tanpa wakil dari Irian Barat dalam konperensi tersebut dimaksudkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda agar tidak merintangi niatnya untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia.

Berhubung dengan usaha Belanda untuk memisahkan wilayah Irian Barat dari Indonesia secara nyata dalam konperensi Denpasar yang berlangsung pada tanggal 20 sampai 24 Desember 1946, para pejuang Irian Barat minta kepada Residen Van Eechoud agar ada wakil-wakil rakyat Irian Barat yang dikirim menghadiri konperensi tersebut. Akan tetapi permintaan itu ditolak, sehingga pada tanggal 12 Desember 1946 Marthen Indey, Corrinus Krey dan Nicolas Youwe mengirim telegram kepada H.J. Van Mook di Denpasar. Adapun isi telegram itu menyatakan agar Irian Barat tidak dipisahkan dari wilayah Republik Indonesia.

Dalam kaitan ini Frans Kaisiepo termasuk orang yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebab wilayah Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam Negara Indonesia Timur. Sehubungan dengan itu Frans Kaisiepo mengusulkan agar Irian Barat juga dimasukkan ke dalam wilayah Karesidenan Sulawesi Utara.

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 dilangsungkan Konperensi Meja Bundar di Den Haag Negeri Belanda. Delegasi Indonesia diketahui oleh Drs. Mohammad Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid Algardire, Delegasi Belanda diketahui oleh J.H. Van Maarseveen dan Delegasi UNCI diwakili oleh Critchley. Sedang Frans Kaisiepo menolak menjadi Ketua Delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke Konperensi Meja Bundar, sebab ia tidak mau didikte untuk berbicara sesuai dengan keinginan Belanda, dan sebagai konsekwensi dari penolakan itu dalam periode tahun 1954 - 1961 ia ditugaskan di distrik-distrik terpencil seperti di Ransiki, Manokwari, Ayamu - Taminabuan, Sorong dan di Mimika, Fak-Fak.

Pada tahun 1961 sewaktu menjabat Kepala Distrik Mimika, Fak-Fak Frans Kaisiepo mendirikan partai politik yang bernama Irian Sebagian Indonesia (ISI). Tujuan partai ini adalah untuk menuntut

penyatuan kembali Nederlands Nieuw Guinea ke dalam Negara Republik Indonesia Indonesia. Kemudian dalam masa Trikora ia memberikan bantuan dan melindungi para pejuang yang didaratkan di Mimika, sehingga tidak dapat diketahui oleh Pemerintah Kolonial Belanda.¹⁾

-
- 1) *Badan Pembina Pahlawan Daerah Tingkat I, Irian Jaya, Riwayat Perjuangan Frans Kaisiepo (Naskah)*; Drs. Bondan Soedharto dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya*, Kerjasama Universitas Cenderawasih dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya, Jayapura, 1989, hal. 89, 110, 177, 201-218.

BAB V

PERAN FRANS KAISIEPO DALAM ARUS SEJARAH

Proses kembalinya Irian Barat kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dilakukan melalui jalan yang cukup panjang. Perjuangan yang telah dilakukan untuk mengembalikan wilayah ini bukan saja dilakukan dengan melalui diplomasi seperti yang telah ditempuh lewat Konperensi Meja Bundar di Den Haag Negeri Belanda, oleh pemimpin-pemimpin kita serta usaha yang dilakukan yang telah dirintis pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dan diteruskan Kabinet selanjutnya dengan memperkenalkan politik luar negeri yang Bebas Aktif dan tidak anti Barat dan membawakan ke forum sidang negara Asia Afrika melainkan juga telah mengambil sikap yang tegas, karena sudah lewat batas Belanda sebagai perwujudan dari sikap bangsa Indonesia seperti digariskan dalam pernyataan Trikora. Dalam fase ini langkah-langkah perjuangan, selain perjuangan politik dan ekonomi, telah pula mengambil sikap tegas dengan menata dan menyiagakan kekuatan bersenjata dengan segala perangkatnya dan siap diterjukkan untuk berhadapan langsung dengan kekuatan Belanda. Untuk keperluan tersebut telah dirinci secara detail baik pos-pos pemberangkatan maupun titik-titik sasaran yang akan dituju, sedang untuk personil telah dibuka karena bagi sukarelawan, sehingga karenanya berduyun-duyun sukarelawan mendaftarkan diri dan siap diterjukkan di medan-medan yang strategis.

Dalam menyambut aksi ini, Frans Kaisiepo dengan beribu-ribu dan bahkan jutaan rakyat Irian Barat Lainnya tidak tinggal diam sebagai penonton, dan untuk menyambut itu mereka turut aktif

mengambil bagian menurut kadar kemampuan masing-masing. Bagi Frans Kaisiepo yang berjiwa kebangsaan itu telah menumpahkan seluruh perhatiannya terhadap kepentingan perjuangan bangsa naik diminta atau pun tidak ia telah menunjukkan bahwa ia mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan kedudukan bangsa dan nasib tanah airnya agar kembali secara utuh.

Memang dalam kenyataan, bahwa jenjang karier yang ditempuhnya kelihatan pada awal geraknya ia duduk di dalam bidang pemerintahan, yang di dalam hal ini adalah Pemerintahan Kolonial Belanda. Akan tetapi hal yang demikian itu bukanlah berarti ia penjilat atau pembela Belanda, akan tetapi kesempatan-kesempatan yang diperolehnya itu telah dimanfaatkannya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi kepentingan perjuangan bangsa. Praktek-praktek yang demikian itu telah dibuktikannya sebagai kenyataan yang nyata dan ini telah dilakukannya dalam melancarkan arus perjuangan yang digariskan Trikora sewaktu ia bertugas sebagai Pejabat di Distrik Fak-Fak. Ia telah berupaya untuk menyelamatkan dan memberikan bantuan terhadap para sukarelawan yang telah melakukan penyusupan di wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Sehingga para sukarelawan yang telah melakukan infiltrasi ini, bukan saja mendapat perlindungan, tetapi lebih jauh mereka itu telah dapat memperoleh informasi yang sangat diperlukan. Begitulah perhatian Frans Kaisiepo selaku pejabat di daerah itu dan ini berarti telah memberikan dukungan moril untuk memperlancar perjuangan membebaskan Irian Barat. Karena tugas yang diemban oleh para sukarelawan tersebut akan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Dari gambaran ini tampak aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah dicetuskan Trikora terlihat adanya kontak, yang baik antara komando Pusat dengan Daerah.

Sementara itu pernyataan Trikora telah menciptakan keadaan panik bagi Belanda dan sekutu-sekutunya dan dalam kenyataannya Amerika Serikat telah merubah sikapnya. Perubahan sikap Amerika Serikat ini telah juga menimbulkan kecemasan di dunia internasional. Tokoh-tokoh politik dunia mengkhawatirkan perselisihan Irian Barat akan menjadi bencana besar bagi Asia Tenggara. Oleh karena itu Amerika Serikat memperingatkan Belanda, apabila terjadi perang

terbuka antara Belanda dan Indonesia, Amerika Serikat tidak akan berpihak kepada Belanda. Untuk memendam keinginan Belanda Amerika Serikat mempercayakan diplomatnya, Ellsworth Bunker untuk mencari jalan penyelesaian persengketaan antara Indonesia - Belanda. Upaya tersebut telah menghasilkan konsep perdamaian yang dikenal usul Bunker dan kemudian diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, U Thant pada tanggal 26 Mei 1962.

Pokok-pokok isi usul Bunker tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Belanda masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama akan menandatangani suatu persetujuan yang diajukan kepada pejabat Sekretaris PBB.
2. Pemerintah Belanda menyetujui penyerahan pemerintahan di Irian Barat (Irian Jaya) kepada suatu Badan Eksekutif Sementara di bawah PBB yang akan mengangkat Kepala Pemerintahan Sementara tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut akan berlangsung tidak kurang dari satu tahun, tetapi tidak lebih dari dua tahun. Tugasnya ialah mengurus berakhirnya Pemerintahan Kolonial Belanda. Dalam waktu singkat pemerintahan akan digantikan dari pejabat-pejabat Belanda dengan pejabat-pejabat yang bukan Belanda dan bukan Indonesia yang bekerja atas dasar perjanjian pendek 1 tahun.
3. Pada tahun kedua pemerintah mulai diganti oleh pejabat-pejabat Indonesia, sehingga pada akhir tahun kedua kekuasaan telah berada di tangan Indonesia, kecuali tenaga-tenaga teknik khusus dari PBB akan tetap pada kedudukannya selaku penasihat.
4. Indonesia menyetujui untuk memberikan kesempatan rakyat di Irian Barat menyatakan pilihannya secara bebas, selambat-lambatnya tujuh tahun setelah pemeritahan berada di tangan Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh PBB.
5. Indonesia dan Belanda menyetujui untuk memikul bersama biaya-biaya yang dikeluarkan untu pembentukan Pemerintahan Sementara PBB.
6. Sesudah persetujuan ditanda tangani, kedua Pemerintah, Indonesia dan Belanda membuka kembali hubungan diplomatiknya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya terjadi kata sepakat yang ditandai dengan penanda tangan Persetujuan New York pada tanggal 26 Agustus 1962,¹ antara Indonesia dan Belanda. Kemudian berdasarkan persetujuan tersebut Belanda menyerahkan Pemerintahannya kepada Badan Pemerintah Sementara PBB (*United Nation Temporary Executive Authority* atau UNTEA) pada tanggal 31 Desember 1962. Dan sebagai tindak lanjut, maka pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia dan semenjak itu resmiah Sang Saka Merah Putih berkibar di bumi Irian Barat menggantikan bendera tiga warna Belanda. Seiringan dengan itu ditunjuk pula Elieser Jan Bonay, putra Irian Barat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat, dan dialah Gubernur yang pertama.

Untuk melancarkan roda pemerintahan daerah itu maka mulai ditata sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan demikian masa peralihan ini dapat berjalan dengan baik.

Pada masa selanjutnya, pada tahun 1964 Frans Kaisiepo ditunjuk sebagai Gubernur pengganti Gubernur Elieser Jan Boney. Bersamaan dengan ini ia ditunjuk pula sebagai Ketua DPRD Daerah Irian Barat.

Merasakan akan segala kekurangannya, Frans Kaisiepo sebagai aparaturnya yang dipercaya menjalankan tugas-tugas yang telah diembannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Irian Barat sehingga sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia ialah masyarakat adil dan makmur.

Selubungan dengan itu langkah yang dilakukan Frans Kaisiepo adalah berusaha dengan segala daya untuk mengejutkan akan segala ketinggalannya dari daerah lainnya. Dari usaha-usaha yang dilakukan itu keahatan tersebut seperti di dalam bidang pendidikan jumlah sekolah Taman Kanak-kanak dibangun dalam periode 1964-1969 berjumlah 30 buah, Sekolah Dasar (SD) periode 1963-1969 berjumlah 1073 buah, SMTA Umum periode 1963-1969 berjumlah 82 buah, SMTA kejuruan periode 1963-1969 berjumlah 25 buah.

Di dalam bidang pemerintahan, karena masa peralihan maka prinsip utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

1) Drs. Bondan Soedharjo dkk, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di Irian Jaya, DHD 45 Propinsi Irian Jaya, Jayapura, 1991 hal 129-130

adalah *Unity Command*, yaitu Gubernur mempunyai kekuasaan penuh terhadap semua aparatur pemerintah. Sistem ini diadakan untuk mengadakan konsolidasi di semua bidang seperti bidang keamanan, politik, ekonomi dan moneter, sehingga menempatkan Irian Barat sebagai Daerah Karantina. Oleh karena itu setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke daerah ini diharuskan mendapat ijin dari pihak yang berkuasa dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi.

Sedangkan dalam bidang ekonomi sistem perekonomian *subsisteme* (pemenuhan kebutuhan sendiri) pola Belanda menjadi perekonomian berorientasi pasar.²

Selain jabatannya sebagai Gubernur, Frans Kaisiepo dipercaya untuk duduk sebagai ketua Penggerak Musyawarah Besar Rakyat Irian Barat. Tugas utama badan ini adalah untuk membicarakan langkah-langkah penyatuan Irian Barat Menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang akan diselenggarakan Tahun 1969 sesuai dengan Persetujuan New York 1962.

Pada tahun 1969, sesuai dengan Persetujuan New York 1962, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada penduduk Irian Barat untuk melaksanakan kebebasan memilih. Pelaksanaan kebebasan memilih diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia, sedangkan petugas-petugas PBB berkedudukan sebagai penasihat. Sehubungan dengan itu, maka Fraas Kaisiepo di dalam tahun 1968-1969 ditunjuk sebagai Kepala Pemerintahan Komando Proyek XII Irian Barat di dalam rangka kegiatan Pepera tersebut.

Berhubungan karena kondisi rakyat Irian yang tidak memungkinkan melaksanakan Pepera ini sesuai dengan persetujuan New York yang menegaskan pelaksanaan pemulihan ini sesuai dengan praktek internasional, maka sesuai dengan mandat PBB pemerintah Indonesia mencari cara yang demokratis. Untuk itu dilakukan konsultan atau musyawarah dengan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) guna menentukan cara yang terbaik yang disesuaikan dengan kondisi Irian Barat.³⁾

2) Ibid., Hal 139-140. Lihat Bondan Soedharto, dkk. Genderang Proklamasi di Luar Negeri. Jakarta, 1977 hal 194.

3) Bondan Soedharto, dkk. *op.cit* hal 140.

Dengan berdasarkan hal itu, maka ditentukan cara dan prosedur sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pepera dengan cara demokratis musyawarah / demokrasi Indonesia.
- 2) Tempat pelaksanaan Pepera di tiap Kabupaten yang ada di Propinsi Irian Barat.
- 3) Untuk menyelenggarakan Pepera di tiap Kabupaten dibentuk suatu Dewan Musyawarah Pepera yang merupakan perwakilan dari seluruh Kabupaten itu.
- 4) Besarnya Dewan musyawarah Pepera (DMP) sebanding dengan banyaknya penduduk Kabupaten masing-masing.
- 5) Menganal jumlah wakil-wakil semula ditetapkan, bahwa tiap 750 orang penduduk mempunyai 1 orang wakil. Tetapi karena Kabupaten Fak-Fak hanya berpenduduk 40.000 orang dan Kabupaten Jayawijaya berpenduduk 165.000 orang, maka ketentuan baru adalah minimum 75 orang dan maksimal 175 orang anggota DMP di tiap Kabupaten.

Rincian besarnya jumlah anggota DMP adalah sebagai berikut ⁴⁾ :

- a) Kabupaten Jayapura.
Jumlah penduduk 83.750 jiwa dengan Dewan Majelis Pepera 75 orang.
- b) Kabupaten Teluk Cenderawasih
Jumlah penduduk 49.870 jiwa dengan Dewan Majelis Pepera 130 orang.
- c) Kabupaten Manokwari
Jumlah penduduk 49.874 jiwa dengan Dewan Majelis Pepera 75 orang.
- d) Kabupaten Sorong
Jumlah penduduk 75.474 jiwa dengan Dewan Majelis Pepera 110 orang.
- e) Kabupaten Fak-Fak

4) *Ibid.* 141-142

Jumlah penduduk 43.187 jiwa dengan Dewan Majelis Pepera 75 orang.

f) Kabupaten Merauke

Jumlah penduduk 144.171 jiwa dengan Dewan Majelis Pepera 175 orang.

g) Kabupaten Paniai

Jumlah penduduk 165.000 jiwa dengan Dewan Majelais Pepera 175 orang

h) Kabupaten Jayawijaya

Jumlah penduduk 165. 000 jiwa dengan Dewan Majelis Pepera 175 orang

Jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera seluruh Irian Barat 1.025 orang.

Untuk menghormati persetujuan New York sebagai perjanjian internasional, pada bulan Juli 1969 dilakukan pelaksanaan Pepera. Pelaksanaan yang pertama sekali dimulai pada 14 Juli 1969 dari Kabupaten Merauke dan berakhir tanggal 2 Agustus 1969 di Kabupaten Jayapura. Di dalam setiap pelaksanaan Pepera ini selalu disaksikan oleh utusan khusus PBB, wartawan dalam dan luar negeri. Demikianlah dengan melibatkan seluruh rakyat dan pelaksanaannya yang dilakukan secara meraton. bergerak dari satu kota ke kota yang lain dan dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan.

Di dalam berbagai kesempatan Frans Kaisiepo selaku Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Barat dan sebagai Kepala Kelompok Pemerintah Komando Proyek XII Irian Barat, di dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) setiap kesempatan Frans Kaisiepo menyempatkan diri naik mimbar untuk menyampaikan kata sambutan. Kata sambutan yang disampaikan itu kadang-kadang isinya berupa pernyataan-pernyataan, ajakan dan kadang-kadang ia memberikan pujian-pujian atas kesetiaan rakyat yang telah turut berperan dalam rangka sepakat untuk bersatu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari rangkaian pelaksanaan kegiatan ini Frans Kaisiepo sebagai Gubernur Kepala Daerah, sebagai putra daerah dan lebih-lebih sebagai

orang tua turut menyaksikan jalannya Pepera yang dimulai dari Kabupaten Merauke (14 Juli 1969), disusul Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Cenderawasih, dan terakhir di Kabupaten Jayapura, dihadiri utusan PBB, DR, Fernando Ortis Sanz, Ketua Pelaksana Pepera, Sudjarwo Tjondronegoro, SH., dan para undangan, wartawan baik luar maupun dalam negeri serta peninjau dan undangan lainnya.

Dalam sidang Dewan Musyawarah Pepera, Gubernur Frans Kaisiepo dalam sambutannya lebih banyak bernada nasehat orang tua dan seorang pimpinan perjuangan. Dalam pidato-pidatonya Frans Kaisiepo mengungkapkan perjuangan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Irian Barat dalam mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945 Lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih sudah berkumandang dan berkibar di beberapa tempat di Irian Barat. Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: "Ikut Republik Indonesi Anti Nederlands". Selain itu, Gubernur Frans Kaisiepo menguraikan juga kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai selama 6 tahun Irian Barat ikut merasakan kemerdekaan bersama dengan daerah-daerah lain, di antaranya dalam bidang pendidikan, sosial dan pemerintahan, dan rencana-rencana pembangunan yang akan datang. Oleh karenanya, demikian Gubernur Frans Kaisiepo, "Saya yakin dan percaya, bahwa pemilihan Dewan itu pasti tetap bersatu dalam Republik Indonesia".⁵⁾

Dalam pelaksanaan Pepera tersebut selaku Gubernur Kepala Daerah TK.I Irian Barat, Frans Kaisiepo selalu menyampaikan kata sambutan pada setiap acara pembukaanya. Berikut ini dikutip cuplikan pidato sambutan Frans Kaisiepo serta tanggapan peserta Anggota Dewan Musyawarah Pepera pada setiap Kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Merauke

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain menyatakan sebagai berikut. " ... Kepercayaan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan pada putra-putri daerah, dalam bidang

5) *Ibid*, 141-142

pemerintahan dan sebagainya adalah hal yang tidak pernah terjadi dalam penjajahan. Dikatakan mungkin rakyat belum seluruhnya merasa puas akan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai itu, tetapi Pemerintah Republik Indonesia Indonesia yang baru 6 tahun secara riil melaksanakan missinya di Daerah Irian Barat, benar-benar telah membawa kemajuan yang pesat. Sebagai seorang tua, selanjutnya Gubernur menyatakan bahwa alam kemerdekaan Republik Indonesia inilah yang membawa kemajuan bagi rakyat Irian Barat sebagai satu Bangsa dalam Negara Republik Indonesia. Rakyat Irian Barat telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa Irian Barat adalah mutlak Daerah Republik Indonesia dan Rakyat Irian Barat Tidak mau dipisah-pisahkan. Banyak di antara Anggota-anggota Dewan Musyawarah juga telah ikut mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Memang tidak ada Negara lain bagi kita dari pada Negara Republik Indonesia adalah Pemerintah kita sendiri dan hanya kepada Pemerintah Republik Indonesia masa depan rakyat Irian Barat seluruhnya dapat kita percayakan...".

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para Anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberi tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 20 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang memberikan tanggapan dan pendiriannya yang umumnya menyatakan " ... akan tetap membela dan memprtahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dan akan tetap berpegang teguh kepada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928...".

Akhirnya sidang Musyawarah Pepera Kabupaten Merauke yang ditandatangani atau cap jempol oleh semua anggota yang hadir (sebanyak 175 orang) memutuskan sebagai berikut :

- 1) Irian Barat merupakan bagian mutlak wilayah Republik Indonesia
- 2) Tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang hingga Merauke.⁶⁾

6) Bondan dan Soedharto, dkk. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di Irian Jaya DHD 45 Propinsi Irian Jaya, Jayapura, 1991, hal. 142-143.

2. Kabupaten Jayawijaya

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain :

Sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, juga sebagai Orang Tua dan Bapak Irian Barat ingin menanyakan kepada saudara-saudara sekalian anggota Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Jayawijaya, "Apakah saudara-saudara ingin tetap merdeka dalam keluarga besar Republik Indonesia atau tidak. Saya yakin, bahwa saudara-saudara telah mengenal dan mencintai Merah Putih, dan karena itu saya yakin satu keluarga Indonesia dan kita tidak ingin dipisah-pisahkan lagi seperti yang telah diputuskan dalam Sidang Dewan Musyawarah Pepera di Kabupaten Merauke pada tanggal 14 Juli 1969".

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberikan tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 18 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang memberikan tanggapan dan pendiriannya yang umumnya menyatakan "... Bagaimanapun juga kami tetap bangsa Indonesia...".

Akhirnya Sidang Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Jayawijaya yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir (sebanyak 175 orang) memutuskan sebagai berikut :

- 1) Irian Barat merupakan bagian mutlak dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang yang berbendera satu "Merah Putih".
- 2) Rakyat Irian Barat tidak mau dipisahkan dari Bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.⁷⁾

3. Kabupaten Paniai

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain menyatakan :

"... Seperti sauar-saudara ketahui, bahwa rakyat dari kedua Kabupaten Merauke dan Jayawijaya (Wamena) yang seluruhnya berjumlah 310 ribu jiwa telah menyatakan tekadnya dan memutuskan dalam Sidang Dewan Musyawarah Pepera untuk tetap merdeka di dalam lingkungan

7) Salikin Soemowardojo dkk, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, Djajapura, 1972, hal 115-117

Republik Indonesia dan tidak mau dipisahkan lagi dan apa yang selalu kita perjuangkan bagi tetap utuhnya wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan oleh Negara manapun di dunia ini. Selama 6 tahun ini kita sekalian telah menyaksikan sendiri usaha-usaha dari Pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan rakyatnya. Beribu-ribu Guru Sekolah diberikan kepada rakyat Irian Barat supaya rakyat Irian Barat dapat bersekolah, bahkan sampai Sekolah Tinggi-pun didirikan di Irian Barat ini. Selanjutnya dikatakan, bahwa kita semua adalah rakyat pejuang, jadi harus seti kepada Merah Putih, setia kepada Republik Indonesia yang telah kita perjuangkan bersama...".

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para Anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberikan tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 28 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang memberikan tanggapan dan pendiriannya antara lain :

"... bahwa ditinjau dari segi etnologis, sejarah, kebudayaan, geografis, politis, Irian Barat merupakan bagian mutlak dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak ingin dipisahkan dari wilayah lain di Indonesia...".

Akhirnya Sidang Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Paniai yang ditandatangani oleh semua yang hadir (sebanyak 175 orang) memutuskan antara lain sebagai berikut :

- (1) Irian Barat merupakan bagian mutlak dari wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia yang berbendera satu "Merah Putih"
- (2) Rakyat Irian Barat tidak mau dipisahkan dari Bangsa Indonesia dari Sabang samapai Merauke.
- (3) Rakyat lebih mementingkan Pembangunan Lima Tahun seperti yang sudah dimulai oleh Pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial dan kebudayaan rakyat Daerah Kabupaten Paniai.⁸⁾

8) *Ibid*, hal 147-149

4. Kabupaten Fak-Fak.

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain menyatakan :

"... Saya sebagai Gubernur dan Orang Tua di wilayah ini berbicara dari hati ke hati dengan seluruh anggota Dewan Musyawarah Pepera berdasarkan pengalaman bekerja yang lebih dari 4 tahun di daerah Kabupaten Fak-Fak ini di masa penjajahan dulu, Saya sudah mengenal apa yang menjadi isi hati dari pada rakyat di sini termasuk isi hati sebageian besar para anggota Dewan Musyawarah Pepera ini yakni : "mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke yang sebenarnya cita-cita itu sejak tanggal 17 Agustus 1945 sudah tercapai. Selanjutnya Frans Kaisiepo mengatakan, bahwa Kemerdekaan Indonesia tidak saja diperjuangkan oleh Rakyat Indonesia di luar Irian Barat, bahkan juga oleh Rakyat Irian Barat sendiri. Oleh sebab itu, Irian Barat adalah bagian mutlak dari Republik Indonesia. Bukti-bukti dari perjuangan rakyat Irian Barat antara lain semasa penjajahan banyak putra-putra Irian Barat yang berkenalan dengan rumah-rumah penjara. Setelah Saya mengikuti Sidang-sidang Dewan Musyawarah Pepera di Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Paniai, di mana telah diputuskan dengan tegas untuk tetap bersatu dengan Republik Indonesia dengan penuh semangat, maka Saya yakin saudara-sadudara anggota Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Fak-Fak ini-pun akan mengikuti keputusan seperti halnya di tiga Kabupaten Fak-Fak ini-pun tidak berbeda dengan di tiga Kabupaten tersebut..."

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para Anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberi tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 17 orang Anggota Dewan Musyarawah Pepera yang memberikan tanggapan dan pendiriannya yang pada intinya semua pembicaraan menyatakan. "... mempunyai tekad yang sama, kemauan yang sama dan karena itu mereka menegaskan akan tetap dalam Negara Republik Indonesia...". Dari pernyataan tersebut berarti secara mutlak dinyatakan, bahwa Kabupaten Fak-Fak adalah bagian yang sejak dari dahulu menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya Sidang Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Fak-Fak yang ditandatangani atau cap jempol oleh semua yang hadir (sebanyak 51 orang) memutuskan antara lain sebagai berikut :

- 1) Irian Barat adalah wilayah mutlak dari Republik Kesatuan Indonesia yang sudah Merdeka dan Berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945.
- 2) Tidak ingin dipisah-pisahkan dari Negara dan Bangsa dari Sabang sampai Merauke.
- 3) Bertekad untuk menghancurkan setiap percobaan usaha jika masih ada untuk memisahkan Rakyat dan Daerah Irian Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁾

5. Kabupaten Sorong

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain menyatakan :

"... Sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, terlebih-lebih sebagai Orang Tua, Bapak Rakyat Daerah ini merasa perlu untuk menyampaikan satu dua patah kata dan berbicara dari hati ke hati dengan Saudara-saudara sekalian para Anggota Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Sorong. Berdasarkan Persetujuan New York 15 Agustus 1962, saudara-saudara para Anggota Dewan Musyawarah Pepera akan ditanyakan suatu pertanyaan..." apakah kita rakyat Irian Barat ingin tetap merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang besar ini,ataukah tidak ". Selanjutnya Frans Kaisiepo mengatakan, " Saya pernah bekerja di Kabupaten Sorong selama 2 tahun yaitu di Distrik Inanwatan dan Teminabuan, karenanya suka dan duka saudara-saudara juga merupakan suka duka Saya pula, Saya ikut menghayati perjuangan saudara-saudara sekalian Rakyat Irian Barat dalam merebut Kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari daerah lain Indonesia dari tangan penjajah. Pemberontakan rakyat di Biak tanggal 14 Maret 1948 untuk melawan penjajahan serta pernyataan rakyat bersatu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh putra-putra Irian Barat pada tanggal 13-14 Agustus 1945 di Kampung Harapan Jayapura (dahulu Kota Nica) mengingat Saya betapa hebat dan bergelornya semangat juang rakyat dari Sabang sampai Merauke. Pada saat itu kita telah mengumandangkan lagu "Indonesia Raya" bersama-sama sebagai lagu perjuangan Nasional kita dari seluruh rakyat Indonesia termasuk Irian Barat. Sehingga proklamasi 17 Agustus 1945 adalah juga milik kita

9) *Ibid*, hal. 166-168

dari pada rakyat Irian Barat, karena rakyat Irian Barat juga mempunyai andil dalam perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi jelaslah bagi kita bahwa Irian Barat telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan Irian Barat adalah bagian mutlak dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pernyataan-pernyataan dari Kabupaten Sorong telah Saya terima yang isinya ingin tetap merdeka dalam lingkungan keluarga besar Indonesia. Kita telah merdeka dan telah menjadi satu keluarga Indonesia dan kita tidak ingin dipisah-pisahkan lagi seperti yang telah diputuskan dalam Sidang-sidang Musyawarah Pepera di Kabupaten-kabupaten Merauke, Jayawijaya (Wamena), Paniai dan Fak-Fak...".

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para Anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberikan tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 16 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang memberikan tanggapan dan pendiriannya yang umumnya menyatakan "...Kami mau tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah di Proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945..."

Akhirnya sidang Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Sorong yang ditandatangani dan cap jempol oleh semua yang hadir (sebanyak 106 orang) memutuskan antara lain :

- (1) Irian Barat adalah wilayah mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak bisa dipisah-pisahkan oleh siapapun juga, berdasarkan Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928.
- (2) Menjunjung tinggi dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan hanya mengenal satu Negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila, berwilayah dari Sabang sampai Merauke.
- (3) Sangat menghargai dan menyambut baik maksud Pemerintah untuk memberikan otonomi yang luas kepada Daerah Propinsi Irian Barat.¹⁰⁾

10) *Ibid*, hal 195-196.

6. Kabupaten Manokwari

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain menyatakan :

"... Saya sebagai Orang Tua dapat menghayati perjuangan saudara-saudara sekalian Rakyat Irian Barat dalam merebut kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari daerah lain Indonesia dari tangan penjajah, Saya pernah bekerja di daerah Kabupaten Manokwari ini selama 2 tahun yaitu di Ransiki sehingga Saya mengenal benar daerah ini dan juga rakyat seluruhnya. Karenanya suka dan duka saudara-saudara juga merupakan suka dan duka saya dan apa yang saudara-saudara cita-citakan adalah juga cita-cita Saya. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah juga menjadi milik dari pada rakyat Irian Barat, karena Rakyat Irian Barat juga ikut berjuang dalam memperebutkan Kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah dan Irian Barat telah Merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 bersama-sama dengan daerah-daerah bekas Hindia Belanda yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Keyakinan Saya semakin teguh akan kebenaran perjuangan rakyat yang tahan uji setelah Saya menyaksikan sendiri di setiap Kabupaten yang telah melaksanakan Sidang Dewan Musyawarah Pepera, sungguh menjadikan Saya bangga dan terharu. Bangsa karena rakyat dari Kabupaten Merauke, Jayawijaya (Wemena), Panial, Fak-Fak dan Sorong dengan tegas telah menyatakan dan menetapkan bahwa rakyat dan wilayah Irian Barat tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama 6 tahun ini kita telah menyaksikan sendiri betapa sungguh-sungguhnya Pemerintah Republik Indonesia berusaha memajukan kehidupan dan penghidupan rakyat di Irian Barat. Tunjukkanlah keteguhan perjuangan dan kesetiaan saudara-saudara kepada amanat rakyat yang saudara-saudara wakili yaitu Tetap Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia..."

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para Anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberi tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 26 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang memberikan tanggapan dan pendiriannya, antara lain Nona Jochbeth Monogim yang menyatakan, bahwa..." Kami Rakyat Irian Barat sudah merdeka 17 Agustus 1945 bersama-sama dengan saudara-

saudara kami dari Daerah Irian Barat dan dari daerah Indonesia lainnya. Hal ini terbukti... Bapak Frans Kaisiepo tidak akan menjadi Gubernur Kepala daerah Propinsi Irian Barat, dan Bapak Samuel Semianus Kawab tidak akan menjadi Bupati Manokwari dan wanita-wanita Irian Barat tidak akan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan baik di Pusat Propinsi dan di Kabupaten apabila Irian Barat belum merdeka dalam lingkungan negara Kesatuan Republik Indonesia...".

Akhirnya Sidang Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Manokwari yang ditandatangani oleh semua yang hadir (sebanyak 75 orang) memutuskan, antara lain :

- (1) Dengan atau tidak dengan Pepera, Irian Barat merupakan wilayah mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah Merdeka dan Berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945.
- (2) Sama sekali tidak ingin dipisahkan dari Kesatuan Keluarga Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke oleh siapapun juga.
- (3) Menolak dengan tegas setiap usaha yang mencoba memecah belah kami Bangsa Indonesia dan merongrong Kesatuan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.¹¹⁾

7 Kabupaten Teluk Cenderawasih

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain menyatakan sebagai berikut :

"... Saya sebagai Orang Tua dapat menghayati perjuangan saudara-saudara sekalian rakyat Irian Barat dalam merebut kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari daerah lain Indonesia dari tangan penjajah. Saja saksikan bahwa kota Serui yang merupakan tempat pembuangan dr. Ratulangi pada tahun 1946 dan Serui telah menyebarkan semangat kepahlawanan kesegelan penjuru daerah Irian Barat bahkan kesegelan Nusantara. Saya saksikan pula bagaimana hebatnya perjuangan saudara-saudara dari Biak ini sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan mencapai puncaknya dalam pemberontakan rakyat pada tanggal 14 Maret 1948 di Biak ini yang sekarang ini tempat kita bermusyawarah. Saya bangga karena rakyat dari

11) *Ibid*, hal 221-225

Kabupaten Merauke, Jayawijaya (Wamena), Paniai, Fak-Fak, Sorong, dan Manokwari dengan suara bulat telah menyatakan dan menetapkan bahwa Rakyat dan Wilayah Irian Barat tidak dapat dipisahkan lagi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Kemenangan-kemenangan Rakyat di 6 Kabupaten yaitu Merauke, Jayawijaya (Wamena), Paniai, Fak-Fak, Sorong, dan Manokwari merupakan hasil kemenangan yang sah dan tak ada seorangpun di dunia ini yang dapat mengganggu gugat kerunia Tuhan yang terbesar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di dalam Sidang Musyawarah Pepera hari ini, Saya yakin bahwa di Biak-pun semangat Rakyat juga bergelora seiring dengan semangat Rakyat di Kabupaten-kabupaten Merauke, Jayawijaya (Wamena), Paniai, Fak-Fak, Sorong, dan Manokwari. Tunjukkanlah keteguhan perjuangan dan kesetiaan saudara-saudara Anggota Dewan Musyawarah Pepera kepada Amanat Rakyat yang Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia...".

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para Anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberikan tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 24 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang memberikan tanggapan dan pendiriannya, antara lain Idris Kasim. Ia mengatakan, " bahwa Pepera di Irian Barat ini tidak perlu diadakan karena teretusnya kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 juga meliputi rakyat dan wilayah Irian Barat...". Hal yang senada disampaikan oleh Lukas Rumkorem, tokoh pejuang, partner Frans Kaisiepo dalam barisan perjuangan antara lain mengatakan : "... Keenam Kabupaten lainnya sudah menyatakan tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila Kabupaten Teluk Cenderawasih yang terdiri dari daerah Blak, Numfor dan daerah Yapen Waropen dijuluki sebagai, " daerah perjuangan". Oleh karena itu secara singkat saya hendak menegaskan di hadapan misi Tuan Fernando Ortiz Sanz bahwa Irian Barat adalah hak mutlak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke...".

Akhirnya Sidang Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Teluk Cenderawasih yang ditandatangani oleh semua yang hadir (sebanyak 131 orang) semutuskan antara lain :

- (1) Irian Barat adalah bagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Merauke sampai Sabang.
- (2) Tidak mau dipisah-pisahkan dari Kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia
- (3) Sanggup mempertahankan Kemerdekaan dan keutuhan persatuan Bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang dengan segala kekuatan yang ada pada kita.
- (4) Ingin meningkatkan usaha pembangunan Daerah Irian Barat dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.¹²⁾

8. Kabupaten Jayapura

Para tanggal 2 Agustus 1969 adalah penyelenggaraan Pepera Kabupaten Jayapura dan kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan pelaksanaan Pepera di seluruh Daerah Propinsi Irian Barat. Untuk menyaksikan dari dekat jalannya Pepera ini hadir Duta Besar Australia, Jerman Barat, Selandia Baru dan Myanmar.

Frans Kaisiepo dalam sambutannya antara lain mengatakan :

"... Saya sebagai Orang Tua dapat menghayati perjuangan saudara-saudara sekalian Rakyat Irian Barat dalam merebut kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari derah Indonesia lainnya dari tangan penjajah. Saya saksikan sendiri pada hari-hari menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945 di Kampung Harapan (dahulu Kota Nica) di Jayapura ini semangat juang rakyat telah berkobar-kobar dengan dahsyat sehingga segala ancaman dari pihak penjajah tidak menggentarkan hatinya dan dengan berani berkumpul dan telah menyatakan bersatu dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang maha hebat dan begelora dari Merauke sampai Sabang. Pada saat itu pula Saya saksikan betapa Irian Barat yang telah membangkirkkan setiap insan putra Irian Barat berjuang melawan penjajahan. Semangat yang menyala-ya tersebut menyambar kesegenap penjuru daerah Irian Barat bahkan sampai keseluruhan Nusantara kita ini, karena 3 hari kemudian Proklamasi 17 Agustus 1945 bergelora keseluruh rakyat dan wilayahnya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

12) Ibid, hal 257-261

Saya benar-benar terharu akan keteguhan dan kesetiaan rakyat terhadap cita-cita dan perjuangan bangsa serta sumpah sakti 28 Oktober 1928 yang berisikan ikrar : SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, YAITU INDONESIA. Saya merasa bangga karena rakyat Saya di Kedelapan Kabupaten yaitu Merauke, Jayawijaya (Wemena), Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Teluk Cenderawasih, dan Jayapura (Yapen Waropen) dengan suara bulat telah menyatakan dan menetapkan bahwa rakyat dan wilayah Irian Barat tidak dapat dipisah-pisahkan lagi dengan negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dengan demikian, penduduk dari kedelapan Kabupaten yang berjumlah 734.658 jiwa yang telah menyatakan tekadnya dan memutuskan dalam Dewan Musyawarah Pepera untuk tetap merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meliputi 9/10 dari seluruh penduduk Irian Barat yang berjumlah 800.000 jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk yang berjumlah 800.000 jiwa tersebut. Selanjut Frans Kaisiepo mengatakan, bahwa Kabupaten Jayapura adalah merupakan Kabupaten yang terakhir yang melaksanakan Pepera dan Saya mengecewakan harapan rakyat. Pernyataan-pernyataan dari Rakyat Jayapura ini telah banyak yang Saya terima yang isinya antara lain ingin tetap merdeka dalam lingkungan keluarga besar Indonesia. Kita tidak akan terpisah lagi untuk selama-selamanya seperti yang telah diputuskan dalam sidang-sidang Musyawarah Pepera di Kabupaten-kabupaten Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Teluk Cenderawasih, dan Japen Waropen (Jayapura)..."

Dalam pidato sambutan yang disampaikan Soedjarwo Tjondronegoro SH., antara lain mengatakan : "... meskipun sudah diketahui hasil Pepera 90%. Menguntungkan kita dan tidak mungkin akan merubahnya tetapi Pemerintah dan rakyat Irian Barat ingin mengetahui pula suara dan sikap rakyat Kabupaten Jayapura. Sidang ini sebagai kunci penutup tidak mengecewakan sebab merupakan "Gong" terakhir yang menggema ke seluruh dunia mendengarkan hasil gemilang Pepera di Irian Barat."

Kemudian dalam acara selanjutnya diberi kesempatan kepada para Anggota Dewan Musyawarah Pepera untuk memberi tanggapan dan pendirian. Ternyata ada 26 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera

yang memberikan tanggapan dan pendiriannya, antara lain : R.J. Daimoi. Ia mengatakan : "... Irian Barat adalah itu adalah hak mutlak dari pada Republik Indonesia. Sebagaimana kami dengar ada berita dari luar negeri yang mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyogok rakyat Irian Barat. Berita ini Sama sekali tidak benar...". Selanjutnya Haji Ibrahim Bauw antara lain mengatakan : "... sekiranya tanpa campur tangan PBB, melalui Trikora kami akan berkelahi dengan Belanda".

Sebagai penutup, Menteri Dalam negeri, Amir Machmud, dalam pidatonya antara lain menyatakan : "... bahwa hasil keputusan wakil-wakil rakyat tidak dapat diganggu gugat. Keputusan ini akan dipertahankan dengan darah dan daging oleh rakyat Irian Barat dan bangsa Indonesia seluruhnya..."

Demikianlah akhirnya Sidang Anggota Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh semua yang hadir (sebanyak 110 orang) memutuskan antara lain :

- (1) Irian Barat adalah bahagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke
- (2) Rakyat Irian Barat tidak mau dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mau dipisahkan dari Kesatuan Bangsa Indonesia.
- (3) Rakyat Irian Barat sanggup mempertahankan Kemerdekaan dan keutuhna Bangsa Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang dan sekali merdeka tetap merdeka dalam pengakuan Republik Indonesia.
- (4) Rakyat Irian Barat mementingkan pembangunan di segala bidang dalam pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.¹³⁾

Demikian pada awal bulan Agustus 1969, setelah melintasi batas di seluruh wilayah / Kabupaten di Irian Barat pelaksanaan Pepera telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persetujuan New York dan hasilnya adalah rakyat Irian Barat menentukan tetap bersatu di dalam wilayah

13) *Ibid*, hal. 315-329

Republik Indonesia. Dengan demikian juga telah terjadi arus perubahan sejarah karena diadakan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1969 sudah benar-benar terwujud secara de facto dan de jure.

Meskipun kemudian muncul suara-suara kecemburuan atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, namun tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, karena telah dilakukan sesuai prosedur sebenarnya. Dan ini telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersilang pendapat antara Indonesia dan Belanda.

Kemudian untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah dan kepentingan rakyat Irian Barat, maka selanjutnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya dan Kabupaten otonom Propinsi Irian Jaya. Bersamaan dengan ini dipercayakan Frans Kaisiepo untuk terus sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya.

Pada tanggal 8 Agustus 1969 Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud yang bertindak selaku Ketua pelaksana Pepera menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan ini kepada Presiden. Dari ini merupakan hasil gemilang yang diraih oleh pemerintah Republik Indonesia setelah diperjuangkan selama 3 dasa warsa. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 31 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1969, maka hasil pelaksanaan Pepera ini akan menjadi salah satu materi pidato Presiden. Demikianlah kemudian apa yang telah diraih itu disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1969 sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan di depan sidang MPR.

Selanjutnya, sesuai dengan Persetujuan New York, hasil pelaksanaan Pepera ini disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan dibawa ke sidang PBB ke-24 untuk dibicarakan.

Sehubungan dengan itu, untuk lebih menyakinkan dunia internasional, Frans Kaisiepo dengan dua tokoh putra Irian Jaya ditunjuk sebagai anggota delegasi bersama 9 anggota delegasi dari Pusat yang dipimpin oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri.

Meskipun jalannya sidang sedikit alot namun akhirnya sidang memutuskan bahwa wilayah Irian Barat Resmi masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI. ¹⁴⁾

14) *Ibid*, hal 374-379

BAB VI

FRANS KAISIEPO DAN KELUARGA

6.1 *Mengenal Pribadi*

Frans Kaisiepo memiliki bangun tubuh yang kokoh, dengan kulit hitam manis serta rambut ikal pada masa mudanya, tetapi dimasa tua tampak menipis. Langkah dan ayunan tangannya serasi serta harmonis, sehingga kelihatan berwibawa. Sepintas ada kesan menakutkan, karena sifatnya yang pendiam dengan sorotan matanya yang tajam. Akan tetapi ia tidaklah galak, karena disebalik itu tersimpan pribadi yang mengagumkan serta kelembutan hati yang penuh kerahaman, karena ia juga adalah anak manusia ciptaan Tuhan yang membutuhkan pergaulan dan persaudaraan.

Kepribadian kuat, sekuat pendiriannya yang telah ditempa oleh alam sekitarnya. Ia selalu berpegang teguh pada akar budaya bangsanya yang bernilai luhur. Dan salah satu pendirinya adalah ia tidak mau didikte, apabila hal tersebut menjatuhkan martabat dan harga dirinya. Karena obsesinya adalah ingin mengangkat derajat bangsanya yang tertindas menjadi manusia layak, setidaknya lebih baik dari yang pernah dirasakannya. Sikap yang Pemerintah Kolonial Belanda yang ingin mempertahankan kedudukannya menunjuk Frans Kaisiepo sebagai delegasi oleh Gubernur Nieuw Guinea untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag negeri Belanda.¹⁾ Kepercayaan itu ditolak dengan tegas oleh Frans Kaisiepo, karena menurutnya hal tersebut akan marugikan bangsanya sendiri.

1) Riwayat Hidup dan Perjuangan Frans Kaisiepo, Jakarta, 3 Agustus 1993, hal 3

Dalam berkomunikasi, Frans Kaisiepo memiliki keunikan karena dalam penampilan awal ia kelihatan dingin-dingin saja. Akan tetapi setelah terlibat dalam pembicaraan diri dalam suasana dan alur pembicaraan. Sehingga tampak berwibawa karena pembicaraan menjadi hidup dan memikat.

Begitu juga dalam memecahkan permasalahan yang timbul, ia bertindak bijaksana. Sehingga kebijakan atau keputusan yang diambilnya tidak merugikan bagi pihak manapun. Karenanya banyak pendapat yang mengatakan, "bahwa Frans Kaisiepo dalam memecahkan atau memutuskan suatu permasalahan bertindak sebagai pendeta".²⁾

Sidang dalam usaha menanggulangi kehidupan, ia bukanlah penganut materialistis, kalau boleh disamakan dengan kaum sufi ia termasuk orang zuhud, karena keperluan hidup seperlunya saja. Keinginan memupuk harta benda sebagai kekayaan tidak ada niat dalam dirinya. Tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk mempergunakan jabatan sebagai alat untuk memperoleh kekayaan pribadi. Dan hal itu telah dibuktikannya, ketika ia mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara Pepera dalam menentukan status Irian Barat telah mengembalikan sisa dananya kepada Kas Negara tanpa mengambil sepeserpun.³⁾ Bahkan di balik sifat kedermawananlah yang selalu ditunjukkan Frans Kaisiepo. Ia tidak dapat menolak apabila ada yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Dan untuk itu bantuan uang umpamanya ia tidak segan-segan untuk meminta kepada istri, sehingga karenanya tidak jarang terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangganya, namun bagi Frans Kaisiepo jawabannya enteng saja, "nanti rezeki kita datang dari tempat lain".

Sifat yang demikian itu agaknya selain pembawaan juga berangkat dari pengalaman hidup yang telah dirasakannya sebagai orang yang ditanggal ibunya sejak kecil. Kemudian dalam menjalani kehidupan ia telah berhadapan dengan berbagai corak kehidupan yang keras. Kesemua itu telah menyentuh hati nuraninya bagaimanakah penderitaan teman, saudaranya dan bangsanya yang digolongkan

2) Wawancara dengan Nyonya Maria Magdalena Moorwahyuni Frans Kaisiepo, tanggal 17 April 1995 di Jalan Stasiun Batutulis Bogor

3) *Ibid*

rakyat kecil dan diletakkan di kelas bawah. Mereka itu tersebar luas seperti ditepian sungai, di kaki bukit terjal bahkan di puncak gunung dan ada yang mengembara membawa penderitaan yang tak kunjung padam oleh sikap dan tindakan penjajah Belanda. Berangkat dari itulah agaknya sifat sosialnya tumbuh dan mengakar menjadi miliknya.

Begitu juga dalam pergaulan, Frans Kaisiepo mampu menjalin akrab persaudaraan maupun persahabatan dengan banyak orang. Tamannya bukan datang dari suku Biak saja tetapi telah menjalin persaudaraan dengan suku lainnya dengan baik. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ia bukanlah sosok yang menganut paham Kedaerahan yang sempit, tetapi ia adalah pendukung paham kebangsaan yang utuh. Hal demikian terlihat sewaktu ia menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, baik staf maupun ajudannya bukan saja orang Irian, tetapi juga suku bangsa lain seperti antara lain suku Jawa, Palembang, Batak dan Bugis. Dan yang disebut terakhir ini adalah Makkateru Syamsuddin, dekreterisnya. Makkateru adalah yang mengatur dan menyelesaikannya. Sehubungan dengan itulah maka Makketeru Syamsuddin melekat dengan dirinya, karena sesudah melepaskan jabatan Gubernur, Makketeru Syamsuddin ikut pindah bersama Frans Kaisiepo ke Jakarta.⁴⁾

6.2 Membangun Rumah Tangga

Keluarga adalah medium suci, tempat anak-anak dilahirkan, yang kemudian menyebar sebagai generasi penerus umat manusia. Dengan berpegang pada patokan tersebut, maka pada tahun 1938 Frans Kaisiepo yang waktu itu masih tergolong remaja telah berani melangsungkan pernikahannya dengan gadis pilihannya yang bernama Anthomina Arwan. Upacara pernikahannya berlangsung secara adat Biak seperti lazimnya dilakukan oleh masyarakat pendukungnya pada waktu itu.

Frans Kaisiepo sewaktu menikah termasuk muda belia, bila dibandingkan dengan perkawinan mas akini. Hal ini dapat terlihat dari data-data tentang catatan kelahirannya. Dalam catatan pertama ia dilahirkan pada tahun 1919, sedang dalam catatan yang lain tahun

4) *Ibid*

kelahirannya adalah tahun 1921.⁵⁾ Kalau memang benar tahun kelahiran seperti yang tersebut belakangan ini (1921), maka usianya sewaktu melangsungkan pernikahan adalah 17 tahun.

Akan tetapi agaknya faktor umur pada masa itu bagi masyarakat pendukungnya tidaklah menjadi masalah yang dipertimbangkan secara serius. Apalagi Frans Kaisiepo yang kala itu yang terbilang langka, telah dapat menyelesaikan pendidikannya dan kemudian ia diangkat untuk bertugas sebagai Guru. Dengan demikian biaya hidup tidak menjadi persoalan yang berat untuk mengayuh bahtera kehidupan rumah tangga. Karena ia telah memperoleh gaji sebagai penghasilan tetap dalam tiap bulannya.

Dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang putri yaitu Beatrix Kaisiepo dan Susanna Kaisiepo serta seorang anak laki-laki bernama Manuel Kaisiepo.

Kehidupan rumah tangga yang dibina bersama istri tercinta ternyata tidak berlangsung lama, sebab Anthomina Arwan lebih dahulu menghadap sang Penciptanya. Sehubungan dengan itu, maka Frans Kaisiepo terpaksa berperan ganda yaitu berperan sebagai Bapak sekaligus berperan sebagai Ibu dalam membimbing dan menuntun anak-anaknya menjadi anak yang berguna.

Akan tetapi, pada masa-masa selanjutnya bahtera rumah tangga terasa oleng setelah ditinggal istri tercinta dan bagi Frans Kaisiepo terasa sangat sulit, terutama dalam mengasuh dan membesarkan anak. Kepergian istri tercinta untuk selama-lamanya terasa sangat memukul hatinya, karenanya begitu sulit untuk menghapus dari ingatan. Karena itu hanya anak-anaklah sebagai salah satu penawar duka yang paling mujarab untuk mengatasainya.

Pada masa-masa sedemikian berat, Frans Kaisiepo membutuhkan kemampuannya sebagai Bapak yang penuh dengan tumpahan kasih sayang, meskipun pada sisi lain ia harus menunjukkan wibawanya sebagai Bapak Pejabat yang menegakkan disiplin dalam menjalankan tugasnya.

5) Beberapa catatan, Frans Kaisiepo dalam Makkateru Syamsuddin, *Asal Mula Nama Irian* (Naskah), Jakarta PT. Kinta Utama Murni, hal 36: lihat *Riwayat Hidup dan Perjuangan Frans Kaisiepo*, Jakarta, 3 Agustus 1993.

Dari didikan itu, anak-anak tumbuh bukan saja pisiknya, tetapi rohani juga terisi dengan ilmu yang bermanfaat untuk hidup dan kehidupannya. Dan ini terlihat dari kehidupan anak-anaknya dewasa ini yang salah satu anaknya kawin dengan seorang Dosen dan salah satu tenaga pengajar di Universitas Cenderawasih Irian Jaya. Sedangkan bungsu Manuel Kaisiepo hidup mandiri sebagai kolonius yang memiliki wawasan luas dan tulisannya sering dimuat didalam lembaran Harian Kompas.

Dalam masa-masa mengemudikan bahtera hidup bersama istri tercinta, Anthomina Arwan telah merasakan suka dukanya. Hal demikian sebagaimana layaknya seorang Pegawai Negeri dalam menjalankan tugas selalu berdasarkan Surat Keputusan perintah dari atasan, yang dalam hal ini waktu adalah Pemerintahan Hindia Belanda. Merekalah yang mengatur dan menentukan jalannya pemerintahan. Sehubungan dengan itulah maka Frans Kaisiepo bersama keluarganya yang sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya untuk melaksanakan tugas ikut dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari kota yang penuh terpencil. Pada setiap tempat ia bertugas paling lama mereka menetap selama dua tahun.

Begitulah seterusnya, sehingga Frans Kaisiepo bersama keluarga tercinta sudah menjeleajahi laut, udara dan daerah pedalaman bumi Irian Barat yang dimulai dari Biak, Manokwari kapala burung sampai ke Fak-Fak di ujung perbatasan dengan timur (Papua Nieuw Guinea).

Dalam melakukan perpindahan ini, agaknya dapat dibayangkan betapa repotnya, karena perpindahan ini bukan saja memboyong anak istri dan barang yang diperlukan, melainkan juga adalah menghadapi berbagai problema yang membutuhkan pemecahan yang cepat, terutama dalam hal beradaptasi dengan masyarakat setempat yang menganut corak ragam kebiasaannya. Begitu juga keganasan bumi Irian yang kala itu masih perawan dan sangat sulit ditembus. Alat transportasi vital hanyalah perahu, dan selebihnya dilakukan dengan jalan kaki dengan jalan yang berat serta menakutkan.

Kesemua itu telah dilakukan oleh Frans Kaisiepo, namun demikian ia terus meniti hidup dan kehidupan sambil menenteng anak istri yang dicintanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikianlah gerak langkah Frans Kaisiepo dalam masa-masa membimbing dan membina keluarga sewaktu bersama istri tercinta yang sudah almarhumah. Ia berusaha dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak-anaknya meskipun dibebani oleh berbagai kesibukan sehari-hari dalam menjalankan tugasnya.

Dalam tahun 1967 setelah lama menduda, Frans Kaisiepo kembali membuka pintu hatinya dan berkenalan dengan seorang wanita yang berwajah manis yang nama lengkapnya adalah Maria Magdalena Moorwahyuni. Didalam tubuh gadis ayu ini masih mengalir darah keningratan yang terikat dengan turunan raja di pantai utara jawa.

Perkenalan Frans Kaisiepo dengan Maria Magdalena Moorwahyuni ketika itu berawal dari ulah tingkah salah seorang pemuda Irian yang pada waktu itu sedang mengikuti pendidikan di Semarang, dan pemuda tersebut menodai seorang anak gadis pelajar SMP dan anak tersebut adalah anak dari teman dekat Moorwahyuni. Akan tetapi setelah diminta pertanggung jawaban pemuda tersebut tidak mau mengakui atas segala perbuatannya yang tercela itu. Melihat akan perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu, Maria Magdalena Moorwahyuni yang merasa dirinya dipermalukan memberanikan diri sebagai juru bicara dalam menuntut penyelesaiannya. Akan tetapi dalam penyelesaian kasus tersebut telah mempertemukan Maria Magdalena Moorwahyuni dengan Frans Kaisiepo yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pertemuan itu telah membuka kesempatan untuk meluaskan gerak usaha yang telah digeluti Maria Magdalena Moorwahyuni ke daerah yang baru saja kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sedang pada masa sebelumnya Maria Magdalena Moorwahyuni selepas SMA 1961 dan kemudian menambah pengetahuan lewat kursus telah bergerak aktif dalam berbagai bidang usaha di kota Semarang. Salah satu usaha, selain dari usaha-usaha yang telah dilakukannya adalah bergerak dalam bidang perdagangan minuman keras.

Demikianlah sebagai wanita pengusaha yang telah berhasil selalu bergerak dengan cepat dan dengan perhitungan yang tepat, Maria melihat bahwa salah satu kegemaran rakyat Irian Barat, dan ini

merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda yang belum dapat dihilangkan adalah minum-minuman keras. Melihat kesempatan baik itu, maka Meira Magdalena Moorwahyuni berusaha menembus pasaran dengan cara memperoleh izin untuk diperoleh adalah berkat perkenalan dengan Frans Kaisiepo. Sehingga jalan yang ditempuh berjalan mulus, dan akhirnya izin dan fasilitas ia dapat dari Gubernur kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk memasukkkan minuman keras.⁶⁾

Dalam kaitan ini, kelihatan Maria Magdalena Moorwahyuni sangat padat kegiatannya dan ia semakin sering mondar-manir antara Semarang dan Jayapura. Sehingga karenanya ia semakin sering pula bertemu dengan Frans Kaisiepo.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut rupanya telah terjadi suatu kontak batin antara kedua insan dan ini terus berproses sehingga menjadi benih, yang dinamakan cinta. Dan kemudian dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun kedua insan telah berseteguh akan membawa kemahligai pelaminan. Mereka tidak mempersoalkan suku atau ras, karena mereka bangsa Indonesia juga tidak membicarakan tentang perbedaan umut, sedang yang ada dalam diri mereka masing-masing adalah kesepakatan, untuk memadu "cinta", saling mencintai, yang akan diwujudkan dengan perkawinan.

Namun disebalik itu rupanya kesepakatan mereka itu ibarat duri dalam daging orang tua dan saudara-saudara Maria Magdalena Moorwahyuni. Sebab bagi orang tuanya dalam hal jodoh masih berpegang teguh pada tradisi suku Jawa yang telah melembaga. Mereka menghendaki supaya putri mereka yang masih berdarah ningrat itu dalam memilih jodoh hendaknya yang sepadan. Oleh sebab itu ketika telah terjalin erat, maka dengan spontan timbul reaksi, mereka tidak mau menerima Frans Kaisiepo masuk ke dalam anggota keluarga. Begitu juga sikap kedua adiknya Nicolas Moorwibowo dan Edy Hartanto sangat tidak menerima kehadiran Frans Kaisiepo di dalam keluarga.

Kehendak orang tua tersebut agaknya memang wajar, sebab Maria Magdalena Moorwahyuni masih memiliki garis keturunan dari

6) Wawancara dengan Nyonya Maria Magdalena Moorwahyuni Frans Kaisiepo, tanggal 17 April 1995 di Jalan Setasuin Batutulis Bogor.

keluarga Condronegoro. Conronegoro adalah Kakek Buyut Maria Magdalena Moorwahyuni dan keluarga ini sesungguhnya mempunyai pertalian darah dengan raja-raja Demak. Kakeknya ini adalah menjabat Regen atau Bupati di Kudus, ia sangat dihormati dan disegani sesuai tradisi dan adat istiadat yang masih tetap bertahan kuat. Begitu pula ayahnya adalah orang terpelajar dan sosok yang dihormati, sebab ia sebagai seorang Jaksa di kota Semarang.⁷⁾

Reaksi yang terjadi dari orang tua dan saudara Maria Magdalena Moorwahyuni tidaklah menggoyahkan rasa cintanya dan tidak ada kaitan untuk merubah kesepakatan mereka dalam upaya membangun rumah tangga. Memang ia dapat menyadari bahwa sikap orang tuanya sangatlah beralasan. Namun demikian keteguhan hati dan percaya diri merupakan prinsip dan modal dasar Maria Magdalena Moorwahyuni untuk terus melangkah. Ia berkeyakinan bahwa masalah jodoh sudah diatur oleh yang Maha Kuasa. Karena masa-masa sebelumnya ia telah pernah dan besekukuh dengan mengenal seorang pemuda yang tinggal di Bandung, akan tetapi tanpa prahara sirna begitu saja, sehingga tinggal dalam kenangan yang indah saja.

Demikianlah akhirnya pada tanggal 12 Nopember 1973 mereka melangsungkan pernikahan di Jakarta. Rasa haru, sedih dan bahagia terasa bersatu dalam diri Meria Magdalena Morwahyuni ketika itu. Rasa sedih sebab pada saat pesta pernikahannya tidak dihadiri oleh keluarganya dan rasa haru dan bahagia karena ia telah menemukan teman dalam mengarungi hidup. Dari perkawinan ini mereka telah dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Anthonius Viktor Kaisiepo. Kemudian untuk menghidupkan suasana mereka mengambil anak angkat seorang anak perempuan yang bernama Anastasia Kaisiepo. Sehingga anak mereka adalah Antonius Viktor Kaisiepo dan Anastasia Kaisiepo.⁸⁾

Di awal geraknya, bagi Maria Magdalena Moorwahyuni ada rasa sedikit kurang pas dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang baru di bina bersama Frans Kaisiepo. Hal ini karena adanya rintangan-rintangan kecil dan ini disadarinya bahwa penyebab utama adalah perbedaan adat dan tradisi antara mereka masing-masing. Frans

7) *Ibid.*

8) *Ibid.*

Kaisiepo yang bertindak sebagai suami masih erat menutup diri, sedang Maria Magdalena Moorwahyuni yang kedudukannya sebagai istri belum dapat menembus isolasi akan kebiasaan-kebiasaan suami.

Namun demikian rintangan-rintangan itu dapat tertutupi karena diimbangi dengan sifat kebapaan Frans Kaisiepo yang ditunjukkannya dalam banyak hal yaitu ia suka mengalah. Hal demikian itu adalah demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Begitu juga Maria Magdalena Moorwahyuni sang istri terus berusaha berjalan dengan baik pada garis yang sebenarnya. Demikianlah dengan adanya saling pengertian di antara mereka berdua bahtera rumah tangganya dapat berjalan serasi dan seimbang.

Perlu diingatkan bahwa dengan terikatnya tali perkawinan Frans Kaisiepo dan Maria Magdalena Moorwahyuni berarti telah meletakkan kedudukan Maria Magdalena Moorwahyuni sebagai Nyonya Frans Kaisiepo. Dengan demikian statusnya juga telah menjadi Ibu Pejabat dan kedudukannya pun sebagai wanita pertama di daerah Irian Jaya khususnya.

Dan sebagai istri pejabat bukan saja mengurus dan mengatur isi rumah tangga saja, tetapi melainkan juga harus aktif dalam berbagai kegiatan ibu-ibu dan selalu tampil di forum resmi, baik untuk mendampingi suami sebagai pejabat, maupun dalam pertemuan ibu-ibu atau kaum wanita. Semua itu telah dijalankannya dengan sempurna.

Meskipun Maria Magdalena Moorwahyuni masih berusia muda bila dibandingkan dengan Frans Kaisiepo, tetapi dari perhatian dan kemauan untuk memperkaya wawasan ia dapat mengimbangi jejak langkah suami. Ia semakin mahir untuk menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi dimanapun ia berada.

Begitulah pemahamannya tentang ragam budaya Irian Jaya, bukan saja diperoleh dari suami, tetapi juga ia cari dari masyarakat dalam pergaulan yang dekat dengannya. Dari sanalah ia belajar dan mengenal lingkungan dan budayanya. Dengan demikian ia dapat menyelam lebih untuk mengenal sifat dan sikap Frans Kaisiepo sebagai putra Irian Jaya.

Salah satu kebiasaan suaminya dan ini merupakan kebiasaan kaum pria masyarakat Irian adalah minum-minuman. Dan ini dilakukan mereka sampai hilang kesadarannya. Begitu juga kebiasaan Frans Kaisiepo, kebolehnya untuk minum bukan lagi diukur dengan jumlah botol yang bisa dihabiskan tetapi kehebatannya minum diukur dengan jumlah peti minuman yang dihabiskan. Dan kenolehan Frans Kaisiepo meneguk minuman bisa menghabiskan satu peti dalam satu hari. Kebiasaan-kebiasaan ini telah menjadi perhatian serius dari istrinya. Maria Magdalena Moorwahyuni tidak rela melihat tingkah sang suami karenanya ia berusaha untuk menghentikannya. Dan untuk menyetop kebiasaan itu suatu ketika Maria bertindak dengan nada marah mengancam Frans Kaisiepo, "pilih minum atau saya, kalau pilih minuman saya akan pulang, kalau pilih saya tinggalkan minuman". Dan semenjak ancaman tersebut kebiasaan minum mulai diatur dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya Frans Kaisiepo dapat berhenti sama sekali dari ketagihan minum keras.

6.3 Masa-masa Akhir Frans Kaisiepo

Dengan berakhirnya masa jabatan Frans Kaisiepo sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam masa jabatan yang kedua kalinya, selanjutnya ia ditarik ke dalam aktivitas lingkungan Departemen Dalam Negeri. Berhubung karena tenaga serta pikiran masih diperlukan, Frans Kaisiepo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).⁹⁾ Pada masa-masa ini ia dapat membuktikan kemampuannya dengan baik untuk turut berperan aktif.

Sehubungan dengan kegiatannya sudah lebih banyak di Jakarta, maka Frans Kaisiepo memboyong keluarga pindah dan menetap di Jakarta. Untuk itu ia memilih bertempat tinggal di Jalan Belanak IV/32 Rawamangun Jakarta Timur. Di tempat inilah Frans Kaisiepo bersama anak istri menata kembali kehidupan rumah tangga yang damai dan sejahtera.

Merasa akan adanya kekerasan hidup di Jakarta ia sadar bahwa ia tidak memiliki apapun. Sedang anak dari perkawinan dengan Maria Magdalena Moorwahyuni ini masih memerlukan dana untuk membimbing dan mendidiknya. Bertolak dari itu ia berusaha untuk

9) *Riwayat Hidup dan Perjuangan Frans Kaisiepo*, Jakarta 3 Agustus 1993

merintis dengan membuat surat permohonan kepada Departemen Dalam Negeri untuk dapat memiliki sebidang tanah yang luasnya sekitar 7.000 meter persegi beserta rumahnya yang terletak dibilangan daerah Batu Tulis Bogor. Dan status tanah tersebut sebagai tanah milik departemen Dalam Negeri. Karena selama ini status tanah tersebut diberikan hanyalah sebagai hak pakai yang diberikan kepada pejabat atau pegawai yang masih aktif. Dan apabila sudah purnabhakti ataupun pegawai yang masih aktif. Dan apabila sudah purnabhakti ataupun sudah meninggal maka tanah tersebut kembali kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Dalam Negeri. Begitulah disela-sela kesibukannya, Frans Kaisiepo telah menyempatkan diri dan secara diam mengurusnya sampai berhasil, sedang istrinya tidak mengetahuinya bahwa tanah tersebut telah menjadi miliknya.

Menginsafi akan keadaan dirinya yang sering sakit-sakitan, phisik dan tenaga semakin berkurang. Sehingga macam-macam tuduhan yang dilontarkan, sementara ada yang mengatakan dia di guna-gunai dan ada yang mengatakan diracun. Akan tetapi secara medis dan berdasarkan diagnose dokter, bahwa ia mengidap penyakit maag dan jantung. Hal ini agaknya dapat dimaklumi karena sebagai pejabat dan orang kerja yang terus melanglangbuana pada masa kerjanya di seluruh pelosok terpencil Irian Jaya tentu telah menyebabkan istirahat dan makannya kurang teratur.

Namun demikian kadar kearifan masih tajam, meskipun semakin tampak perubahan pikirnya. Bahkan sulit dipercaya bagi orang biasa, karena ia memiliki indra keenam yang tajam dan ini telah menjadi miliknya sejak lama.

Demikianlah kejadiannya. tiga bulan sebelum meninggalnya., di tengah malam buta Frans Kaisiepo bangun mencari sebuah map yang disimpan berisi surat-surat untuk pengurusan tanah dan kemudian membangunkan Maria Magdalena Moorwahyuni, istrinya tercinta. Kemudian menyerahkan map tersebut kepada istrinya untuk disimpan dan sayah menjadi miliknya. Bersamaan dengan itu ia berpesan, bahwa ia akan pergi jauh. Tetapi meskipun demikian, " Jangan khawatir, karena aku mendapat pensiun dan dapat dipergunakan untuk membiayai hidupmu dan anak".¹⁰⁾

10) Wawancara dengan Nyonya Maria Magdalena Moorwahyuni Frans Kaisiepo, tanggal 17 April 1995 di Jalan Setasiun Batutulis Bogor.

Menyusul akan tingkahnya yang dianggap aneh itu, beberapa waktu kemudian Frans Kaisiepo menulis surat yang ditujukan kepada saudaranya Williem Kaisiepo di Biak. Isi surat itu meminta kepada adiknya tersebut supaya rumahnya yang di Biak agar dibersihkan sebab beberapa bulan lagi atau medio April ia akan datang dengan tamu yang banyak.

Demikian rupanya ketentuan Pencipta setiap mahluk yang bernyawa akan merasakan mati, tidak ada terkecuali. Dan begitu juga halnya bagi Frans Kaisiepo sebagai manusia, telah diciptakan Tuhan kemudian menjalankan tugas hidupnya, dan pada 10 April 1979 dalam usia 58 tahun ia dipanggil Sang Pencipta dari rumah kediamannya di bilangan Rawangun Jakarta Timur. Ia meninggal karena serangan Jantung.

Meninggalnya Frans Kaisiepo sedikit timbul perselisihan pendapat dalam keluarga yaitu tentang tempat pemakaman. Dari pihak pertama yaitu anak dari istri yang sudah almarhumah menginginkan supaya Frans Kaisiepo dimakamkan di samping makam Ibunya dengan alasan yang logis, karena kelak apabila akan ziarah akan dapat sekaligus melihat makam ayah dan ibu. Sementara dari pihak lain, Maria Magdalena Moorwahyuni istri setia yang menemani sampai akhir hayatnya menginginkan sesuai dengan pesan Frans Kaisiepo agar ia dimakamkan di Biak, sedangkan dari pihak Pemerintah sesuai dengan jalurnya supaya Frans Kaisiepo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cenrawasih Biak. Akan tetapi kesemua dibatalkan oleh permintaan Frans Kaisiepo lewat istrinya, maka akhirnya ia diterbangkan dari Jakarta ke Biak dan dimakamkan di depan Taman Makam Pahlawan Cenrawasih di Biak.

Pada saat jenazah tiba dan disemayamkan di rumah Frans Kaisiepo di Biak timbullah sedikit kesalah fahaman antara Nyonya Maria Magdalena Moorwahyuni Frans Kaisiepo dengan Williem Kaisiepo, Adik iparnya, sehingga sedikit mempengaruhi suasana, karena di dalam suasana yang sedang berduka itu williem Kaisiepo, adik Frans Kaisiepo dengan tidak berlasan kuat telah menuduh bahwa meninggalnya Frans Kaisiepo adalah karena diracuni oleh kakak iparnya, Maria Magdalena Moorwahyuni. Tindakan Williem bagaikan

orang kalap, ia tidak dapat mengendalikan diri dan mengamuk membawa parang ditangan akan membunuh kakak iparnya. Karena itu Nyonya Maria Magdalena Moorwahyuni dilindungi disembunyikan oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena Bupati sendiri tidak dapat mengendalikan Willem Kaisiepo.¹¹⁾

Akan tetapi Nyonya Frans Kaisiepo yang merasa dirinya dipojokkan tidak merasa gentar menghadapi hal itu, ia dengan kepala dingin menunjukkan wibawa keibuannya dan memberikan penjelasan yang akhirnya meruntuhkan keberingasan Willem Kaisiepo di depan khalayak ramai. Sehingga Willem Kaisiepo sadar bahwa bukan ia saja yang kehilangan Frans Kaisiepo aka tetapi semua telah merasa kehilangan atas meninggalnya saudaranya yang tercinta, Frans Kaisiepo.

Demikianlah gambaran hidup suka duka dalam mengarungi kebersamaan hidup yang ditempuh oleh Frans Kaisiepo dan Maria Magdalena Moorwahyuni terasa berlangsung singkat, hanya lebih kurang tujuh tahun lamanya. Kepergian Frans Kaisiepo bukan berarti memutuskan hubungan mereka, atau jelasnya tidaklah putus hubungan Maria dengan tanah Irian, daerah Biak khususnya. Hal ini karena Anthonius Viktor Kaisiepo adalah jembatan penghubung antara Jawa dan Irian Barat.

11) *Ibid.*

BAB VII

P E N U T U P

Perjalanan hidup Frans Kaisiepo sebagai anak manusia sudahlah berakhir, karena ia telah dipanggil kembali oleh Sang PenciptaNya pada tanggal 10 April 1979 di rumahnya Jalan Belanak IV No, 32 Rawamangun, Jakarta Timur dalam usia 58 tahun. Jenazah Almarhum Frans Kaisiepo kemudian dimakamkan di tanah tempat kelahiran di Biak Irian Jaya. Namun demikian, namanya akan tetap dikenang dan hidup sepanjang sejarah bangsa dan ini sebagai kebanggaan nasional. Hai ini karena nama tersebut telah tertera dalam lembaran sejarah bangsa. Apalagi ia telah memperoleh penghargaan dan dikukuhkan oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia sehingga menjadi salah satu dari sedikit putra terbaik bangsa dengan sebutan "Pahlawan Nasional".

Penghargaan yang diperoleh Frans Kaisiepo adalah pantas dan tepat, sebab sebagian masa hidup telah dicurahkan baik tenaga, maupun fikiran telah disumbangkannya sebagai amal bakti terhadap kepentingan Nusa dan Bangsa. Sehingga generasi penerusnya dapat menikmati hidup dan kehidupan di alam yang merdeka sebagai hasil dari jerih payah itu.

Frans Kaisiepo seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ia adalah salah seorang putra bangsa yang terbaik yang berasal dari bumi Irian Barat (sekarang Irian Jaya), wilayah Indonesia yang paling timur, bumi Biak khususnya. Ia lahir dan dibesarkan oleh alam lingkungan yang ganas serta ditempa oleh masyarakat yang memiliki

corak budaya yang keras pula. Sejalan dengan itu maka sejak masa kanak-kanak Frans Kaisiepo telah dituntut oleh suatu keberanian di dalam mengarungi hidup. Dan dengan seleksi alam yang ketat ia terus tumbuh bukan saja menjadi manusia kuat, ibarat kokohnya pulau karang diterjang ombak samudra, tetapi telah membawa cahaya terang untuk bangsanya, bagaikan mercusuar tegak berdiri di pulau terpencil memberi peringatan kepada setiap yang lewat.

Meskipun ia hidup di lingkungan masyarakat yang sarat dengan tradisi, akan tetapi ia tidak terperosok kedalam kehidupan yang berbaur dengan masa kepurbakalaan. Hal ini dapat terlihat, karena Frans Kaisiepo dilahirkan dari keluarga yang telah tersentuh dengan kemajuan zaman. Frans Kaisiepo tepat waktunya telah dapat mengikuti lembaga pendidikan resmi. Kemudian dapat meneruskan pada sekolah Guru dan Sekolah Pamong Praja dan berhasil memperoleh ijazah.

Dalam meniti karier dimulainya dari Guru, suatu pekerjaan yang mulia karena pekerjaan ini membawakan misi kemanusiaan terutama untuk mencerdaskan bangsa. Akan tetapi kemudian kehadiran Jepang telah memutuskan aktivitasnya dengan pekerjaan tersebut, karena ia ditangkap dan kemudian ditunjuk oleh pemerintah Jepang menjadi mandor onderneming di Ransiki Manokwari.

Ketika Indonesia sudah merdeka, sedangkan Irian Barat masih dalam cengkeraman pihak Belanda, Frans Kaisiepo pindah dengan memulai karier dalam bidang pemerintahan. Dari prestasi-prastai yang dicapainya, ia terus berjalan meniti karier di dalam bidang pemerintah ini. Puncak karier Frans Kaisiepo diperolehnya adalah setelah Irian Barat kembali kedalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ia adalah salah seorang putra Irian Barat yang mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi Gubernur, Kepala Wilayah Tingkat I Propinsi Irian Barat periode tahun 1964-1973.

Perkenalan Frans Kaisiepo dengan tokoh-tokoh Digulis telah menularkan faham kebangsaan yang kental di dalam dirinya dan ini telah menjadi alat keyakinan politiknya untuk mengusir imperialis Belanda dari bumi Indonesia, Irian Barat khususnya.

Dengan bahasa politiknya yang fasih, ia bersama kawan-kawan seperjuangan secara diam-diam terus merapatkan barisan untuk

menggalang persatuan dan kesatuan. Untuk melancarkan maksud tersebut secara rahasia ia melakukan kontak dengan tokoh eks- Digul, yang juga sebagai "Gurunya", guna untuk memperoleh masukan berupa baik fikiran maupun gagasan-gagasannya untuk menggoncangkan stabilitas Pemerintah Kolonial Belanda di Irian Barat khususnya.

Kiranya patut dicata, bahwa Frans Kaisiepo adalah orang pertama yang mencetuskan dan mengumunkan nama "Papua" menjadi Irian. Dan karena ulahnya yang berpihak terhadap paham kebangsaan sebagai wujud dari persatuan dan kesatuan telah memaksa Pemerintah Kolonial Belanda tidak menyukainya.

Demikianlah lakon yang telah diperankan oleh Frans Kaisiepo dalam upaya membangun keutuhan wilayah dan membina keutuhan bangsa seperti yang dipesankan oleh lembaga negara kita "Bhineka Tunggal Ika". Melihat akan sikap, tingak serta perilaku yang telah ditunjukkan Frans Kaisiepo, kiranya banyak tersimpan nilai-nilai yang pantas dan bahkan musti untuk dilestarikan guna menambah khasanah kekayaan sejarah bangsa. Selanjutnya sangatlah bermanfaat bila ini dapat dipetik oleh kaum muda yang berperan sebagai pewaris dan penerus kehidupan bangsa dan negara. Karena dalam era globalisasi yang kita hadapi dewasa ini, bukan tidak mungkin, kalau kita lengah, generasi muda akan melupakan budaya bangsanya dalam mengisi nuansa-nuansa pembangunan.

Kemudian diharapkan, karena kegiatan penulisan Biografi Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo merupakan studi awal yang menuntut kelanjutan kesempurnaan. Sehubungan dengan itu, maka usaha untuk ini hendaknya dapat menaruh minat untuk melakukan kajian ulang agar dapat mencapai titik kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. August Kafiari, Drs. M.A., *Arsitektur Tradisional Daerah Irian Jaya*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Ditjarahnitra, Ditjen Kebudayaan, Jakarta, 1986.
2. Bondan Soedharto. dkk, Drs. *Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di Irian Jaya*, DHD 45 Propinsi Irian Jaya, Jayapura, 1991.
3. -----, *Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya*, Kerjasama Universitas Cenderawaih dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya, Jayapura, 1989.
4. -----, *Genderang Proklamasi di Luar Negeri*, Jakarta. 1977.
5. Departemen Sosial. RIwayat Singkat Pejuang Frans Kaisiepo, Direktorat Urusan Kepahlawanan Dan Perintis Kemerdekaan, Jakart 1993.
6. Makkateru Syamsuddin, *Asal Mula Nama Irian*, PT. Kinta Utama Murni, Jakarta, 1975.
7. Soegiarto N. Drs. dkk, *Monografi Daerah Irian Jaya*, Proyek Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

B. WAWANCARA

1. *Wawancara* tanggal 13 Januari dan 17 April 1995 dengan Maria Magdalena Moorwahyuni Kaisiepo di Jalan Setasiun Batutulis, Bogor.
2. *Wawancara* tanggal 19 Februari 1986 dengan Bapak Ds. David Prawar di Mess Cendrawasih, Jalan K.H. Mas Mansyur No. 63 Jakarta Pusat.

Lampiran

NASKAH

**P E R S E T U D J U A N
INDONESIA - NEDERLAND**

**MENGENAI
PENJERAHAN IRIAN BARAT**

**KEPADA
REPUBLIK INDONESIA**

**DITANDATANGANI DI MARKAS BESAR PBB NEW YORK
TANGGAL 15 AGUSTUS 1962**

15 August 1962.

**AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
CONCERNING
WEST NEW GUINEA (WEST IRIAN)**

The Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands,

Having in mind the interests and welfare of the people of the
territory of **West New Guinea** (West Irian) hereinafter referred to
as "the territory,"

Desirous of settling their dispute regarding the territory. Now, therefore,
agree as follows:

**Ratification of Agreement and Resolution of
the General Assembly of the United Nations**

Article I

After the present Agreement between Indonesia and the Netherlands has been signed and ratified by both Contracting Parties, Indonesia and the Netherlands Will jointly sponsor a draft resolution in the United Nations under the terms of which the General Assembly of the United Nations takes note of the present Agreement; acknowledges the role conferred upon the Secretary General of the United Nations therein, and authorizes him to carry out the takes entrusted to him therein.

Transfer of Administration

Article II

After the adoption of the resolution referred to in Article I, the Netherlands will transfer administration of the territory to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) established by and under the jurisdiction of the Secretary-General upon the arrival of the United Nations Administrator -appointed in accordance with Article IV. The UNTEA will in turn transfer the administration to Indonesia in accordance with Article XII.

United Nations Administration

Article III

In order to facilitate the transfer of administration to the UNTEA after the adoption of the resolution by the General Assembly, the Netherlands will invite the Secretary-General to send a representative to consult briefly with the Netherlands Government of the territory prior to the latter's departure. The Netherlands Governor will depart prior to the arrival of the United Nations Administrator.

Article IV

A United Nations Administrator, acceptable to Indonesia and the Netherlands, will be appointed by the Secretary-General.

Article V

The United Nations Administrator, as chief executive officer of the UNTEA, will have full authority under the direction of the Secretary-General to administer the territory for the period of the UNTEA administration in accordance with the terms of the present Agreement.

Article VI

1. The United Nations flag will be flown during the period of United Nations administration.
2. With regard to the flying of the Indonesian and Netherlands flags, it is agreed that this matter will be determined by agreement between the Secretary-General and the respective governments.

Article VII

The Secretary-General will provide the UNTEA with such security forces as the United Nations Administrator deems necessary; such forces will primarily supplement existing Papuan (West Irianese) police in the task of maintaining law and order. The Papuan Volunteer Corps, which on the arrival of the United Nations Administrator will cease being part of the Netherlands armed forces, and the Indonesian armed forces in the territory will be under the authority of, and at the disposal of, the Secretary-General for the same purpose. The United Nations Administrator will, to the extent feasible, use the Papuan (West Irianese) police as a United Nations security force to maintain law and order and, at his discretion, use Indonesian armed forces. The Netherlands armed forces will be repatriated as rapidly as possible and at his still in the territory will be under the authority of the UNTEA.

Article VIII

The United Nations Administrator will send periodic reports to the Secretary-General on the principal aspects of the implementation of the present Agreement. The Secretary-General will submit full reports to Indonesia and the Netherlands and may, submit, at his discretion, reports to the General Assembly or to all United Nations members.

First Phase of the UNTEA Administration

Article IX

The United Nations Administrator replace as rapidly, as possible top Netherlands officials as defined in Annex A with non-Netherlands, non Indonesian officials during the first phase of the UNTEA administration which will be completed on 1 May 1961. The United Nations Administrator will be authorized to employ on a temporary basis all Netherlands officials other than top Netherlands officials defined in Annex A. who wish to serve the UNTEA, in accordance with such terms and conditions as the Secretary-General May specify. As many Papuans (West Irianese) as possible will be brought into administrative and technical, positions. To fill the remaining required posts, the UNTEA will have authority to employ personnel provided by Indonesia Salary rates prevailing in the territory will be maintained.

Article X

Immediately, after the transfer Of administration to the UNTEA, the UNTEA will widely, publicize and explain the terms of the present Agreement, and will inform the population concerning the transfer of administration to Indonesia and the provisions, for the net of self-determination as set out in the present Agreement.

Article XI

To the extent that they, are consistent with the letter and spirit of the present Agreement, existing laws and regulations will remain in effect. The UNTEA will have the power to promugate new laws and regulations or amend them within the spirit, and framework of the present Agreement. The representative councils will be consulted prior to the issuance of new laws and regulations or the amendment of existing laws.

Second Phase

Article XII

The United Nations Administrator will have discretion to transfer all or part of the administration to Indonesia at any time after the first phase of the UNTEA administration. The UNTEA's authority will cease at the moment of transfer of full administrative control to Indonesia.

Article XIII

United Nations security forces will be replaced by Indonesian security forces after the first phase of the UNTEA administration. All United Nations security forces will be withdrawn upon the transfer of administration to Indonesia.

Indonesian Administration and Self-Determination

Article XIII

After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, Indonesian national laws and regulations will in principle be applicable in the territory it being understood that they be consistent, with the rights and freedoms guaranteed to the inhabitants under the terms of the present Agreement. New laws and regulations or amendments to the existing ones can be enacted within the spirit of the present Agreement. The representative councils will be consulted as appropriate.

Article XV

After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, the primary task of Indonesia will be further intensification of the education of the people, of the combating of illiteracy, and of the advancement of their Social, cultural and economic development. Efforts also will be made in accordance with present Indonesian practice to accelerate the participation of the people in local government through periodic elections. Any aspects relating to the act of free choice will be governed by the terms of this Agreement.

Article XVI

At the time of the transfer of full administrative responsibility to Indonesia a number of United Nations experts, as deemed adequate by, the Secretary-General after consultation with Indonesia, will be designated to remain wherever their duties require their presence. Their duties will, prior to the arrival of the United Nations Representative, who will

participate at the appropriate time in the arrangements for self-determination, be limited to advising on and assisting in preparations for carrying out the provisions for self-determination except in so far as Indonesia and the Secretary-General may agree upon their performing other expert functions. They will be responsible to the Secretary-General for the carrying out of their duties.

Article XVII

Indonesia will invite the Secretary-General to appoint Representative who, together with a staff made up, *inter-alia* of experts referred to in Article XVII, will carry out the Secretary-General's responsibilities to advise, assist and participate in arrangements which are the responsibility of Indonesia for the act of free choice. The Secretary-General will, at the proper time, appoint the United Nations Representative in order that he and his staff may assume their duties in the territory one year prior to the date of self-determination. Such additional staff as the United Nations Representative might feel necessary will be determined by the Secretary-General after consultations with Indonesia. The United Nations Representative and his staff will have the same freedom of movement as provided for the personnel referred to in Article XVI.

Article XVIII

Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nations Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include :

- a. Consultations (Musjawarah) with The representative councils on Procedures and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population.
- b. The determination of the actual date of the exercise of free choice within the period established by the present Agreement.
- c. Formulation of the questions in such a way as to permit the inhabitant to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia : of (b) whether they wish to sever their ties with Indonesia.
- d. The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are residents at the time of the signing of the present Agreement and at the time of

the act of selfdetermination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration.

Article XIX

The United Nations Representative will report to the Secretary-General on the arrangements arrived at for freedom of choice.

Article XX

The act of Self-determination will be completed before the end of 1969.

Article XXI

1. After the exercise of the right of self-determination, Indonesia and the United Nations Representative will submit final report to the Secretary-General who Will report to the General Assembly, on the conduct of the act of self-determination and the results thereof.

2. The parties to the present Agreement will recognize and abide by the results of the act of self-determination.

Rights of the Inhabitants

Article XXII

1. The UNTEA and Indonesia will guarantee fully the rights, including the rights of free speech, freedom of movement and of assembly of the inhabitants of the area. These rights will include the existing rights of the inhabitants of the territory at the time of the transfer of administration to the UNTEA.

2. The UNITEA will take over existing Netherlands commitments in respect of concessions and property rights.

3. After Indonesia has taken over the administration it will honor those commitments wich are not inconsistent with the interests and economic development of the people of the territory. A joint Indonesian-Netheland.. commission will be set up after the transfer of administration to Indonesia to study the nature of the above-mentioned concessions and property rights.

4. During the period of the UNTEA administration there will be freedom of movement for civilians of Indonesian and Netherlands nationalities to and from the territory.

Article XXIII

Vacancies in the representative councils caused by the departure of Netherlands nationals, or for other reasons, will be filled as appropriate consistent with existing legislation by elections, or by appointment by the UNTEA. The representative councils will be consulted prior to the appointment of new representatives.

Financial matters

Article XXIV

1. Deficits in the budget of the territory during the UNTEA administration will be shared equally by Indonesia and the Netherlands.

2. Indonesia and the Netherlands will be consulted by the Secretary-General in the preparation of the UNTEA budget and other financial matters

ANNEX A TO THE AGREEMENT

Top Netherlands officials to be replaced as rapidly as possible with non-Netherlands, non-Indonesian officials.

I	Government	
	Head Government Information Bureau	1
	Head Popular Information Service	1
II.	Department of Internal Affairs:	
	Director	1
	Divisional Commissioners ("Resideiln")	6
	1. Hollandia	
	2. Biak	
	3. Manokwari	
	4. Fakfak	
	5. Marauke	
	6. Central Highlands.	
	Administrative Head of the General Police	1
III.	Department of Finance:	
	Director	1
IV.	Department of Social Affairs and Justice:	
	Director	1
V.	Department of Public Health:	
	Director	1
VI.	Department of Cultural Affairs (including Education):	
	Director	1
	Head Broadcasting System	1
VII.	Department of Economic Affairs:	
	Director	1
VIII.	Department of Transport and Poiner	
	Director	1
IX.	Department of Public Works :	
	Director	1
Total :		18

**LETTER FROM THE TWO PARTIES TO THE ACTING SECRETARY-
GENERAL OF THE UN RELATING TO THE MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING REGARDING THE CASSATION OF
HOSTILITIES**

15 August 1962.

Sir,

On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), we have the honour to bring to your attention the Memorandum of Understanding arrived at between our Governments concerning the cessation of hostilities in West New Guinea (West Irian), the signed original of which is contained in Annex A to this note.

In bringing the annexed Memorandum of Understanding to your attention we have the honour to request, on behalf of our respective Governments, that you indicate your willingness to undertake as an extraordinary measure the functions conferred upon the Secretary-General in it in order to give the earliest possible effect to the cessation of hostilities, reserving your right to report to the General Assembly of the United Nations at the appropriate time. Our respective Governments have in mind, in making this request, the urgent necessity for your assistance and that of United Nations personnel in implementing the agreement on cessation of hostilities.

The Memorandum of Understanding sets out the agreement arrived at between our respective Governments that our Governments will, on an equal basis, meet all costs incurred by you in carrying out your responsibilities under the Memorandum. To this end, our Governments have agreed to make available in advance such sums as you may deem necessary.

(Signed) **Subandrio**

Representative of Indonesia

(Signed) **J. Heriman van Roijen**

Representative of the Netherlands

(signed) **C.W.A. Schurmann**

Representative of the Netherlands

To

The Acting Secretary-General
United Nations

**ANNEX A TO LETTER TO THANT
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON CASSATION OF
HOSTILITIES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOMM
OF THE NETHERLANDS**

1. Cessation, of hostilities in West New Guinea (West Irian), hereinafter referred to as "the terrifory", is to take place at 0001 1GMT on Saturday 18 August 1962.
As from that moment the following rules will be observed .
 - (a) Cease fire by both parties.
 - (b) Indonesia and the Netherlands will not reinforce their military force in the territory nor resupply them with military materiel.
 - (c) The Secretary-General of the United Nations will assign United Nations personnel (i)'to observe the implementation of this agreement and (ii) in particular to take necessary steps for the prevention of any acts endangering the security of forces of both parties to this agreement.
 - (d) Any, incidents that might occur will be immediately reported by the party concerned to the United Nations personnel in order that they may, take the necessary, measures to restore the situation in consultation with both parties.
2. The cessation of hostilities will be communicated to the Netherlands and Indonesian armed forces by the following means
 - (a) Messages transmitted through Indonesian and Netherlands radiostations and via other means of communication.
 - (b) The dropping of leaflets in the areas concerned in accordance with the provisions of paragraph 3 hereof.
3. In order to overcome special difficulties in communicating the cease fire to Indonesian force in the territory pre-arranged flight will be carried Out bly Indonesian air-crift, with the purpose of dropping leaflets on which a text, approved by the Secretary-General will be printed. The Indonesian .authorities agree to enable the distribution of this pamphlet to isolated posts as soon as possible and not later than a fortnight from the cessation of hostilities. On these flights United Nitions personnel

will be on board to report, in advance and after the flight, on the time and the route of the flight and the areas of dropping leaflets.

4. To facilitate resupply of Indonesian troops in the territory and in order that they may be under the authority of and at the disposal of the Secretary-General at the appropriate time. Indonesia will make the necessary arrangements with regard to their location in selected areas, in agreement with the Secretary-General. The Secretary-General will act in consultation herein with the Netherlands Administrative Authorities.
5. The resupply of nonmilitary materiel to the Indonesian armed forces in the territory will be effected by the United Nations personnel in cooperation with Indonesian and Netherlands authorities. United Nations Personnel may use one or two unarmed Indonesian vessel, for transport to one or more ports agreeable to the Netherlands authorities. Air supply will be carried out under the direction of the United Nations personnel in United Nations aircraft.
6. With a view to carrying out the arrangements mentioned under paragraphs 3, 4, and 5 here of, a United Nations liaison and an Indonesian liaison each consisting of three officers, will be established at a Netherlands forces headquarters in the territory. Military Liaison Officers will be included in the Permanent Missions to the United Nations of the Netherlands and Indonesia for liaison with the Secretary-General's Office.
7. As soon as possible after the adoption by the General Assembly of the United Nations of the resolution referred to in Article I of the Agreement between The Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), and not later than 1 October 1962, a United Nations security force including an infantry battalion with ancillary arms and services will be placed by the Secretary-General at the disposal of the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in the territory to primarily supplement the existing Papuan (West Irian etc) Police in the task of maintaining law and order.
8. The Netherlands will make arrangements through the intermediary of the Secretary-General to repatriate Indonesian prisoners as soon as possible after the signing of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian).

9. Indonesia and the Netherlands will jointly, request the Secretary-General to undertake the functions conferred on him in this agreement.
10. Indonesia and the Netherlands will share on an equal basis all costs incurred by the Secretary-General under this agreement, and will make available in advance such sums as he deems necessary.

Done on this fifteenth day of August 1962.

(Signed) Subandrio
For the
Republic of Indonesia

(Signed) J. H. van Roijen
For the
Kingdom of the Netherlands

(Signed) C.W.A. Schurmann
For the
Kingdom of the Netherlands

ACTING SECRETARY-GENERAL'S REPLY

15 August 1962.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of the note of today's date addressed to me by the Representative of the Republic of Indonesia and the Representatives of the Kingdom of the Netherlands, concerning the cessation of hostilities in West New Guinea (West Irian), reading as follows:

"On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), we have the honour to bring to your attention the Memorandum of Understanding arrived at between our Governments concerning the cessation of hostilities in West New Guinea (West Irian), the signed original of which is contained in Annex A to this note.

"In bringing the annexed Memorandum of Understanding to your attention we have the honour to request, on behalf of our respective Governments, that you indicate your willingness to undertake as an extraordinary measure the functions conferred upon the Secretary-General in it in order to give the earliest possible effect to the cessation of hostilities and reserving your right to report to the General Assembly of the United Nations at the appropriate time. Our respective Governments have in mind, in making this request, the urgent necessity for your assistance and that of United Nations personnel in implementing the agreement, on cessation of hostilities.

"The Memorandum of Understanding sets out the agreement arrived at between our respective Governments that our Governments will, on an equal basis, meet all costs incurred by you in carrying out your responsibilities under the Memorandum. To this end, our Governments have agreed to make available in advance such sums as you may deem necessary.

In reply I have the honour to inform you that, subject to the terms and conditions of the note under reference, I am prepared to undertake the responsibilities specified in that note and its related annex.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) **U. Thant**
Acting Secretary-General

The Representative of the
Republic of Indonesia

The Representative of the
Kingdom of the Netherlands

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONSTITUTING AN
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIK OF INDONESIA
AND THE KINGDOM OF THE NETHERLAND ON CER-
TAIN FINANCIAL MATTERS DURING THE PERIO
OF ADMINISTRATION OF WEST NEW GUINEA
(WEST IRIAN) BY THE UNITED NATIONS
TEMPORARY EXECUTIVE AUTHORITY (UNTEA)**

1. With the view to preparing the budget for the period of administration, of the territory of West New Guinea (West Irian) by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in accordance with Article XXIV of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), a committee will be set up as soon as possible consisting of representatives of the Secretary-General of the United Nations, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands in order to collect the necessary information and to make appropriate recommendations to the Secretary General. The committee will make recommendations to the Secretary-General concerning the amount to be placed at the disposal of the United Nations Administrator by the Netherlands and the Indonesian Governments at the beginning of the UNTEA period.

2. In establishing the budget for the UNTEA period, the United Nations Administrator will make his calculations on the basis of a rate of exchange for the New Guinea guilder at US\$ 1.00 = N.G. fl. 3.62.

DONE this Fifteenth day of August 1962 in three original copies.

(Signed) **Subandrio**

For the
Republic of Indonesia

(Signed) **J. H. van Roijen**

For the
Kingdom of the Netherlands

(Signed) **C. W. A. Schurmann**

For the
Kingdom of the Netherlands

**LETTER FROM THE TWO PARTIES TO THE ACTING SECRETARY-
GENERAL OF THE UN, CONCERNING THE AGREEMENT RELATING
TO TRAVEL DOCUMENTS AND CONSULAR ASSISTANCE AND
PROTECTION ABROAD TO PAPUANS (WEST IRIANESE)**

15 August, 1962

Sir,

On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), we have the honour to bring to your attention the following agreement arrived at between our Governments and hereby placed on record, concerning the issue of passports and consular protection during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) provided for in the aforesaid Agreement :

"1. The UNTEA shall have the authority at its discretion to issue travel documents to Papuans (West Irianese) applying therefor without prejudice to their right to apply for Indonesian passports instead ;

"2. The Governments of Indonesia and of the Netherlands shall at the request of the Secretary-General furnish consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) carrying the travel documents mentioned in the previous paragraph, it being for the person concerned to determine to which consular authority he should apply."

Should the above be acceptable to you, we have the honour further to propose that the note and your reply, to the above effect shall be regarded as constituting and placing upon record the agreement reached in this matter.

Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.

(Signed) **Subandrio**

Representative of Indonesia

(Signed) **J. H. van Roijen**

Representative of the Netherlands

(Signed) **C. W. A. Schurmann**

Representative of the Netherlands

TO

The Acting Secretary-General
United Nations

**IDENTICAL LETTERS FROM ACTING SECRETARY-GENERAL U
THANT TO THE REPRESENTATIVE OF INDONESIA AND THE
REPRESENTATIVES OF THE NETHERLANDS**

15 August 1962

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of the note of today's date addressed to me by the representatives of the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands, concerning the issue of passports and consular protection during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea (West Irian), and reading as follows:

"On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian). A.c have the honour to bring to your attention the following agreement arrived at between our Governments and hereby placed on record concerning the issue of passports and consular protection during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority, (UNTEA) provided for in the aforesaid Agreement :

"1. The UNTEA shall have the authority, at its discretion to issue travel documents to Papuans (West Irianese) applying therefor without prejudice to their right to apply for Indonesian passports instead ;

"2. The Governments of Indonesia and of the Netherlands shall at the request of the Secretary-General furnish consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) carrying the travel documents mentioned in the previous paragraph, it being for the person concerned to determine to which consular authority he should apply."

"Should the above be acceptable to you, we have the honour further to propose that the note and your reply to the above effect shall be regarded as constituting and placing upon record the agreement reached in this matter."

In reply I have the honour to inform you that I am prepared to instruct the UNTEA, when it is established as provided for in the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), to undertake the function referred to in the note under reference. I would like to take this occasion to request your Government to undertake consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) as provided in paragraph No. 2 of the note under reference.

This note and your note under reference shall be regarded as constituting and placing on record the agreement reached in this matter.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Siencd) U Thant
Acting Secretary-General

Indonesia's Reply to Acting Secretary-General

15 August 1962.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your note of today's date indicating your Willingness to undertake certain functions concerning issue of passports during the period of the administration by the United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea (West Irian) and requesting my Government to undertake consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) requesting such assistance and protection during the period of the UNTEA Administration. I have the honour to inform you that my Government will undertake such consular assistance and protection.

Accept, Sir, assurances of my highest, consideration.

(Signed) Subandrio
Representative of Indonesia

Netherlands Reply to the Acting Secretary-General

15 August 1962

Sir,

We have the honour acknowledge the receipt of your note of to-day's date, indicating your Willingness to undertake certain functions concerning issue of passports during the period of the administration by the United Nations Temporary executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea (West Irian) and requesting our Government to undertake consular assistance and protection ibroad to Popuans (west Irianse) requesting such assistance and protection during the period of the UNTEA Administration. We have the honour to inform you that our Government will undertake such consular assistance and protection.

Accept. Sir, the assurances, of our highest consideration,

(Signed) **J.H. van Roijen**
Representative of the Netherlands

(Signed) **C. W. A. Schurmann**
Representative of the Netherlands

**EXCHANGE OF LETTERS REGARDING RESUMPTION
OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN
THE NETHERLANDS AND INDONESIA**

15 August 1962

.Sirs.

I have the honour on behalf of the Republic of Indonesia to confirm the understanding this after the signing of the Agreement the exchange of diplomatic missions will take place between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands.

Accept, Sirs. the assurances of my highest consideration.

(Signed) Subandrio

Representative of the
Republik of Indonesia.

To :

The Representatives of the
Kingdom of the Netherlands

15 August 19162

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date reading as follows:

I have the honour on behalf of the Republic of Indonesia to confirm the understanding that after the signing of the Agreement the exchange of diplomatic missions will take place between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands."

In reply we have the honour to confirm that the above is the understanding of the Kingdom of the Netherlands.

Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.

(Signed) **J. H. van Roijen**

Representative of the
Kingdom of the Netherlands.

(Signed) **C. W. A. Scburniann**

Representative of the
Kingdom of the Netherlands.

To :

The Representative of the Republic of
Indonesia.

**AIDE MEMOIRE OF ACTING SECRETARY GENERAL U THANT
TO INDONESIA REGARDING THE TRANSFER OF AUTHORITY
OF WEST IRIAN**

31 July 1962

AIDE MEMOIRE

The following is my understanding in regard to the medalities of the transfer of authority over West New Quinea (West Irian) :

1. The authority of the Government of the Netherlands over the territory will be terminated when the Special Representative of the Secretary-General takes charge. On the same day the United Nations flag will be hoisted.
2. From the same date the withdrawal and repatriation of the armed forces of the Netherlands will begin under the supervision of the Secretary-General's Special Representative and will be concluded as soon as possible (While awaiting repatriation the armed forces will not be engaged in any military operation).
3. On 1 January 1963 the Indonesian flag will be hoisted side by side with the United Nations flag.
4. The transfer of authority to Indonesia will be effected as soon as possible after 1 May 1963.

U Thant

Acting Secretary-General

15 August 1962

AIDE MEMOIRE

Amendment to Aide Memoire dated 31 July 1962

Substitute the following for paragraph 3 :

3. On 31 December 1962 the Netherlands flag will be struck and the Indonesia flag will be hoisted side by side with the United Nations flag.

U Thant

Acting Secretary-General

**AIDE MEMOIRE OF ACTING SECRETARY-GENERAL U THANT
TO THE NETHERLANDS REGARDING THE TRANSFER OF
AUTHORITY OF WEST IRIAN**

15 August 1962.

AIDE MEMOIRE

The following modalities have been agreed to by Indonesia and the Netherlands regarding the transfer of authority of West New Guinea (West Irian):

1. The authority of the Government of the Netherlands over the territory will be terminated when the Special Representative of the Secretary-General takes charge. On the same day the United Nations flag will be hoisted.
2. From the same date the withdrawal and repatriation of the armed forces of the Netherlands will begin under the supervision of the Secretary-General's Special Representative and will be concluded as soon as possible.
3. On the day of the transfer of authority to the United Nations, the Netherlands flag will be hoisted side by side with the United Nations flag and it will fly until 31 December 1963.
4. The transfer of authority to Indonesia will be effected as soon as possible after 1 May 1963.

U Thant

Acting Secretary-General

15 August 1962

**STATEMENT BY ACTING SECRETARY-GENERAL U THANT
AT CEREMONY OF SIGNING OF AGREEMENT BETWEEN
REPUBLIC OF INDONESIA AND KINGDOM OF
NETHERLANDS**

On this eventful occasion, when the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands in regard to the future of West New Guinea (West Irian) is about to be signed, I would like first, of all to congratulate the two governments on their willingness to settle this question by peaceful negotiations and also on their spirit of "give and take" which has made possible the Conclusion of this Agreement.

I am sure I am right in saying that, as a result, there will be not only an easing of tension in the area, but also an increased feeling of mutual trust and confidence between the two governments. It is a good augury that, with the signing of this Agreement, diplomatic relations are to be resumed between the two countries, and I am sure that their future relations "will be marked by the friendliness, understanding and cordiality that have prevailed during these negotiations.

I would also like to take this opportunity to place on record, publicly my gratitude to Ambassador Ellsworth Bunker who has acted on my behalf during the preliminary negotiations between the two governments and whose patience, integrity, and diplomatic skill have contributed so greatly to the successful conclusion of this Agreement.

There are several unique features about this Agreement. One is that, if the General Assembly endorses it, the United Nations would have temporary executive authority (established by and under the jurisdiction of the Secretary-General) over a vast territory for the first time in its history. Another is that the entire expenses to be incurred under the terms of this Agreement are to be shared by the two governments and will not impose a burden on any of the other member governments. Considerable executive responsibilities are placed on the Secretary-General and Secretariat of the United Nations, some of which have necessarily, to be undertaken, in the interests of peace and security in anticipation of the approval of the General Assembly. It will be my endeavor and that of my colleagues to fulfil these tasks to the best of our capacity.

If these responsibilities are to be discharged to the satisfaction of all concerned, I shall need the willing cooperation of both governments, especially, during the period of transition. I hope that my task will be facilitated by the scrupulous adherence on the part of both governments, to the letter and spirit of this Agreement. Without it my task would become immensely difficult, and I earnestly appeal to both governments to make their cooperation available to me in the fullest measure.

Before closing, I would like to congratulate once again the representatives of the two governments on the imminent signature of this historic agreement which, in line with the principles of the Charter, has settled peacefully a long standing problem, with benefit to all concerned.

15 August 1962

**STATEMENT BY DR. SUBANDRIO, REPRESENTATIVE OF INDONESIA
AT THE CEREMONY OF THE SIGNING OF THE AGREEMENT
BETWEEN THE NETHERLANDS AND INDONESIA**

For the Indonesian people this very moment is regarded as a very, important national occasion since with the signing of the agreement the Indonesian unity has been restored and therefore the basis for the struggle for independence completed as part and parcel of the Indonesian revolution.

It is therefore that we are most gratified, Mr. Secretary-General, that you look the initiative as early, as in December for both Parties to come together in order to solve this problem in a peaceful way.

The positive response from the Indonesian and Netherlands side towards your urgent appeal results in the agreement we have just signed. Your guidance during the negotiations based upon sincerity, wisdom and experience, has made us pass with success through all the intricacies of a negotiated settlement. For that the Indonesian Government and people will be very grateful to you.

On behalf of the Indonesian Government and people I want also to thank, sincerely, the tireless efforts and patience of Ambassador Bunker who never spared himself physically and mentally in order to overcome all the difficulties and obstacles which sometimes seem to food the path toward this agreement.

To be frank, without the personal qualities inherent to Ambassador Bunker, it would be almost impossible to formulate an agreement within such a short period.

I also want to make use of this opportunity to congratulate Dr. Van Roijen. Dr. Schurmann and all the members of his delegation for the success of this agreement, and on behalf of my colleagues and my self, I want to express our deep appreciation for the consistent sincerity with which they have approached the problems we are dealing with.

And last but not least, Mr. Secretary General, our deepest appreciation to your devoted colicapties on the Secretariat for their unfailing assistance without which this success could not have been achieved.

The success of this agreement which is also a success of the United Nations I hope will lead to further achievetficnis in solving problems with which the United Nation, has been engaged.

Now that this agreement has been signed, now that the Indonesian unity, is reaching its completion. I sincerely hope that the traditional friendship between Indonesia and the Netherlands could be restored.

Thank you.

**PERSETUJUAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KERADJAAN NEDERLAND
MENGENAI
IRIAN BARAT**

(pemerintah) Republik Indonesia dan (Pemerintah) Keradjaan Nederland.

Mengingat kepentingan-kepentingan dan kesedjateraan rakjat wilayah Irian Barat. jang selandjutnyj disebut „wilajah”,

Berhasrat menyelesaikan persengketaan mereka mengenai wilajah tersebut, maka sekarang bersetudju sepeti tersebut dibawah ini :

**Pengesjahan Persetudjuan dan Resolusi Madjelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Pasal I

Setelah Persetudjuan antara Indone sia dan Nederland sekarang ini ditandatangani dan disjahkan oleh Kedua belah pihak, Indonesia dan Nederland akan bersama mengajukan rentjana resolusi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa jang mengandung ketentuan-ketentuan bahwa Madjelis Umum mentjatat Pesetudjuan sekarang ini, memaklumi peranan Sekretaris Djenderal Perserikaan Bangsa-angsa dalam Persetudjuan tersebut, dan memberikan kuasa kepada Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tugas-tugas jang dipertjajakan kepadanja dalam Persetudjuan ini.

Penjerahan Pemerintahan

Pasal II

Setelah resolusi termaktub dalam pasal I diterima, Nederland akan menjerahkan pemerintahan diwilajah tersebut kepada Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Temporary Executive Authority : UNTEA), dibentuk oleh dan dibawah juridiksi Sekretaris Djenderal, pada saat tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa -Bangsa jang diangkat sesuai dengan Pasal IV. UNTEA selantjutnja akan menjerahkan pemerintahan kepada Indonesia sesuai dengan pasal XII.

Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal III

Untuk melantjarkan penjerahan kepada UNTEA setelah di terimanja resolusi oleh Madjelis Umum. Nederland akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengirimkan seorang wakil untuk mengadakan musyawarah singkat dengan Gubernur Nederland dari wilayah tersebut sebelum Gubernur tersebut berangkat.

Gubernur Nederland akan berangkat sebelum kedatangan Penguasa Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal IV

Seorang Penguasa Perserikatan Bangsa-bangsa, jang dapat diterima oleh Indonesia dan Nederland, akan diangkat oleh Sekretaris Djenderal.

Pasal V

Penguasa Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai kepala pelaksana UNTEA, akan berkuasa penuh atas pentundjuk-petundjuk Sekretaris Djenderal untuk mendjalankan pemerintahan diwilajah tersebut selama djangka waktu pemerintahan UNTEA sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

Pasal VI

Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan selama masa pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengenai pengibaran bendera Indonesia dan bendera Nederland, telah terdapat suatu pengertian bahwa hal tersebut akan ditentukan antara Sekretaris Djenderal dan masing-masing pemerintah jang bersangkutan dalam suatu persetjuan (tersendiri).

Pasal VII

Sekretaris Djendjeral akan menjediakan bagi UNTEA pasukan-pasukan keamanan jang dipandang perlu oleh Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa pasukan-pasukan demikian itu terutama dimaksudkan untuk memperluas polisi Irian Barat jang telah ada, dalam tugasnja mendjaga keamanan dan kelertiban tintim. Korps Sukarlala Irian Barat, jang pada saat tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berhenti sebagai bagian daripada angkatan bersendjata Nederland, dan angkatan bersendjata Indonesia di wilayah tersebut akan ditempatkan didaerah kekuasaan dan diperuntukkan bagi Sekretaris Djenderal untuk maksud jang sama. Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa sedapat mungkin akan menggunakan polisi Irian Barat

sebagai pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga keamanan dan keterlibatan umum dan atas kebidjaksanaannya mempergunakan angkatan bersendjata Indonesia. Angkatan bersendjata Nederland akan dipulangkan setcepat mungkin dan selama mereka berada diwilayah tersebut akan ditempatkan dibawah pengausaan UNTEA.

Pasal VIII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan laporan-laporan berkala kepada Sekrearis Djenderal tentang aspek-aspek utama mengenai pelaksanaan Persetudjuan ini. Sekretaris Djenderal akan menjampaikan laporan-laporan lengkap kepada Indonesia dan Nederland dan. atas kebidjaksanaannya dapat menjampaikan laporan kepada Madjelis Umum atau kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Taraf Pertama Pemerintahan UNTEA

Pasal IIX

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa setcepat mungkin akan mengganti pedjabat-pedjabat tertinggi Nederland jang termaktub dalam lampiran A dengan pedjabat bukan-Nederland, bukan-Indonesia selama taraf pertama pemerintahan UNTEA jang akan berachir pada tanggal 1 Mei 1963 Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berwenang memperkerdjakan untuk sementara waktu semua pedjabat-pedjabat Nederland, selain dari pada pedjabat-pedjabat tertinggi Nederland termaktub dalam Lampiran A, jang ingin bekerdja pada UNTEA, dengan demikian-ketentuan serta syarat-syarat jang dapat ditetapkan oleh Sekretaris Djenderal. Semenjak mungkin orang-orang Irian Barat akan ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratif dan teknis. Untuk mengisi djabatan-djabatan jang diperlukan selebihnja, UNTEA akan berwenang mempekerdjakan pegawai-pegawai jang disediakan oleh Indonesia. Skala gadji jang telah dipakai di Irian Barat akan dipertahankan (diteruskan).

Pasal X

Segera setelah penjerahan pemerintahan kepada UNTEA, UNTEA akan mengumumkan dan akan menerangkan setjara luas ketentuan-ketentuan dalam Persetudjuan ini dan akan memberitahukan kepada penduduk perihal penjerahan pemerintthan kepada Indonesia dan ketentuan-ketentuan bagi pelaksanaan penentuan nasib sendiri seperti tertera dalam Persetudjuan sekarang ini.

Pasal XI

Sepandjang ada persesuaian dengan kata dan djiwa persetudjuan sekarang ini perundang-undangan jang telah ada akan tetap berlaku. UNTEA akan berkuasa mengeluarkan perundang-undangan baru atau mengubahnja dalam djiwa dan rangka persetudjuan sekarang ini.

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi sebelum dikeluarkannja Undang-undang dan Peraturan-peraturan baru atau diubahnja Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada.

Taraf Kedua

Pasal XII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi kebidjaksanaan untuk menjerahkan pemerintahan seluruhnja atau sebagian kepada Indonesia setiap waktu sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Kekuasaan UNTEA akan berachir pada saat penjerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia.

Pasal XIII

Pasukan-pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diganti dengan pasukan-pasukan keamanan Indonesia sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Semula keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditarik mundur pada saat penjerahan pemerintahan kepada Indonesia.

Pemerintahan Indonesia dan Penentuan Nasib Sendiri

Pasal XIV

Setelah penjerahan tanggung djawab pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia, Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Nasional Indonesia sebagai dasar akan berlaku diwiayah tersebut dengan pengertian bahwa Undang-undang dan Peraturan-peraturan itu sesuai dengan djaminan hak-hak serta kebebasan-kebebasan bagi penduduk menurut ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

Undang-undang dan peraturan-peraturan baru atau perobahan-perobahan pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada dapat didjalankan menurut djiwa Persetudjuan ini.

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi seperlunja.

Pasal XV

Setelah penjerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia, tugas utama Indonesia ialah mempergiat lebih lanjut pendidikan rakyat, pemberantasan butahuruf, kemandirian perkembangan sosial, kebudayaan dan ekonomi.

Sesuai dengan praktek-praktek di Indonesia dewasa ini akan dilakukan pula usaha-usaha untuk mempertajam ikut sertanya Rakyat didalam pemerintahan daerah melalui Pemilihan berkala. Tiap aspek yang bertalian dengan perwujudan kebebasan memilih akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.

Pasal XVI

Pada saat Penjerahan tanggung jawab Pemerintahan sepenuhnya Kepada Indonesia sejumlah pegawai ahli Perserikatan Bangsa-bangsa, yang dianggap mentjukupi oleh Sekretaris Djenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia akan ditunjuk untuk tetap tinggal dimana saja kewajiban mereka memerlukanja. Sebelum kedatangan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan ikut serta pada saat yang wajar dalam mengadakan usaha-usaha penentuan nasib sendiri, kewajiban mereka akan terbatas pada memberi nasehat dan membantu persiapan-persiapan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan bagi penentuan nasib sendiri, ketjuali bilamana Indonesia dan Sekretaris Djenderal dapat bersetuju bahwa mereka akan menjalankan pekerjaan ahli yang lainja. mereka akan bertanggung jawab pada Sekretaris Djenderal mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka.

Pasal XVII

Indonesia akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengangkat seorang wakil, yang bersama dengan staf yang, antara lain, terdiri dari pegawai-pegawai tertera dalam pasal akan melaksanakan kewajiban Sekretaris Djenderal untuk memberi nasehat, membantu dan ikut serta dalam usaha-usaha untuk perwujudan kebebasan memilih yang merupakan tanggung jawab Indonesia.

Sekretaris Djenderal pada waktu yang wajar akan mengangkat seorang Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia dengan Stafnja dapat menjalankan kewajiban-kewajiban mereka satu tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri. Penambahan staf yang sekiranya dipandang perlu oleh wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditentukan oleh Sekretaris Djenderal setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Wakil Perserikatan Bangsa-bangsa dan stafnja akan mempunyai kebebasan bergerak jang sama seperti jang diberikan kepada pegawai-pegawai jang disebut dalam pasal XVII.

Pasal XVII

Indonesia, dengan bantuan dan itu sertanja wakil Perserikatan Bangsa-bangsa dan stafnja, akan mengadakan usaha-usaha untuk memberi kesempatan kepada rakyat wilayah tersebut untuk melaksanakan kebebasan memilih usaha-usaha tersebut akan mentjakup :

a. Konsultasi (Musyawarah) dengan dewan-dewan perwakilan mengenai prosedur dan tjara-tjara jang pantas dianut untuk mengetahui kebebasan pernjjataan kebendak rakyat.

b. Penentuan tanggal jang pasti untuk pelaksanaan kebebasan memilih dalam djangka waktu jang ditetapkan oleh Persetudjuan sekarang ini.

c. Perumusan pertanjaan-pertanjaan sedemikian rupa agar penduduk dapat menentukan (a) apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia ; atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia.

d. Hak pilih semua orang dewan, pria dan wanita, bukan warga-negara asing, jang merupakan penduduk pada waktu penanda tangan Persetudjuan dan pada waktu persetudjuan penentuan nasib sendiri, untuk ikut serta dalam perwudjuan penentuan nasib sendiri jang akan dilaksanakan sesuai dengan praktek internasional, termasuk penduduk-penduduk jang pergi sesudah 1945 dan kembali kedaerah itu untuk bertempat tinggal lagi setelah berachirnja Pemerintahan Nederland.

Pasal XIX

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melaporkan kepada Sekretaris Djenderal tentang usaha-usaha jang telah disiapkan untuk perwudjuan kebebasan memilih.

Pasal XX

Perwudjuan penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan sebelum achir tahun 1969.

Pasal XXI

1. Setelah pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, Indonesia dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjampaiakan laporan-laporan

terachir kepada Sekretaris Djenderal jang kemudian akan melaporkan kepada Madjelis Umum tentang pelaksanaan perwujudan penentuan nasib sendiri serta hasil hasilnja.

2. Pihak-pihak pada persetudjuan sekarang ini akan mengakui dan menaati hasil-hasil persetudjudan penentuan nasib sendiri itu.

Hak-hak Penduduk

Pasal XXII

1. UNTEA dan Indonesia akan mendjamin sepenuhnya hak-hak penduduk daerah tersebut, termasuk hak-hak bebas bitjara, bebas bergerak dan hak ber kumpul dan bersidang. Hak-hak ini akan mentjakup hak-hak penduduk wilajah jang telah ada pada waktu penjerahan pemerintahan pada UNTTA.

2. UNTEA akan mengoper djandii-diandji Nederland jang telah ada mengenai konsesi-konsesi dan hak-hak milik.

3. Setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan. Indonesia akan mengoper djandii-djndji tersebut jang tidak bertentangan dengan kepentingan dan perkembangan ekonomi rakjat wilajah tersebut. Suatu panitya bersama Indonesia - Nederland akan dibentuk, setelah penjerahan pemerintahan pada, Indonesia, untuk mempeladjadi sifat konsesi-konsesi dan hak-hak milik tersebut diatas.

4. Selama masa pemerintahan UNTEA akan ada kebebasan bergerak bagi orang-orang sipil jang berkewarga-negeraan Indonesia dan Nederland keluar masuk wilajah itu.

Pasal XXIII

Lowongan-lowongan dalam dewan-dewan perwakilan disebabkan keberangkatan warganegara-warganegara Nederland, atau karena sebab-sebab lain, akan diisi setjara wadjar dan sesuai dengan perundang-undangan jang ada dengan djalan pemilihan atau pengangkatan oleh UNTEA. Dewan-dewan perwakilan akan dikonsullasi sebelum pengangkatan wakil-wakilbaru.

Soal-soal Keuangan

Pasal XXIV

1. Defisit-defisit dalam anggaran belandja dari wilajah selama pemerintahan UNTEA akan dibagi rata antara Indonesia dan Nederland. Indonesia dan Nederland akan dikonsultasi oleh Sekretaris Djenderal dalam

mempersiapkan anggaran belandja UNTEA, dan hak-hak keuangan lainnja jang bersangkutan dengan kewadajiban-kewadajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan persetudjuan sekarang ini, namun Sekretaris Djenderal berwenang memberikan keputusan terachir.

2. Kedua belah pihak dari Persetudjuan sekarang ini akan membajar kembali kepada Sekretaris Djenderal semua pengeluaran jang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Persetudjuan ini dan akan menjediakan uang muka setjukupnja untuk pelaksanaan kewadajiban-kewadajiban Sekrctaris Djenderal. Kedua belah pihak dari Persetudjuan ini akan membagi rata pembajaran kembali seperti tersebut diatas dan pengeluaran-pengeluaran uang muka tersebut.

Perdjandjian-Perdjandjian dan Persetudjuan-Persetudjuan terdahulu

Pasal XXV

Persetudjuan sekarang ini akan berlaku lebih kuat daripada setiap perdjandjian terdahulu mengenai wilajah Irian Barat. Perdjandjian-perdjandjian dan persetudjuan-persetudjuan terdahulu mengenai wilajah Irian Barat oleh karenanja dapat dibatalkan atau disesuaikan menurut keperluan untuk diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

Kelonggaran dan kekebalan

Pasal XXVI

Untuk pelaksanaan Persetudjuan sekarang ini, Indonesia dan Nederland akan mendjalankan ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap milik uang, modal dan para pegawai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teristimewa Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa jang diangkat menurut Pasal IV dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa jang diangkat menurut Pasal XVII, akan' mendapat kelonggaran dan kekebalan seperti jang ditjantumkan dalam pasal XIX dari Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ratifikasli

Pasal XXVII

1. Persetudjuan sekarang ini akan diratifikasikan menurut prosedur-prosedur konstitutionil daripada kedua belah pihak jang mengadakan Persetudjuan.

2. Piagam-Piagam ratifikasi akan ditukar selekas mungkin di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa oleh wakil-wakil tetap dari kedua belah pihak di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Sekrteraris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa selandjutnja akan membuat berita atjara dari penukaran piagam ratifikasi dan akan menjampaiakan turunan jang disjahkan kepada masing-masing pihak.

Waktu Mulai Berlakunja Persetudjuan

Pasal XXVIII

1. Persetudjuan sekarang ini mulai berlaku pada tanggal Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima Tesolusi seperti jang tertera di Pasal I dari Persetudjuan sekarang ini.

2. Pada saat berlakunja, Persetudjuan sekarang ini akan ditjatat oleh Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Naskah Resmi

Pasal XXIX

Naskah resmi Persetudjuan sekarang ini telah disusun dalam bahasa Inggris. Terdjemahannja dalam bahasa Indonesia dan Nederland akan dipertukarkan antara kedua belah pihak.

Demi untuk penjaksian segala itu, maka wakil-wakil berkuasa penuh jang bertanda-tangan dibawah ini dan jang diberi wewenang lengkap oleh masing-masing pemerintahnja menandatangani Persetudjuan sekarang ini.

Dibuat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New, York, pada hari kelimabelas bulan Agustus 1962 dalam tiga ganda kembar, diantaranya satu ganda disampaikan kepada Sekretaris Djenderal dan selebihnja disampaikan kepada Pemerintah masing-masing pihak jang mengadakan persetudjuan ini.

(ttd.) **Subandrio**

Untuk Republik Indonesia

(ttd.) **J. Herman van Roijen**

Untuk Keradjaan Nederland

(ttd.) **C.W.A. Schurmann**

Untuk Keradjaan Nederland

15 Agustus 1962

LAMPIRAN A PADA PERSETUDJUAN

Pedjabat-pedjabat tertinggi Belanda yang harus diganti setcepat mungkin oleh pedjabat-pedjabat bukan-Nederland dan bukan-indonesia.

I. Pemerintah

Kepala Biro Penerangan Pemerintah	1
Kepala Dinas Penerangan Rakyat	1

II. Departemen Dalam Negeri

Direktur	1
Kepala Daerah („Residen“) :	6
1. Hollandia	
2. Biak	
3. Manokwari	
4. Fak Fak	
5. Merauke	
6. Dataran-tinggi Tengah	
Kepala Administratif Polisi	1

III. Departemen Keuangan

Direktur	1
----------	---

IV. Departemen Urusan Sosial dan Kehakiman

Direktur	1
----------	---

V. Departemen Kesehatan

Direktur	1
----------	---

VI. Departemen Urusan Kebudayaan (termasuk Pendidikan)

Direktur	1
Kepala Siaran	1

VII. Departemen Urusan Ekonomi

Direktur	1
----------	---

VIII. Departemen Pengangkutan dan Tenaga

Direktur	1
----------	---

IX. Departemen Pekerjaan Umum

Direktur	1
----------	---

Djumlah : 18

**SURAT DARI KEDUA PIHAK BERKENAAN DENGAN
MEMORANDUM PENGERTIAN MENGENAI
PENGERTIAN PERMUSUHAN**

15 Agustus 1962.

Tuan,

Atas nama Pemerintah kami masing-masing, pada kesempatan penanda tanganan Persetudjtan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat, kami dengan hormat mohon perhatian Tuan atas Memorandum Pengertian jang telah dicapai anttra Pemerintah-Pemerintah kami mengenai penghentian permusuhan di Irian Barat, jang naskah aslinja jang telah lditandatangani termuat dalam lampiran A pada surat ini.

Dalam memohon perhatian Tuan atas Memorandum Persetudjuan jang dilampirkan itu kami dengan hormat mengajukan permohonan, atas nama Pemerintah kami masing-masing agar Tuan menjatakan kesediaan Tuan Selaku tindakan jang luar biasa untuk mendjalankan pekerdjaan jang diberikan kepada Sekretaris Djenderal dalam Memorandum itu dengan maksud melaksanakan penghentian permusuhan selekas mungkin dengan tidak mengurangi hak Tuan untuk memberikan laporan kepada Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu jang lajak. Pemerintah kami masing-masing, dalam mengajukan permobonan ini, menginsafi keperluan jang mendesak akam bantuan Tuan dan bantuan petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan Persetudjuan mengenai penghentian permusuhan.

Memorandum Pengertian tersebut mendjelaskan Persetudjuan jang telah ditjapai antara Pemerintah kami masing-masing bihwa Pemerintah kami akan membagi rata segala beaja jang dikeluarkan dalam melaksanakan kewadajiban-kewadajiban Tuan atas dasar Memorandum tersetut. Demi untuk keperluan itu Pemerintah-Pemerintah kami telah menjetudjuj untuk menjediakan djumlah-djumlah uang muka jang Tuan anggap perlu.

Terimalah, Tuan, pernjataan penghargaan kami jang setinggi-tingginja.

(ttt.) **Subandrio**
Wakil Indonesia

(ttt.) **J. Herman Van Roijen**
Wakil Nederland

(ttt.) **C.W.A. Schurmann**
Wakil Nederland

ANNEX A PADA SURAT KEPADA U THANT

MEMORANDUM PENGERTIAN BERSAMA MENGENAI PENGHENTIAN PERMUSUHAN JANG MERUPAKAN PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN NEDERLAND

1. Penghentian permusuhan di Irian Barat jang selandjutnja disebut „wilajah“, akan dimulai pada djam 0001 GMT pada hari Saptu 18 Agustus 1962. Mulai saat itu akan ditaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghentian tembak-menembak oleh kedua belah pihak.
 - b. Indonesia dan Nederland tidak akan memperkuat pasukan-pasukan militernja diwilajah Irian Barat, pun tidak akan memberikan perbekalan lagi kepada mereka dengan alat-alat perlengkapan militer.
 - c. Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menugaskan petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa (I) untuk mengawasi pelaksanaan persetudjuan ini dan (II) khususnja untuk mengambil tindakan jang diperlukan guna mentjegah tindakan-tindakan jang dapat membahayakan keamanan pasukan-pasukan dari pada kedua belah pihak dari persetudjuan ini.
 - d. Tiap insiden jang mungkin timbul akan segera dilaporkan oleh pihak jang bersangkutan kepada petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa agar supaja mereka dapat mengambil tindakan-tindakan jang diperlukan untuk memulihkan keadaan atas dasar konsultasi dengan kedua belah pihak.
2. Penghentian permusuhan akan disampaikan kepada pasukan-pasukan bersendjata dari Nederland dan dari Indonesia dengan djalan sebagai berikut :
 - a. Berita-berita jang disiarkan melalui pemantjar-pemantjar radio Indonesia dan Nederland dan dengan tjara-tjara komunikasi jang lainnja.
 - b. Dropping pamflet-pamflet didaerah-daerah jang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3.
3. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan khusus dalam menjampaiakan penghentian tembak-menenbak kepada Pasukan-pasukan Indonesia diwilajah Irian Barat penerbangan-penerbangan jang telah diatur terlebih dahulu akan dilaksanakan oleh pesawat-pesawat Indonesia dengan maksud mengadakan dropping pamflet-pumflet jang ditjatak dengan naskah jang telah disetudjui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembesar-pembesar Indonesai menjetudjui agar penjebaran-penjebaran pamflet tersebut pada pos-pos jang terasing setjepat mungkin dan tidak akan lebih lama dari dua minggu sedjak penghentian permusuhan. Dalam penerbangan-penerbangan ini petugas-

petugas. Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ikut untuk memberikan laporan sebelum dan sesudah penerbangan, mengenai waktu dan route penerbangan dan daerah-daerah dimana diadakan dropping pamflet.

4. Untuk memudahkan pemberian perbekalan lagi kepada pasukan-pasukan Indonesia diwilayah Irian Barat dan agar supaya mereka berada dibawah kekuasaan dan diperuntukkan bagi Sekretaris Djenderal pada waktu yang lajak. Indonesia akan mengadakan persiapan yang diperlukan mengenai penempatan mereka didaerah yang terpilih, dengan persendjataan Sekretaris Djenderal. Sekretaris Djenderal akan bertindak dalam hal ini atas dasar konsultasi dengan pembesar-pembesar Pemerintah Nederland.

5. Pemberian perbekalan lagi yang terdiri dari alat-alat pelengkapan non-militer kepada pasukan-pasukan bersendjata Indonesia di wilayah Irian Barat akan dilaksanakan oleh petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan bekerjasama dengan pembesar-pembesar Indonesia dan Nederland. petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mempergunakan satu atau dua kapal Indonesia tak bersendjata untuk pengangkutan ke-satu atau beberapa pelabuhan yang disetujui oleh pembesar-pembesar Nederland. Pemberian perbekalan melalui udara akan dilaksanakan atas petunjuk-petunjuk dari petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memakai pesiawat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6. Dengan maksud melaksanakan persetudjuan-persetudjuan tersebut dalam Pasal-Pasal 3.4 dan 5, satu penghubung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan satu penghubung Indonesia masing-masing terdiri dari 3 perwira akan diadakan pada markas-besar angkatan perang Nederland di wilayah Irian Barat. Perwira-perwira Penghubung militer akan ditempatkan di Perutusan-Perutusan Tetap pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Nederland dan Indonesia untuk mendjalan tugas penghubung dengan kantor Sekretaris Djendral.

7. Selekas mungkin setelah penerimaan resolusi yang disebut dalam Pasal I dari Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat dari Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan selambat-lambatnja tangral 1 Oktober 1962, satu pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk satu bataljon Infantri dengan perlengkapan bantuannja akan diperuntukkan bagi UNTEA oleh Sekretaris Djenderal di wilayah Irian Barat dengan maksud terutama untuk memperkuat polisi Irian Barat yang telah ada dalam tugasnja mendjaga ketertiban dan keamanan umum.

8. Nederland akan membuat persiapan-persiapan dengan melalui Sekretaris Djenderal untuk memulangkan tawanan-tawanan Indonesia. selekas mungkin setelah penandatanganan Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat.

9. Indonesia dan Nederland akan bersama-sama mengajukan permintaan kepada Sekretaris Djenderal agar beliau mendjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada beliau dalam Persetujuan ini.

10 Indonesia dan Nederland akan membagi rata segala beaja yang dikeluarkan oleh Sekretarid Djenderal atas dasar Persetujuan ini dan akan menjediakan sebelumnja djumlah uang muka yang dipandang perlu oleh beliau.

Dibuat pada hari tanggal 15 Agustus 1962.

(ttd) **Subandrio**
Untuk Republik Indonesia

(ttd) **J.H. van Roijen**
Untuk Keradjaan Nederland

(ttd) **C.W.A. Schurmann**
Untuk Keradjaan Nederland

DJAWABAN DARI PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL U THANT

15 Agustus 1962

Tuan,

Dengan hormat saya memberitahukan telah menerima surat tertanggal hari ini jang dialamatkan kepada saya oleh Wakil Republik Indonesia dan Wakil-wakil Keradjaan Nederland mengenai penghentian permusuhan di Irian Barat jang berbunji sebagai berikut :

„Atas nama Pemerintah kami masing-masing pada kesempatan penanda tanganan Persetudjuan antara Republik-Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat, kami dengan hormat mohon perhatian Tuan atas Memorandum Pengertian jang telah ditjapai antara Pemerintah-pemerintah kami mengenai penghentian permusuhan di Irian Barat, jang naskah aslinja jang telah ditanda-tangani termuat dalam Lampiran A pada surat ini.

Dalam memohon perhatian Tuan atas Memorandum Persetudjuan jang dilampirkan itu kami dengan hornat mengajukan permohonan atas nama Pemerintah kami masing-masing agar Tuan menjatakan kesediaan Tuan selaku tindakan jang luar biasa untuk mendjalankan pekerdjaan jang diberikan kepada Sekretaris Djenderal dalam Memorandum itu dengan maksud melaksanakan penghentian permusuhan selekas mungkin dengan tidak mengurungi hak Tuan untuk memberikan laporan kepada Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu jang lajak. Pemerintah kami masing-masing dalam mengajukan permohonan ini, menginsafi keperluan jang mendesak akan bantuan Tuan dan bantuan petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan Persetudjuan mengenai penghentian permusuhan.

Memorandum Pengertian tersebut mendjelaskan Persetudjuan jang telah ditjapai antara Pemerintah kami masing-masing bahwa Pemerintah kami akan membagi rata segala beaja jang dikeluarkan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuan atas dasar Memorandum tersebut. Demi untuk keperluan itu Pemerintah-pemerintah kami telah menjetudjui untuk meniadikan djumlah-djurnlah uang muka jang Tuan anggap perlu”.

Sebagai djawaban dengan hormat saya memberitahukan kepada Tuan bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat dalam surat tersebut saja tersedia mendjalankan kewajiban-kewajiban tertera dalam surat tersebut dan lampiranja.

Terimalah, Tuan, pernjaatan penghargaan saja setinggi-tingginja.

(ttd) U Thant

Pedjabat Sekretaris Djenderal

Kepada

1. Wakil Republik Indonesia
2. Wakil Keradjaan Nederland

15 Agustus 1962

**MEMORANDUM PENGERTIAN
JANG BERSIFAT SUATU PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KERADJAAN NEDERLAND
MENGENAI BEBERAPA SOAL KEUANGAN
SELAMA WAKTU PEMERINTAHAN DI IRIAN BARAT OLEH
BADAN PENGUSAHA PELAKSANA SEMENTARA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (UNTEA)**

1. Untuk mempersiapkan anggaran belandja bagi masa pemerintahan diri wilayah Irian Barat oleh Badan Pengusaha Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) sesuai dengan Pasal XXIV dari Persetidjtjan antata Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat, akan dibentuk sebuah Panitia setcepat mungkin terdiri dari wakil-wakil dari Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keradjaan Nederland dengan maksud mengumpulkan keterangan-keterangan jang diperlukan dan mengadjukan usul-usul jang wadjar kepada Sekretaris Djenderal mengenai djumlah uang jang akan diperuntukan bagi Pengusa Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Pemerintah Nederland dan Pemerintah Indonesia pada permulaan masa UNTEA.

2. Dalam menentukan anggaran belandja bagi masa UNTEA, Pengusaha Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat perhitungannja atas dasar nilai banding bagi New Guinea guilders sesuai dengan US S 1.00 sama dengan N.G. guilders 3.62.

DIBUAT pada hari tanggal limabelas Agustus 1962 dalam rangkap tiga asli.

(ttd) **Subandrio**
Untuk Republik Indonesia

(ttd) **J. H. van Roijen**
Untuk Keradjaan Nederland

(ttd) **C. W. A. Schurmann**
Untuk Keradjaan Nederland

SURAT KEDUA PIHAK KEPADA PEDJABAT SEKRETARIS
DJENDERAL P.B.B. PERIHAL PERSETUDJUAN MENGENAI
SURAT-SURAT PERDJALANAN DAN BANTUAN KONSULER
SERTA PERLINDUNGAN DILUAR NEGERI TERHADAP
ORANG-ORANG IRIAN BARAT

15 Agustus 1962

Tuan,

Alas nama Pemerintah kami masing-masing, pada saat penandatanganan Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat, dengan hormat kami minta perhatian Tuan tentang persetudjuan berikut jang ditjapai antara Pemerintah kami dan dengan ini ditjatakan, mengenai pengeluaran paspor-paspor dan perlindungan konsuler selama masa pemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bingsa-Bangsa (UNTEA) jang tersebut dalam Persetudjuan diatas:

"2. UNTEA akan mempunjai kekuasaan sebagai kebidjaksanaannja untuk mengeluarkan surat-surat perdjalanen bagi orang-orang Irian Barat jang memintanja, dengan tidak menghilangkan hak mercka untuk sebaliknya meminta paspor Indonesia

"2. Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Nederland permintaan Sekretaris Djenderal akan memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian Barat jang membawa surat-surat perdjalanen (UNTEA) tersebut dalam pasal I diatas terserah pada orang jang bersangkutan untuk menentukan pada kekuasaan konsul mana ia akin berhubungan."

Apabila jang tersebut diatas dapat Tuan setudjuj kami dengan hormat mengusulkan selandjutnja bahwa nota ini dan djawaban Tuan jang menjetudjuj itu akan dianggap sebagai persetudjuan jang tertjapai dalam soal ini serta tertjatatnja persetudjuan ini.

Terimalah, Tuan, pernjataan penghargaan kami jang setinggi-tingginja.

(ttd) **Subandrio**
Wakil Indonesia

(ttd) **J.H. van Roijen**
Wakil Nederland

(ttd) **C.W.A. Schurmann**
Wakil Nederland

Kepada
Pedjabat Sekretaris Djenderal
Perserikatan Bंगा-Bangsa

**SURAT JANG SAMA DARI PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL
U THANT KEPADA WAKIL INDONESIA DAN WAKIL-WAKIL
NEDERLAND**

15 Agustus 1962

Tuan,

Saja memberitahukan dengan hormat penerimaan nota tertinggat hari ini jang ditudjukan kepada saja oleh Republik Indonesia dan Keradjaan Nedetland, mengenai pengeluaran paspor-paspor dan perlindungan konsuler selama masa pemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Rangsa (UNTEA) diwilajah Irian Barat jang bunjinja sebagai berikut :

"Atas nama Pemerintah kami masing-masing pada saat penandatanganan Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat dengan hormat kami minta perhatian Tuan tentang persetudjuan berikut jang ditjapai antara Pemerintah kami dan dengan ini ditjatakan, rnengenai pengertian paspor-paspor dan perlindungan konsuler selama masa pemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) jang tersebut dalam Persetudjuan diatas:

"1. UNTEA akan mempunjai kekuasaan sebagai kebidjaksanaannja untuk mengeluarkan surat-surat perdjalanannja bagi orang-orang Irian Barat jang memintanja, dengan tidak menghilangkan hak mereka untuk sebaliknja meminta paspor Indonesia;

"2. Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Nederland atas permintaan Sekretaris Djenderal akan memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian Barat jang membawa surat-surat perdjalanannja (UNTEA) tersebut dalam pasal 1 diatas, terserah pada orang jang bersangkutan untuk menentukan pada kekuasaan konsul mana ia akan berhubungan.

"Apabila jang tersebut diatas dapat Tuan setudju, kami dengan hormat mengusulkan selandjutnja bahwa nota ini dan djawaban Tuan jang menjetudju itu akan dianggap sebagai persetudjuan jang tertjapai dalam soal ini serta tertjatatnja persetudjuan ini".

Sebagai djawaban saja memberitahukan dengan hormat kepada Tuan bahwa saja bersedia memberi insruksi kepada UNTEA, djika ini telah terbentuk seperti jang tersebut dilain Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengerti Irian Barat untuk melakukan tugas seperti jang dimaksudkan dalam nota Tuan. Saja ingin mempergunakan kesempatan

ini untuk meminta Pemerintahan Tuan untuk memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian Barat seperti tersebut dalam pasal 2 dari nota Tuan.

Nota ini dan nota Tuan tersebut akan dianggap sebagai persetujuan yang tertjapai dalam soal ini dan tertjatatnja persetujuan ini.

Terimalah, Tuan perjataan penghargaan saja jang setinggi-tingginja.

(ttd) **U Thant**

Pedjabat Sekretaris Djenderal

Djawaban Indonesia kepada Pedjabat Sekretaris Djenderal

15 Agustus 1962

Tuan.

Saja memberitahukan dengan hormat penerimaan nota Tuan tertanggal hari ini, menjejutkan kesediaan Tuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu berkenaan dengan pengeluaran paspor-paspor selama masa pemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) diwilajah Irian Barat dan meminta Pemerintah saja untuk memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian Barat jang minta bantuan dan perlindungan serupa selama masa pemerintahan UNTEA.

Saja memberitahukan dengan hormat kepada Tuan, bahwa Pemerintah saja akan memberikan bantuan konsuler dan perlindungan itu.

Terimalah Tuan pernjataan penghargaan saja jang setinggi-tingginja.

(ttd) **Subandrio**
Wakil Indonesia

Djawaban Nederland kepada Pedjabat Sekretaris Djederal

15 Agustus 1962

Tuan,

Kami memberitahukan dengan hormat penerimaan note Tuan tertanggal hari ini menjebutkan kesediaan Tuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu berkenaan dengan pengeluaran paspor-paspor selama masapemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) diwilajah Irian Barat dan meminta Pemerintah kami untuk memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Iran Barat jang minta bantuan dan perlindungan serupa selama masa pemerintahan UNTEA.

Kami memberitahukan dengan hormat kepada Tuan Bahwa Pemerintahan kami akan memberikan bantuan konsuler dan perlindungan itu.

Terimalah, Tuan. parnjataan penghargaan kami jang setinggi-tingginja.

(ttd) J. H. van Roijen

wakil Nederland

(ttd) C. W. A. Schurmann

wakil Nederland

**PERTUKARAN SURAT MENGENAI PEMBUKAAN KEMBALI
HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA
NEDERLAND DAN INDONESIA**

15 Agustus 1962

Tuan-tuan,

Atas nama Republik Indonesia, saya dengan hormat membenarkan pengertian, bahwa setelah penanda tangan Persetujuan akan diadakan pertukaran misi diplomatik antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland.

Terimalah, Tuan-tuan, pernyataan penghargaan saya jang setinggi-tingginya.

(ttd) **Subandrio**

wakil Republik Indonesia

Kepada

Wakil-wakil Keradjaan
Nederland.

15 Agustus 1962

Tuan,

Kami memberitahukan dengan hormat penerimaan surat Tuan tertanggal hari ini, jang bunjinja sebagai berikut :

"Atas nama Republik Indonesia, saja dengan hormat membenarkan pengertian, bahwa setelah penanda tangan Persetujuan akan diadakan pertukaran misi diplomatik antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland."

Sebagai djawaban, kami dengan hormat membenarkan, bahwa apa jang tersebut diatas adalah pengertian dari Keradjaan Nederland pula.

Terimalah, Tuan, penjataan penghargaan kami jang setinggi-tingginja.

(ttd) **J.H. van Roijen**

Wakil Keradjaan Nederland

(ttd) **C. W. A. Schurmann**

Wakil Keradjaan Nederland

Kepada

Wakil-wakil Keradjaan
Nederland

**AIDE MEMOIRE PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL U THANT
KEPADA INDONESIA MENGENAI PENGIBARAN BENDERA DAN
PENJERAHAN KEKUASAAN**

31 Djuli 1962

AIDE MEMOIRE

Jang tersebut dibawah ini adalah pengertian saja mengenai tata-tjara dari pada penjerahan kekuasaan atas Irian Barat :

1. Kekuasaan Pemerintah Nederland atas wilajah Irian Barat akan dihentikan pada saat Wakiil Khusus Sekretaris Djenderal mulai memangku djabatannya. Pada hari itu djuga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan.
2. Sedjak hari tanggal itu djuga penarikan dan pemulangan pasukan-pasukan bersendjata Nederland akan dimulai dibawah pengawasan Wakil Khusus Sekretaris Djenderal dan akan diselesaikan setcepat mungkin. (Sambil menunggu pemulangannya pasukan-pasukan bersendjata itu tidak akan dipergunakan untuk operasi militer apapun).
3. Pada tanggal 1 Djanuari 1963 bendera Indonesia akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Penjerahan kekuasaan kepada Indonesia akan dilaksanakan setcepat mungkin sesudah 1 Mei 1963.

(ttd) **U Thant**
Pedjabat Sekretaris Djenderal

15 Agustus 1962

AIDE MEMOIRE

Amendemen pada Aide Memoire tertanggal 31 Djuli 1962

Penggantian dari pada ajat 3 sebagai berikut :

3. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Nederland akan diturunkan, dan bendera Indonesia akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-bangsa.

(ttd) U Thant
Pedjabat Sekretaris Djenderal

**AIDE MEMOIRE PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL U THANT
KEPADA NEDERLAND MENGENAI PENGHARGAAN BENDERA DAN
PENJERAHAN KEKUASAAN**

15 Agustus 1962

AIDE MEMOIRE

Tata-tjara dibawah ini telah disetudjui oleh Indonesia dan Nederland mengenai kekuasaan atas Irian Barat :

1. Kekuasaan Pemerintah Nederland atas wilayah Irian Barat akan dihentikan pada saat Wakil Khusus Sekretaris Djenderal mulai memangku djabatannja. Pada hari itu djuga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan.
2. Sedjak hari tanggal itu djuga penarikan dan pemulangan pasukan-pasukan bersendjata Nederland akan dimulai dibawah pengawasan Wakil Khusus Skretaris Djenderal dan akan diselesaikan setjepat mungkin.
3. Pada hari penjerahan kekuasaan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bendera Nederland akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan berkibar sampai tanggal 31 Desember 1962.
4. Penjerahan kekuasaan kepada Indonesia akan dilaksanakan setjepat mungkin sesudah 1 Mei 1963.

(ttd) **U Thant**

Pedjabat Sekretaris Djenderal

**PIDATO PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA U THANT PADA UPATJARA PENANDA
TANGANAN PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN KERADJAAN NEDERLAND**

15 Agustus 1962

Pada kedjadian jang penuh dengan makna penting ini, pada saat persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai hari depan Irian Barat akan ditandatangani, saja terlebih dahulu ingin rnengutjapkan selamat kepada kedua pemerintah terhadap kesediaan mereka untuk menjelesaikan hal ini dengan djalan perundingan dan djuga terhadap semangat mereka untuk berdamai jang telah memungkinkan penjelesaian persetudjuan ini.

Saja yakin bahwa adalah benar djika saja mengatakan bahwa sebagai hasilnja tidak sadja akan ada keredaan ketegangan didaerah itu akan tetapi djuga bertambahnja perasaan saling pertjaja mempertjajai antara kedua pemerintah. Adalah suatu alamat baik bahwa dengan ditanda tangannja Persetudjuan ini. Bahwa hubungan mereka dikemudian hari akan didjiwai oleh persahabatan, pengertian dan keramahan jang telah terdapat selama perundingan ini.

Saja ingin djuga mengambil kesempatan ini untuk menegaskan pada umum terima kasih saja kepada Duta Besar Ellsworth Bunker jang telah bertindak atas nama saja selama perundingan-perundingan pendahuluan antara kedua pemerintahan dan jang selama perundingan-perundingan pendahuluan antara kedua pemerintahan dan jang kesabarannja, ketulusannja dan ketangkasan diplomatiknja telah memberikan sumbangan begitu besar untuk tertjapainja persetudjuan ini dengan sukses.

Persetudjuan ini mempunjai beberapa unsur-unsur jang unik.

Pertama ialah, bahwa apabila Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukungnja, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertama kali dalam sedjarahnja akan mempunjai kekuasaan eksekutif sementara (dibentuk oleh dan dibawah yurisdiksi Sekretaris Djenderal) atas suatu daerah jang sangat luas.

Jang lain ialah, bahwa seluruh beaja jang diperlukan atas dasar persetujuan ini, akan dipikul oleh kedua pemerintahan dan tidak akan memberi beban pada lain negara anggauta manapun.

Pada Sekretaris Djenderal dan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diberi tugas-tugas eksekutif jang tidak ketjil, beberapa diantaranya sudah harus dilakukan, untuk kepentingan perdamaian dan keamanan sebelum dan sambil menunggu persetudjuan Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.

Saja dan kolega-kolega saja akan berusaha keras untuk memenuhi kewadajiban-kewadajiban ini sekuat tenaga kami.

Djika kewadajiban-kewadajiban ini hendak dilaksanakan setjara memuaskan bagi semua pihak, maka saja memerlukan kesediaan kerdjasama dari kedua pemerintah, terutama selama masa peralihan.

Saja berharap bahwa tugas saja akan dipermudah dengan ikut serta jang sungguh-sungguh dari kedua pemerintah sesuai dengan kata dan semangat persetudjuan ini. Tanpa demikian kewadajiban saja akan mendjadi sangat sukar, dan saja sungguh minta kepada kedua pemerintah untuk memberikan kerdjasama meraka jang sebesar-besarnja kepada kami.

Achirnja saja ingin sekali lagi memberi selamat kepada wakil-wakil kedua pemerintah pada saat akan ditanda tanganinja persetudjuan jang bersedjarah ini jang, sesuai dengan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menjelesaikan setjara damai suatu persoalan jang telah berlarut-larut, dengan menguntungkan semua fihak.

**PIDATO DR. SUBANDRIO, WAKIL INDONESIA, PADA UPATJARA
PENANDATANGANAN PERSETUDJUAN ANTARA
NEDERLAND DAN INDONESIA**

15 Agustus 1962

Bagi rakyat Indonesia saat ini dipandang sebagai kejadian nasional yang sangat penting karena dengan penanda tanganan persetudjuan ini kesatuan Indonesia telah dipulihkan kembali dan karena itu telah diselesaikan dasar bagi perjoangan kemerdekaan sebagai bagian daripada revolusi Indonesia.

Oleh karena itu kami merasa sangat puas. Tuan Sekretaris Djenderal, bahwa Tuan sudah mengambil inisiatip dalam bulan Desember agar kedua belah pihak bertemu untuk memetjahkan masalah ini setjara damai.

Sambutan yang positif dari pihak Indonesia dan pihak Nederland terhadap adjakan-adjakan Tuan sungguh-sungguh itu berhasil dalam persetudjuan yang baru sadja kami tandatangani.

Bimbingan Tuan selama perundingan berdasarkan kedjudjuran, kebidjaksanaan dan pengalaman telah memungkinkan kita untuk mengatasi dengan sukses segala seluk-beluk penjelesaian memulai perundingan ini. Untuk itu. Perintah serta rakyat Indonesia akan sangat berterima kasih kepada Tuan.

Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia saja djuga ingin mengutjapkan terimakasih kami yang tulus ichlas, atas segala usaha yang tak kenal djemu dan kesabaran daripada Duta Besar Bunker agaknya merupakan hal yang tidak mungkin mentjapai perumusan satu persetudjuan dalam djangka waktu yang singkat.

Saja djuga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menutjapkan selamat kepada Dr. van Roijen, Dr. Schurmann dan semua anggauta delegasinja atas berhasilinja persetudjuan ini dan atas nama kolega-kolega saja dan saja sendiri, saja ingin melahirkan penghargaan kami yang besar terhadap semangat yang tulus ichlas yang senantiasa ada pada mereka dalam menghadapi masalah-masalah yang harus kita petjahkan.

Dan achirnja, Tuan Sekretaris Djenderal, penghargaan kami yang sebesar-besarnja terhadap kolega-kolega Tuan dalam Sekretaris yang dengan kebaktian dan bantuan yang tak kundjung putus telah mendjamin tertjapainja hasil ini.

Sukses daripada persetudjuan ini yang djuga merupakan sukses dari Perserikatan Bangsa-Bangsa saja harap akan menudju kearah hasil-hasil yang lain dalam mentjari penjelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekarang setelah persetudjuan ini ditanda tangani, sekarang pada waktu kesatuan Indonesia sedang menudju penjempurnaannja saja harap dengan sungguh-sungguh bahwa persahabatan lama antara Indonesia dan Nederland dapat dipulihkan.

Terima kasih.

**PERNJATAAN OLEH DR. J.H. VAN ROIJEN, WAKIL NEDERLAND,
PADA UPATJARA PENANDATANGANAN PERSETUDJUAN
ANTARA INDONESIA DAN NEDERLAND**

Kita sedang mengalami saat-saat yang terdjadi itu sependajang waktu yang tertjatat dimana arah daripada dua bangsa mungkin mengalami perobahan yang menentukan. Pada penandatanganan persetudjuan yang terletak didepan kita ini sengketa antara Nederland dan Indonesia mengenai Irian Barat, satu sengketa yang sudah berdjalan terlalu lama, akan diselesaikan.

Sependajang perundingan yang lama dan kadang-kadang sukar yang mendahului tertjapainja persesuaian fikiran antara kedua pemerintah kami, delegasi Nederland selalu menginsafi benar-benar kepentingan daripada masalah-masalah yang bersangkutan. Akan tetapi yang paling berat mendjadi fikiran bagi kami adalah pertimbangan bahwa hasil daripada usaha kita itu setjara langsung akan mempengaruhi nasiib daripada 700.000 rakjat Irian barat.

Pemerintah Nederland dulu dan sekarang djuga sangat memperhatikan kesedjahteraan rakjat Irian Barat. Itulah sebabnja Nederland pertama² mementingkan bahwa dalam perstudjuan dimaksud ketentuan² yang mendjamin kemadjuan selandjutnja daripada wilayah Irian Barat dan penduduknja dalam lapangan politik, ekonomi, kebudajaan dan pendidikan dan mendjamin untuk rakjat Irian Barat, dibawah pengawasan yang aktif daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelaksanaan kebebasan memilih mengenai hari kemudiannja yang sungguh-sungguh dan berbahagia.

Kami ingin mengutjapkan terima kasih, Tuan Sekretaris Djenderal, atas inisiatip Tuan untuk mempertemukan kedua belah fihak dan untuk peranan Tuan yang tidak terhingga dalam mentjapai penjelesaian daripada persoalan-persoalan kaim. Kami harp kerelaan Tuan untuk meneruskan rasa terima kasih kami djuga kepada anggauta-anggauta Staf Tuan atas bantuan dan nasehat mereka yang sangat kami perlukan.

Kepada Duta Besar Ellaworth Bunker saja ingin mengutjapkan penghargaan kami yang sungguh-sungguh atas usahanja yang penuh dengan kesabaran dan tidak djemu-djemu. Saja merasa berhutang budi atas tjara yang tidak berat di Huntland Estate di Middleburg.

Telah ternjata sukar, dan barangkali, Tuan Sekretaris Dejnderal, saja malahan harus menjatakan kadang-kadang lebih daripada sukar untuk mempertemukan delegasi-delegasi Nederland dan Indonesia. Akan tetapi setelah kita duduk sekitar medja perundingan ternjata pada kami bahwa delegasi Indonesia dan kami sendiri dengan sungguh-sungguh telah sama-sama terikat untuk mentjapai penjelesaian setjara damai daripada sengketa kami.

Tuan Sekretaris Djenderal, kini kami telah menguraikan penjelesaian jang terperintji diatas kertas. Penilaian sedjarah atas apa jang telah kami tjapai pada achirnja akan bergantung pada tjara-tjara bagaimana ketentuan-ketentuan daripada persetudjuan kami akan dilaksanakan dalam prakteknja. Seluruh dunia telah mengamat-ngamati kami dengan seksama; itu akan berlangsung terus.

Kini telah ditanam dasar-dasar, itu harapan kami, untuk pengertian jang lebih baik dan pada achirnja hubungan jang lebih menjenangkan dan berfaedah antara kedua negara dan kedua bangsa. Untuk kemungkinan tertjapainja perwudjudan harapan ini, jang merupakan ukuran adalah ketulusan jang timbal balik dan usaha jang terus menerus dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan persetudjuan ini.

PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO - PADA SIDANG DMP KABUPATEN MERAUKE.

Dengan didahului utjapan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, Gubernur menjatakan bahwa peristiwa ini akan tertjatat dalam lembaran sedjarah kehidupan Bangsa Indonesia. Sebagai Gubernur Kepala Daerah, sebagai seorang putra daerah dan lebih-lebih sebagai seorang tua, Gubernur merasa perlu untuk menghadiri dan mengeluarkan satu dua patah kata dalam Sidang Musjawarah PEPERA ini.

Beliau mengungkapkan sedjarah terdjadinja Persetudjuan New York dengan menjatakan Rakjat Irian Barat tidak tahu menahu tentang Persetudjuan itu. Perdjjuangan Rakjat Irian Barat sedjak dahulu kala menuntut kemerdekaan bersama-sama sebangsanja dan setanah air dari daerah-daerah Indonesia lainnja. Dikatakan bahwa Dinas Penerangan Propinsi Irian Barat telah mengeluarkan Buku Putih tentang Perdjjuangan Rakjat Irian Barat menegakkan kemerdekaan.

Buku tersebut berdjjudul Semangat Proklamasi 1945 berkobar di Irian Barat. Banjak diantara Anggota Dewan Musjawarah PEPMA telah ikut dan mengalami sendiri Perdjjuangan tersebut, bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan jaitu pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945 Rakjat Irian Barat telah menjanjikan Lagu Indonesia Raya sebagai lagu Kebangsaan.

Rakjat sendiri telah mengganti nama Papua mendjadi Irian sebagai perwujudan semangat perdjjuangan, perdjjuangan mentjapai tjita-tjita Indonesia Merdeka dari Sabang sampai Merauke. *(Tepuk tangan riuh oleh para Anggota Dewan Musjawarah),*

Telah mendjadi kenjataan bahwa sedjak pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Irian Barat, telah ada kenjataan-kenjataan tentang kemandjuan rakjat dan daerah ini. Pendidikan rakjat sudah madju, puluhan bahkan ratusan Sekolah-sekolah untuk rakjat didirikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Universitas.

Kepertjajaan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan pada putra-putra daerah, dalam bidang pemerintahan dan

sebagainja adalah hal jang tidak pernah terdjadi dalam pendjadjahan. dikatakan mungkin rakjat belum seluruhnja merasa puas akan kemadjuan-kemadjuan jang telah ditjapai itu, tetapi Pemerintah Republik Indonesia jang baru 6 tahun setjara riil melaksanakan missinja di Daerah Irian Barat, benar-benar telah membawa kemadjuan jang pesat. *(Tepuk tangan riuh).*

Sebagai seorang tua, Gubernur menjatakan bahwa alam Kemerdekaan Republik Indonesia inilah jang membawa kemadjuan bagi Rakjat Irian Barat sebagai satu Bangsa dalam Negara Republik Indonesia. Maka dari itu pertanjaan jang akan diadjukan pada Sidang Dewan Musjawarah PEPERA ini sebenarnja tidak perlu ditanjakan lagi. Pertanjaan itu datangnya dari Persetudjuan New York dan bukan dari Rakjat Irian Barat sendiri jang telah berdjuang menegakkan Kemerdekaan Indonesia bukan dari Pernerintah Republik tapi dari pihak luar, tanpa pengetahuan kita Rakjat Irian Barat. Sudah tentu bagi rakyat jang mengerti sedjarah perdjungan bangsa djawaban jang tepat atas pertanjaan jang akan diadjukan adalah KITA TETAP INGIN MERDEKA DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE. *(Tepuk tangan riuh).* Kita harus tetap setia kepada Bendera Merah Putih jang telah berkibar di Irian Barat sedjak lama, sebagai tanda Kemerdekaan kita semua, dan Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Maka saudara-saudara sebagai anggota Dewan Musyawarah PEPERA, supaja mengerti betul-betul duduk perkara didalam PEPERA ini dan memberikan djawaban jang tepat dan baik, jang bertanggung djawab bagi hari depan daerah ini sebagai daerah jang telah bersatu dalam kemerdekaan Tanah Air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. *(Tepuk tangan riuh).*

Rakjat Irian Barat telah mengeluarkan pernjjataan-pernjjataan jang menjatakan bahwa Irian Barat adalah mutlak Daerah Republik Indonesia dan Rakjat Irian Barat tidak mau dipisah-pisahkan. Banjak diantara Anggota-anggota Dewan Musjawarah djuga telah ikut mengeluarkan pernjjataan-pernjjataan itu. Memang tidak ada Negara lain bagi kita dari pada Negara Republik Indonesia jang telah merdeka dan berdaulat. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah kita

sendiri dan hanya kepada Pemerintah Republik Indonesia masa depan Rakjat Irian Barat seluruhnya dapat kita pertajjakan. (*Tepuk tangan riuh*).

**PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA -
SUDJARWO TJONDRONEGORO SH. - PADA SIDANG
DMP KABUPATEN MERAUKE.**

SUDJARWO TJONDRONEGORO SH dalam kesempatan ini antara lain menjatakan bahwa sebagaimana telah dikatakan oleh Ketua dan Bapak Gubernur, maka Sidang Dewan Musjawarah PEPERA ini adalah sangat penting.

Anggota-anggota Dewan Musyawarah ini telah dipilih oleh rakjat untuk mewakili mereka semua dalam penentuan pendapat ini, mengambil keputusan yang sangat penting bagi Rakjat Irian Barat dan bagi Negara Republik Indonesia. Mengapa Rakjat Irian Barat harus mengambil Keputusan ini, harus melaksanakan PEPERA ini sudah seringkali diterangkan oleh Pemerintah. Kita mengadakan PEPERA karena adanya Persetujuan Indonesia-Belanda pada tahun 1962. Adapun pertanyaan dalam PEPERA ini ialah:

„Apakah saudara-saudara Rakjat Irian Barat, ingin tetap berada didalam Republik Indonesia atau tidak”.

(Pertanyaan SUDJARWO TJONDRONEGORO SH ini dijawab oleh semua Anggota Dewan Musjawarah setjara serentak) „tetap dalam Republik Indonesia” (*tepuK tangan riuh*).

Mengapa harus ada pertanyaan ini ?

Bagi Pemerintah Republik Indonesia Irian Barat adalah bagian mutlak dari Negara Republik Indonesia. Daerah ini sudah merupakan satu Propinsi dengan Gubernurnya Bapak FRANS KASAPO. Sebenarnya pertanyaan itu bukan buatan Indonesia, melainkan buatan pihak lain, waktu itu pihak Belanda dalam perundingan tahun 1962. Maka tidak heran kalau Pemerintah Indonesia selama ini telah menerima pernyataan-pernyataan golongan Rakjat Irian Barat, yang menjatakan bahwa pertanyaan dalam PEPERA adalah pernyataan yang aneh,

pertanyaan yang mereka tidak mengerti, yang mereka anggap tidak perlu, sehingga mereka sampai menentang diadakannya PEPERA ini. Pernyataan-pernyataan ini juga dihadapi oleh Pemerintah hasil Musjawarah tanggal 27 dan 28 Maret 1969. Dengan demikian telah diwujudkan suatu integritas dari segala unsur yang ada terbagi setjara diperintji sebagai berikut:

1. Unsur tradisional	89 orang
2. Unsur regional	74 orang
3. Unsur Papol/Ormas/Golongan	12 orang
Djumlah	175 orang

yang semuanya memenuhi syarat-syarat pasal 18 ayat d Persetujuan New York dan mewakili 165.000 penduduk Kabupatén Djajawidjaja.

"Sidang yang terhormat.

Meskipun dengan kesulitan-kesulitan yang telah dikemukakan di atas, semua wakil-wakil rakyat ini telah dapat tiba di Wamena hanya semata-mata untuk melaksanakan PEPERA yang diminta oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Mereka telah dilantik sebagai Anggota DMP dengan resmi pada tanggal 14 Djuli 1969. Sidang ini akan bermusjawarah dengan Pemerintah Pusat untuk menjawab pertanyaan dari Persetujuan New York. Kami minta sidang yang terhormat untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang nanti ditanyakan oleh Pemerintah Pusat serta menjaga tata tertib sidang.

"Sidang yang terhormat.

Disini hadir juga bapak ORTIZ SANZ sebagai utusan Sekdjen PBB untuk menjaksikan Pelaksanaan PEPERA ini.

"Sidang yang terhormat.

Sebelum kami sudahi sambutan kami ini, maka kami ingin menjatakan disini kepada Team Pemerintah Pusat bahwa Anggota-Anggota ini adalah wakil-wakil rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat dan telah siap untuk melaksanakan PEPERA di daerah ini setjara demokratis musjawarah.

Sekian, terima kasih.

**PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO - PADA SIDANG DMP
KEBUPATEN DJAJAWIDJAYA**

Saudara Ketua Sidang Dewan Musjawarah PEPERA Jth.;
Bapak Menteri Dalam Negeri;
Bapak Menteri Luar Negeri;
Bapak Menteri Penerangan;
Bapak-bapak Anggota DPR1-GR, MPRS, DPA;
Wakil Sekdjen PBB Tuan Ortiz Sanz;
Rekan-rekan dari Pemerintah Daerah;
Para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA selaku wakil-wakil
rakjat jang saja muliakan;
dan semua hadirin jang terhormat,
Pimpinan Sidang jang kami hormati,
Pada hari ini, kita semua berkumpul disini, di Wamena, Banjak
tamu-tamu jang hadir dalam ruangan ini.

Tentunja saudara-saudara telah mengetahui, mengapa peristiwa
hari ini banjak menarik perhatian tamu-tamu kita.

Maka saja sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat
djuga sebagai orang tua dan bapak Rakjat Irian Barat merasa perlu
untuk berbitjara disini, memberikan sepatah dua patah kata.

Bapak Menteri Dalam Negeri jang hadir dihadapan kita, Bapak
Sudjarwo dan rombongan jang bertindak sebagai Wakil Pemerintah
Republik Indonesia, ingin menanyakan kepada saudara-saudara
sekalian anggota Dewan Musjawarah PEPERA Kabupaten
Djajawidjaja ini, apakah saudara-saudara ingin tetap merdeka dalam
keluarga besar Republik Indonesia atau tidak.

Pertanjaan ini berdasar pada Perdjangjian New York, 15 Agustus
1962 dimana Rakjat Irian Barat sebenernja tidak tahu menahu.
Pertanjaan ini bukan berasal dari rakjat, djuga dari Pemerintah
Republik, tapi dari pihak luar, jang tidak suka melihat saudara-saudara
hidup bahagia, senang dan tenteram bersama-sama dengan saudara-
saudara kita di Daerah Indonesia lainnja.

Pemerintah Republik jang baru 6 tahun mengurus Irian Barat giat
berusaha, memberi kemadjuan, memberi kebahagiaan kepada

rakjatnja. Pemerintah senantiasa berusaha memperhatikan kepentingan Rakjat, mengusahakan kemakmuran, rakjat tetap sehat dan kuat.

Djadi sebenarnja jang paling penting buat rakjat ialah pembangunan. Djadi setelah PEPERA ini selesai, dan kita tetap bersatu dalam Negara Republik Indonesia, jang berwilajah dari Merauke sampai Sabang, kita masih terus akan membangun dan bekerdja.

Beratus-ratus tahun kita dibawah pemerintahan djadjahan, dan selama itu kita semua masih tetap dalam keadaan sederhana dan terbelakang, hidup tergantung sepenuhnya pada alam.

Kemerdekaan telah kita tjapai dalam Negara Republik Indonesia sedjak 17 Agustus 1945. Kita sudah mendjadi suatu keluarga jang besar.

Keluarga Bangsa Indonesia. Dan kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Pemerintah dengan sungguh-sungguh telah berusaha memajukan Rakjat.

Malah Pembangunan di Irian Barat dan dipegunungan ini mendapat perhatian jang besar.

Para Anggota Dewan jang terhormat.

Saudara-saudara disini adalah bertindak sebagai wakil dari rakjat di daerah Kabupaten Djajawidjaja, karenanja nanti kalau saudara-saudara harus mendjawab pertanyaan jang diadjukan kepada saudara perhatikan benar-benar kepentingan rakjat.

Saudara harus menjuarakan suara rakjat jang saudara-saudara wakili. Saja yakin babwa masa depan Rakjat Irian Barat hanja terdjamin didalam lingkungan keluarga Besar Bangsa Indonesia.

Saja yakin bahwa saudara-saudara telah mengenal dan mentjintai Merah Putih, dan karena itu saja yakin satu keluarga Indonesia dari kita tidak ingin dipisah-pisahkan lagi seperti jang telah diputuskan dalam Sidang Dewan Musjawarah PEPERA di Kabupaten Merauke pada tanggal 14 Djuli 1969.

Sekian, terima kasih, semoga Tuhan tetap bersama kita.

Selamat bermusjawarah.

**PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA
SUDJARWO TJONDRONEGORO SH - PADA SIDANG
DMP KABUPATEN DJAJAWIDJAJA.**

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Musjawarah jang saya muliakan,

Hadirin sekalian jang saya hormati.

Saja adalah utusan dari Pemerintah Pusat, jang mungkin saudara telah banjak mengenal nama saja SUDJARWO . Sebetulnja saja telah sering datang didaerah pegunungan ini dan banjak diantara saudara-saudara saja sudah djumpai dari dahulu. Saja pernah mengundjungi Hitigima, Maki, Bokondini, Piramid, Tiom, Karubaga dan lain-lain daerah saudara, hanja Oksibil mungkin lain kali. Saja selalu senang mengundjungi daerah ini, karena rakjatnja ramah tamah, hawanja baik dan pemandangan alam adalah baik sekali. Bahkan saja ingat 6 tahun jang lalu saja mendapatkan hadiah seekor babi dari bapak HUKUM HIARIK dari Hitigama, saja senang sekali. Saja senang lihat, banjak kawan-kawan telah dipilih setjara sjah oleh rakjatnja telah siap melaksanakan PEPERA setjara demokratis musjawarah.

Sekian dan terima kasih.

**PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO - PADA SIDANG DMP
KABUPATEN PANIAL.**

Jth. Saudara Ketua Sidang Dewan Musjawarah PEPERA,
Bapak Menteri Dalam Negeri,
Bapak Menteri Luar Negeri,
Bapak Menteri Penerangan dan
Bapak-bapak Anggota DPR-GR, MPRS, DPA,
Wakil Sekdjen PBB Tuan Ortiz Sanz,
Bapak-bapak dari Pusat dan rekan-rekan dari Pemerintah Daerah,
Para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA selaku wakil-wakil rakjat jang saya muliakan dan semua hadirin jang terhormat.
Pimpinan Sidang jang kami hormati,

Dengan memandjatkan do'a sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa atas Rachmatnja maka hari ini kita dapat berkumpul di Nabire

untuk melangsungkan Sidang Dewan Musjawarah PEPERA Kabupaten Paniai.

Peristiwa penting ini akan tertjat dalam lembaran sedjarah perdjungan Rakjat Daerah Irian Barat ini pada chususnja dan Rakjat Indonesia pada umumnja.

Oleh karena saja sebagai Gubemur Kepala-Daerah jang bertanggung djawab atas kelantjaran djalannja Pemerintahan di Propinsi Irian Barat pula sebagai *orang tua*, bapak rakjat daerah ini, merasa perlu untuk berbitjara dari hati kehati dengan saudara-saudara sekalian para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA pula sebagai wakil-wakil rakjat Daerah Kabupaten Paniai ini.

Sidang jang saja muliakan.

Dihadapan saudara-saudara sekalian hadir bapak Menteri Dalam Negeri, AMIR MACHMUD beserta bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH jang bertindak sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Persetudjuan New York tanggal 15 Agustus 1962.

Berdasarkan atas perdjandjian itulah nanti saudara-saudara akan ditanyakan apakah kita Rakjat Irian Barat ingin tetap merdeka dalam keluarga besar Indonesia atau tidak, djuga bukan berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, tetapi berasal dari luar.

Rakjat Irian Barat sendiri tidak mengetahui tentang adanya perdjandjian tersebut karena pada waktu perdjandjian itu dibuat, rakjat Irian Barat tidak diikut sertakan sehingga banjak rakjat jang tidak tahu menahu.

Bapak sebagai orang tua telah bangkit sebelum Proklamasi untuk dapat merdeka bersama-sama dengan saudara-saudaranja dari Daerah Indonesia lainnja.

Djadi Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah djuga merupakan Proklamasi Kemerdekaan Rakjat Irian Barat jang merupakan bagian dari Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke,

Tjontoh-tjontoh dari perdjungan rakjat banjak sekali dan Bapak sungguh-sungguh merasa sangat terharu karena pada tiap-tiap Kabupaten seperti Merauke, Wamena dan sekarang ini di Paniai dimana wakill-wakil rakjat jang terdiri atas tokoh-tokoh masjarakat,

Kepala kepala Suku, Kepala Adat dari golongan Parpol/Ormas dari seluruh pendjuru dari Daerah Kabubaten tersebut berkumpul.

Ada jang datang dari Ilaga, Paniai, Mulia, Tigi, daerah sekitar Nabire ini berkumpul, makan bersama-sama, duduk bersama-sama dalam suasana damai tenteram, penuh rasa persaudaraan, kelihatan penuh rasa tanggung djawab akan tugasnja, sungguh hal seperti ini belum pernah terdjadi selama masa pendjadjahan dahulu.

Perlu saudara-saudara ketahui bahwa rakjat dari kedua Kabupaten Merauke dan Wamena jang seluruhnja berdjumlah 310 atau djiwa telah menjatakan tekadnja dan memutuskan dalam Sidang Dewan Musjawarah PEPERA untuk tetap merdeka didalam lingkungan Republik Indonesia dan tidak mau dipisahkan lagi dan apa jang selalu kita perdjauangkan bagi tetap utuhnja wilajah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendjadi suatu kenjataan jang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan oleh Negara manapun didunia ini.

Ketika saja datang di Kabupaten ini saja melihat dimana-mana terpantjang Bendera Sang Merah Putih, didada saudara-saudara sekalian tersemat pula Sang Merah Putih. Dan ini semua menandakan bahwa saudara-saudara sekalian mentjintai Sang Merah Putih, dengan demikian mejakinkan saja bahwa saudara-saudara djuga mentjintai Republik Indonesia.

Hal ini dapat saja mengerti karena saudara-saudara tentu jakin bahwa hanja dalam Negara Republik Indonesia, maka kesedjahteraan dan kemakmuran rakjat dapat dipertjajakan.

Selama 6 tahun ini kita sekalian telah menjaksikan sendiri usaha-usaha dari Pemerintah Republik Indonesia dalam memadjukan rakjatnja.

Beribu-ribu guru sekolah diberikan kepada rakjat Irian Barat supaja Rakjat Irian Barat dapat bersekolah, bahkan sampai Sekolah Tinggi pun didirikan di Irian Barat ini.

Keptertjaan Pemerintah Republik Indonesia benar-benar membesarkan hati kami, terutama dalam bidang pemerintahan jang menjerahkan djabatan dalam bidang Pemerintahan kepada Putra Daerah, sungguh tidak mungkin terdjadi pada masa pendjadjahan dahulu.

Saudara-saudara Anggota Dewan Musjawarah PEPERA jang mulia,

Kita semua adalah rakjat pedjuang, djadi harus setia kepada Merah Putih, setia kepada Republik Indonesia jang telah kita perjuangkan bersama, Saudara-saudara adalah wakil rakjat, jang dipilih dari rakjat dan oleh rakjat, karenanja harus berbuat sesuai dengan kehendak rakjat jang saudar-saudera wakili.

Dalam pernjjataan-pernjataan rakjat dari daerah Kabupaten Paniai jang telah Bapak terima antara lain berisikan bahwa rakjat Kabupaten Paniai ingin tetap „MERDEKA” dan „BERSATU” dalam Negara Republik Indonesia karenanja saudara-saudara Anggota DMP sebagai wakil rakjat harus menjuarakan tuntutan rakjat banjak jang sudah tertjantum dalam pernjjataan-pernjataan tersebut.

Kita telah merdeka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita tetap satu dengan Republik Indonesia serta tidak akan berpisah lagi untuk selama-lamanja.

Tuhan beserta kita dan selamat bermusjawarah.

Sekian, terima kasih,

PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA - SUDJARWO SH - PADA SIDANG DMP KABUPATEN PANIAI.

Saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota Dewan Musyawarah PEPERA Jang saja muliakan,

Hadirin sekalian jang saja hormati.

Saja adalah dari Pemeritah Pusat dan nama saja SUDJARWO.

Saja ikut bersyukur bahwa pada hari ini, sesuai rentjana, dapat disidangkan DMP Kabupaten Paniai dihadiri oleh segenap anggota-anggotanja dari seluruh daerah Kabupaten Paniai di Nabire ini.

Pembentukan DMP ini melalui Pemilihan-Pemilihan wakil-wakil rakjat didaerah pegunungan jang luas ini sudah tentu tidak mudah seperti jang tadi ditjeritakan sedikit didalam Pidato Pembukaan Saudara Ketua.

akan dihantjurkan oleh Rakjat, begitu pula gerakan separatis akan ditindass/digilas oleh rakjat.

Selandjutnja bahwa ikrar anggota DMP pada tanggal 7 Djuli 1969 Irian Barat akan tetap mempertahankan Daerah Irian Barat dalam wilajah Republik Indonesia dan mendjaga keutuhan Bangsa, Negara dan Tanah Air.

Begitu pula akan tekad anggota-anggota DMP pada tanggal 16 Djuli 1969, djam 24.00 di Makam Pahlawan Lembah Onim bahwa anggota-anggota DMP akan melanjutkan perdjjuangan tjita-tjita para arwah Pahlawan jang telah gugur mendahului kita demi untuk membebaskan Rakjat dan Daerah Irian Barat dari pendjaddjahan dan mempertahankan keutuhan Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke.

Saja mengharapkan agar ikrar dan tekad jang telah ditjetuskan selalu mendjiwai dalam Musjawarah Penentuan Pendapat Rakjat.

PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINISI IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO - PADA SIDANG DMP KABUPATEN FAK-FAK.

Pada kesempatan ini FRANS KAISIEPO menjampaikan pidatonja tidak sadja sebagai Gubernur tetapi djuga sebagai putera daerah.

Sesudah mengutjapkan Sjukur kepada Tuhan Jang Maha Kuasa, beliau menjatakan bahwa peristiwa ini merupakan puntjak bagi perdjjuangan Bangsa Indonesia dalam mewudjudkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, jang akan mendjadi warisan bagi anak tjutju kita. Saja sebagai Gubernur dan orang tua diwilajah ini berbitjara dari hati ke hati dengan seluruh anggota-anggota DMP, berdasarkan pengalaman bekerdja jang lebih dari 4 tahun di daerah Kabupaten Fakfak ini di masa pendjaddjahan dulu, saja sudah mengenal apa jang mendjadi isi hati dari pada rakjat disini termasuk isi hati sebagian besar para anggota DMP ini, jaitu: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke jang sebenarnja tjita-tjita itu sedjak tanggal 17 Agutus 1945 sudah tertjapai. Djadi kehadiran para anggota DMP disini adalah

untuk bermusjawarah dalam rangka Pelaksanaan Persetudjuan New York semata-mata dimana nantinja Pemerintah Pusat akan menanyakan apakah Rakjat Irian Barat ini akan tetap dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataukah tidak. Walaupun pertanyaan ini sebenarnja tidak simpatik, namun harus disadari bahwa pertanyaan ini bukan berasal dari Rakjat Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia, melainkan karena Pemerintah terpaksa oleh adanya ikatan Persetudjuan New York.

Kemerdekaan Indonesia tidak sadja diperdjuangkan oleh Rakjat Indonesia diluar Irian Barat, bahkan djuga oleh Rakjat Irian Barat sendiri. Oleh sebab itu Irian Barat adalah bagian mutlak dari Republik Indonesia. Bukti-bukti dari perdjuangan Rakjat Irian Barat antara lain semasa pendjadjahan banjak putra-putra Irian Barat jang berkenalan dengan rumah-rumah pendjara. Setelah saja mengikuti Sidang-Sidang DMP di Kabupaten Merauke, Djajawidjaja dan Paniai, dimana telah diputuskan dengan tegas untuk tetap bersatu dengan Republik Indonesia dengan penuh semangat, maka saja yakin saudara-saudara anggota DMP Kabupaten Fakfak ini pun akan mengikuti keputusan seperti halnja ditiga Kabupaten tersebut karena saja melihat semangat rakjat Kabupaten Fak-Fak inipun tidak berbeda dengan ditiga Kabupaten tersebut.

PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA SUDJARWO TJONDRONEGORO SH - PADA SIDANG DMP KABUPATEN FAK-FAK.

Saudara-saudara para anggota DMP dan para hadirin jang saja hormati.

Pertama-tama saja mengutjapkan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa atas berlangsungnja rapat ini dan penghargaan kepada petugas penjelenggara jang diketahui oleh saudara Bupati A.S. ONIM dan kepada anggota-anggota DMP jang dengan menempuh perdjalanana jang sulit meninggalkan kampung halaman untuk menghadiri Sidang ini tepat pada waktunja. Kita masih ingat situasi pada waktu pelaksanaan konsultasi antara Team Pemerintah Pusat dengan DPRD Fakfak ini tanggal 3 April jang lalu. Betapa sulitnja Team Pemerintah

Pusat, untuk mendapatkan persetujuan DPRD Fakfak untuk merencanakan pelaksanaan PEPERA. Boleh dikatakan semua pembijaraan menentang dilaksanakannya PEPERA, karena pertanjaan didalam PEPERA menurut Perdjandjian New York adalah sama sekali tidak wajar.

Sesuai dengan permusjawaratan kita waktu itu, sekarang telah terbentuk DMP dan memang DMP inilah yang setjara final harus menentukan pendapat rakjat tentang apa yang ditanjakan dalam Persetujuan New York yang telah saudara-saudara ketahui, yakni: apakah saudara-saudara Rakjat Irian Barat, tetap ingin dalam Kesatuan Republik Indonesia, ataukah tidak ?"

At Impera masa pendjadjahan telah mengalami banjak ketinggalan di semua bidang, baik Pendidikan, Kebudayaan, Pertanian, Pembangunan dan lain-lainnya.

Oleh karena itu sangat tepat apa yang dikatakan bahwa PELITA lebih penting dari pada PEPERA maka kami pertjaja PEPERA akan sukses seluruhnya memang Rakjat Irian Barat sangat haus akan pembangunan dengan demikian maka sudah sewadjarnya rakjat di daerah ini mengutjapkan banjak-banjak terima kasih kepada Pemerintah kita yang telah tegas meletakkan Pola Pembangunan Lima Tahun termasuk Irian Barat, agar Irian Barat setarap dengan daerah-daerah Indonesia lainnya.

Rakjat Irian Barat pada umumnya dan Rakjat Kabupaten Sorong tiada chususnja telah mempunjai tekad dan semangat untuk membangun sesuai dengan garis kebidjaksanaan Pemerintah Pusat.

Bapak-bapak sekalian yang kami hormati.

Chusus kami tudjukan kepada saudara-saudara Dewan Musjawarah Penentuan Pendapat Rakjat Daerah Kabupaten Sorong yang kami hormati, kami tekankan hendaknya saudara-saudara benar-benar dalam Sidang PEPERA yang kita muliakan ini menggunakan hak, pendapat dan suara saudara-saudara yang membawakan suara tuntutan hati nurani rakjat dan golongan yang saudara-saudara wakili.

Selamat Bersidang dan Selamat Berdjuang.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memberikan RachmadNja, Bimbingan dan Tuntutan agar Sidang yang kami muliakan ini berdjalan

dengan lantjar, tertib, aman dan menghasilkan keputusan-keputusan jang bermanfaat.

Sekian dan terima kasih.

PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO - PADA SIDANG DMP KABUPATEN SORONG.

Jth. Sdr. Ketua Sidang Dewan Muajawah PEPERA,

Jth. Bapak Menteri Dalam Negeri, Ketua Sektor Irian Barat, dan Ketua Team Pelaksana PEPERA dari Pusat,

Jth. Bapak-bapak Anggota DPR-GR,

JM. Wakil Sekdjen PBB Dr. ORTIZ SANZ,

Jth. Bapak-bapak dari Pusat dan rekan-rekan dari Daerah, Para ANggota Dewan Musjawarah PEPERA selaku wakil-wakil rakJat jang saja muliakan, setta para hadirin jang saja hormati.

Sidang jang saja muliakan,

Dengan diIringi do'a sjukur kehadiran Tuhan Jang Maha Kuasa atas Rachmat KaruniaNja bahwa kita pada hari ini dapat berkumpul dikota Sorong dalam keadaan selamat sedjahtera dan Sidang Musjawarah PEPERA dapat diselenggarakan tepat pada waktu jang telah ditentukan.

Tentulah saudara Anggota Dewan Musjawarah PEPERA Daerah Kabupaten Sorong ini telah mengetahui maksud dan tudjuannja di adakannja Musjawarah ini dari pendjelasan-pendjelasan para petugas daerah ini dan Saudara-saudara akan membuat sedjarah jang penting dari peristiwa ini jang akan dapat saudara-saudara tinggalkan untuk generasi-generasi jang akan datang jang sungguh-sungguh akan membanggakan sekalian anak tjutju kita nanti. Kebanggaan akan keteguhan perdjuaan serta kesetiaan saudara-saudara kepada hasil tjita-tjita perdjuaan kita, untuk membentuk masjarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke.

Karena pentingnja peristiwa ini maka saja sebagai Gubernur Kepala Dacrah Propinsi Irian Barat terlebih-lebih sebagai orang tua,

bapak rakjat daerah ini merasa perlu untuk menjampaikan satu dua patah kata dan berbitjara dari hati kehati dengan saudara-saudara sekalian para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA Daerah Kabupaten ini.

Hadir pula dihadapan saudara-saudara Bapak Menteri Dalam Negeri AMIR MACHMUD, jang disertai Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH dan pedjabat-pedjabat lainnja untuk bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indbnesia dalam rangka Pelaksanaan Persetudjuan New York jang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 1962.

Berdasarkan persetudjuan tersebut itulah nanti saudara-saudata para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA akan ditanjakan suatu pertanjaan :

„Apakah kita Rakjat Irian Barat ingin tetap merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang besar ini ataukah tidak”

Pada setiap Kabupaten jang telah dilangsungkannja Sidang Dewan Musjawarah PEPERA, Rakjat Kabupaten-kabupaten terebut sangat tertjengang dan heran akan pertanjaan tersebut bahkan sungguh-sungguh merasa tersinggung karena merasa bahwa kesetiaan rakjat akan Republik Indonesia jang sangat ditjintainja diragukan.

Tetapi saudara-saudara para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA djanganlah salah faham akan hal ini, karena djelaslah bahwa pertanjaan tersebut bukan berasal dari rakjat djuga bukan berasal dari Republik Indonesia tetapi berasal dari luar.

Saja jakin bahwa Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH sendiri merasakan keluhan saudara-saudara sekalian dan pada setiap kesempatan dalam Sidang Musjawarah PEPERA di Kahupaten-Kabupaten Wamena, Paniai dan Fak-Fak beliau selalu meminta maaf kepada rakjat karena harus terpaksa menanjakan pertanjaan jang menjinggung dan tidak simpatik ini.

Namun saudara-saudara hendaknja mengerti bahwa Pemerintah Republik Indonesia karena terikat pada Persetudjuan New York tersebut maka terpaksa harus melaksanakan PEPERA ini di Irian Barat.

Tentang Persetudjuan New York ini banjak Rakjat Irian Barat jang tidak tahu menahu karena ketika persetudjuan tersebut dibuat rakjat Irian Barat tidak diikut sertakan oleh Pemerintah djadjahan waktu itu.

Saja pernah bekerdja di Kabupaten ini selama 2 tahun jaitu di Distrik Inanwatan dan Teminabuan, karenanja suka dan duka saudara-saudara djuga merupakan suka duka saja puas, saja ikut menghadapi perdjuangan saudara-saudara sekalian Rakjat Irian Barat dalam merebut Kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari daerah lain Indonesia dari tangan pendjadjah.

Bukti-bukti tentang perdjuangan Rakjat Irian Barat banjak sekali bahkan saja tahu benar bahwa banjak diantara saudara-saudara jang sekarang ini duduk sebagai Anggota Dewan Musjawarah PEPERA telah ikut sendiri bersama-sama dengan banjak pemimpin Irian Barat dalam perdjuangan Kemerdekaan Indonesia jang maha dahsjat itu sehingga tidak takut menghadapi segala antjamana dari pihak pendjadjah.

Pemberontakan rakjat di Biak tanggal 14 Maret 1948 untuk melawan pendjadjahan serta pernajaan bersatu dalam perdjuangan Kemerdekaan Indonesia oleh putra-putra Irian Barat pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kampung Harapan Djajapun (dahulu Kota Nica) mengingatkan saja betapa hebat dan bergeloranja semangat djuang rakjat dari Sabang sampai Merauke.

Pada saat itu kita telah mengumandangkan lagu Indonesia Raya bersama-sama sebagai lagu perdjuangan Nasional kita dari seluruh rakjat Indonesia termasuk Irian Barat. Schingga Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah djuga milik dari pada rakjat Irian Barat karena rakjat Irian Barat djuga mempunjai andil dalam perdjuangan Kemerdekan Bangsa Indonesia.

Djadi djelaslah bagi kita bahwa Irian Barat telah merdeka sedjak tanggal 17 Agustus 1945 dan Irian Barat adalah bagian mutlak dari Wilajah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pada setiap Kabupaten jang telah melaksanakan Sidang Dewan Musjawarah PEPERA semakin meyakinkan kita akan kebenaran perjuangangan Rakjat Irian Barat djuga mempunjai andil dalam perjuangangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Djadi djelaslah bagi kita bahwa Irian Barat telah merdeka sedjak tanggal 17 Agustus 1945 dan Irian Barat adalah bagian mutlak dan wilajah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pada setiap Kabupaten jang telah melaksanakan Sidang Dewan Musjawarah PEPERA semakin meyakinkan kita akan kebenaran perjuangangan Rakjat Irian Barat jang tahan udji dan mendjadikan saja sangat bangga dan terharu.

Rakjat Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai dan Fak-Fak telah menjatakan dan menetapkan bahwa rakjat dan wilajah Irian Barat tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke.

Maka dengan demikian dapat saja djelaskan disini bahwa penduduk dari ke 4 Kabupaten tersebut jang berdjumlah 508 ribu djiwa jang telah menjatakan tekadnja dan memutuskan dalam Sidang Dewan Musjawarah PEPERA untuk tetap merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah telah meliputi lebih dari separo dari seluruh penduduk Irian Barat jang berdjumlah 800 ribu djiwa dari seluruh penduduk Irian Barat.

Para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA jang saja muliakan.

Ketika saja turundari kapal kedarat semakin meyakinkan diri saja akan kebenaran perjuangangan rakjat jang rindu akan persatuan dan kesatuan Indonesia. Dimana-mana saja menjaksikan gelora semangat rakjat dengan Merah Putih berkibar dengan megahnja.

Ini semuanya merupakan suatu tanda bahwa rakjat dan Daerah Kabupaten Sorong mentjintai Republik Indonesia dan dalam Sidang Musjawarah PEPERA ini saja ingin melihat bahwa saudata-saudara Para Anggota Dewan ini bergelora dan bersemangat sama dengan Para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA di Merauke, Wamena, Paniai dan Fak-Fak.

Hal ini benar-benar saja harapkan dan saudara-saudara pasti yakin bahwa hanya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kesedjahteraan dan kemakmuran rakyat serta kemajuan pembangunan dalam segala bidang dapat kita andalkan.

Selama 6 tahun ini kita sekalian telah menjaksikan sendiri betapa sungguh-sungguhnya Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk memajukan kehidupan dan penghidupan rakyat Irian Barat.

Sekolah-sekolah didirikan dimana-mana sampai ke pelosok-pelosok, usaha-usaha serupa dari swasta diberi bantuan subsidi bahkan sampai Perguruan Tinggi juga telah didirikan dan telah menghasilkan berpuluh Sardjana-Sardjana Muda. putra daerah Irian Barat, sungguh-sungguh hal ini tak akan terdjadi pada masa pendjadjahan dahulu.

Dalam bidang Pemerintahanpun Pemerintah Republik Indonesia memberikan kepertjajaan yang benar-benar membesarkan hati kami dimana djabatatan penting telah diserahkan, djabatatan tertinggi di Propinsi dan Kabupaten dalam Pemerintahan kepada putra-putra Irian Barat sendiri sungguh hal inipun tidak mungkin akan terdjadi pada masa pendjadjahan dahulu.

Saudara-saudara adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat sendiri karenanya sudah seharusnya saudara-saudara membawa amanat rakyat saudara-saudara yang saudara wakili.

Pernyataan-pernyataan dari Kabupaten Sorong ini telah saja terima yang isinja ingin tetap merdeka dalam lingkungan keluarga besar Indonesia dan saudara-saudara sebagai wakil dari rakyat yang akan menjuarakan suara rakyat sesuai dengan pernyataan-pernyataan tersebut.

Kita telah merdeka dan telah mendjadi satu keluarga Indonesia dan kita tidak ingin dipisah-pisahkan lagi seperti yang telah diputuskan dalam Sidang-Sidang Musjawarah PEPERA di Kabupaten-Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai dan Fak-Fak.

Selamat bermusjawarah.

Terima kasih.

**PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA
SUDJARWO TJONDRONEGORO SH - PADA SIDANG
DMP KABUPATEN SORONG.**

Saudara Ketua dan segenap Anggota DMP jang saya muliakan,
Para hadirin sekalian jang saya hormati.

Saja mengutjapkan sjukur alhamdulillah dapat kembali di Sorong ini sesudah lebih kurang 4 bulan jang lalu, tanggal 5 April 1969, saja sebagai Ketua Team Pemerintah waktu itu melaksanakan tugas musjawarah dengan DPRD Kabupaten Sorong, untuk menetapkan tjara pelaksanaan PEPERA di Irian Barat.

Saja masih ingat bagaimana sambutan para anggota DPRD Sorong waktu itu, terhadap rentjana Pemerintah untuk melaksanakan PEPERA. Baik DPRD Sorong, maupun Rakjat berbagai golongan dan organisasi di Kabupaten Sorong ini telah sering kali mengeluarkan pernjataan-pernjataan pada Pemerintah untuk tidak melaksanakan PEPERA, dengan alasan-alasan jang sangat kuat. Maka saudara-saudara anggota DPRD Sorong jang sekarang djuga duduk dalam DMP ini, mestinja masih ingat bagaimana saja harus putar lidah dan otak dan kebidjaksanaan untuk mentjapai permufakatan dengan saudara-saudara sekalian, guna toh melaksanakan PEPERA dengan tjara jang dapat arti dan maksud PEPERA ini nanti, saudara-saudara perhatikan sungguh-sungguh, sehingga dapat dimengerti sebaik-baiknja.

Achirnja sekali lagi marilah kita berdoa kepada Tuhan Jang Maha Esa semoga sidang jang penting ini dapat melakukan kewadjabannja demi kepentingan dan hari depan Rakjat Irian Barat serta pembangunan-pembangunannja jang telah didjalankan.

Sekian dan terima kasih.

**PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO - PADA SIDANG DMP
KABUPATEN MANOKWARI.**

Jth.Sdr. Ketua Sidang Dewan Musjawarah PEPERA,

Jth.Bapak Menteri Dalam Negeri, Ketua Sektor Irian Barat, dan

Ketua Team Pelaksana PEPERA dari Pusat,
 Jth.Bapak-bapak Anggota DPR,
 Jth.Wakil Sekdjen PBB dr. ORTIS SANZ
 Jth.Bapak-bapak dari Pusat dan rekan-rekan dari Daerah,

Para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA selaku wakil-wakil rakjat jang saja muliakan, serta para hadirin jang saja hormati. Sidang jang saja muliakan.

Dengan diiringi do'a sjukur kehadapan Tuhan Jang Maha Kuasa, bahwa, atas rachmatnja maka pada hari ini kita dapat berkumpul di Manokwari dan Sidang Dewan Musjawarah PEPERA Daerah Kabupaten ini dapat dilangsungkan tepat pada waktunya.

Dari pendjelasan-pendjelasan para petugas daerah ini tentulah saudara-saudara para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA telah mengetahui maksud dan tudjuan diadakannja Musjawarah PEPERA ini.

Saudera-saudara sekalian akan membuat sedjarah jang penting dari peristiwa hari ini jang akan dapat saudara-saudara wariskan untuk anak-anak tjutju kita nanti, karena keteguhan perdjuaan saudara akan tertjatat dengan tinta emas dan hal ini sungguh-sungguh mendjadikan anak-anak tjutju kita merasa bangga akan hasil perdjuaan saudara-saudara sekalian dalam mempertahankan kasatuan, persatjuan serta keutuhan wilajah Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Oleh karena pentingnja peristiwa ini malam saja sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat. terlebih-lebih saja sebagai orang tua, bapak rakjat daerah ini merasa perlu untuk mejampaikan satu dua patah kata dan berbitjara dari hati kehati dengan saudara-saudara sekalian para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA Daerah Kabupaten ini selaku wakil-wakil rakjat jang saja tjintai.

Dihadapan saudara-saudara hadir Bapak Menteri Dalam Negeri AMIR MACHMUD disertai Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH. dan pedjabat-pedjabat lainnja jang bertindak sebagai wakil resmi Pemerintah Repulik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Persetudjuan New York jang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962.

Tentang Persetujuan New York ini sendiri Rakjat Irian Barat jang tidak tahu menahu oleh-karena waktu persetujuan tersebut dibuat Rakjat Irian Barat tidak diikut sertakan oleh Pemerintah djadjaan pada waktu itu

Dan berdasarkan atas persetujuan itulah nanti saudara-saudara para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA akan ditanjakan suatu pertanyaan :

„Apakah kita Rakjat Irian Barat ingin tetap Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang besar ini ataukah tidak ?”

Sidang jang mulia,

Pada tiap-tiap Kabupaten jang telah saja kundjungi dan Sidang-sidang Dewan Musjawarah PEPERA telah dilangsungkan, Rakjat Kabupaten-Kabupaten tersebut merasa heran dan benar-benar tertjengang mendengar pertanyaan jang gandjil dan adjaib ini, bahkan pertanyaan tersebut benar-benar telah menjjengung perasaan Rakjat Irian Barat karena merasa bahwa kesetiaan rakjat kepada Pemerintah Republik Indonesia masih diragukan.

Tetapi saudara-saudara para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA hendaknja djangan salah faham akan hal ini, karena djelaslah bahwa Pertanyaan tersebut bukan berasal dari rakjat djuga bukan dari Pemerintah Republik Indonesia, tetapi berasal dari fihak lain tegasnja dari luar.

Saja jakin bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri beserta Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH, dapat merasakan keluhan-keluhan rakjatnja, dan telah saja saksiakan bagaimana Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH pada setiap kesempatan pada Sidang-Sidang Dewan Musjawarah PEPERA di Kabupaten-Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak dan Sorong beliau selalu meminta pengertian dan maaf sebesar-besarnja kepada rakjat karena terpaksa harus menjakan pertanyaan jang gandjil dan menjjengung hati serta perasaan setiap putra Irian Barat jang sangat mentjintai Republik Indonesia.

Tentulah saudara-saudara akan bertanya Bukankah Rakjat Irian Barat sudah Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ? mengapa masih dipersoalkan lagi ?" .

Namun saudara-saudara hendaknya mengerti bahwa Pemerintah Indonesia tidak menjangsikan kesetiaan saudara-saudara tetapi oleh karena terikat pada persetudjuan New York tersebut maka terpaksa harus melaksanakan, PEPERA ini di wilayahnja sendiri jaitu di Irian Barat.

Dan dalam Sidang inilah saudara-saudara dapat menundjukkan di hadapan wakil Sekjen PBB Tuan ORTIZ SANZ dan para Wartawan Dalam dan Luar Negeri serta kepada seluruh dunia akan keteguhan perdjuaan dan kesetiaan saudara-sudara para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA Kabupaten Manukwari ini.

Saja sebagai orang tua dapat menghajati perdjuaan saudara-saudara sekalian Rakjat Irian Barat dalam merebut Kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari daerah lain Indonesia dari tangan pendjadjah, saja pernah bekerja didaerah Kabupaten Manokwari ini selama 2 tahun jaitu di Ransiki sehingga saja mengenal benar daerah ini dan djuga rakjat seluruhnja. Karenanja suka dan duka saudarasaudara djuga merupakan suka dan duka saja dan apa jang saudara-saudara tjit.a-tjitakan adalah djuga tjita-tjita saja.

Bukti-bukti tentang perajuangan Rakjat Irian Barat banjak sekali bahkan saja kira banjak diantara saudara-saudara jang sekarang ini duduk sebagai Anggota Dewan Musjawarah PEPERA telah ikut sendiri bersama-sama pemimpin-pemimpin Irian Barat lainnja dalam perdjuaan Kemerdekaan Indonesia jang hebat dan dahsjat itu.

Pemberontakan rakjat di Biak tanggal 14 Maret 1948 untuk melawan pendjadjahan dimana banjak korban telah djatuh, ada jang dihukum pendjara dibuang dan saja saksikan sendiri semua antjarnan dari pihak pendjadjah tidak mendjadikan rakjat takut.

Pernjataan bersatu dalam perdjuaan Kemerdekaan Indonesia oleh putra-putra Irian Birat pada tanggal 13- 14 Agustus 1945 di kampung Harapan Djajapura (dahulu bernama Kota NICA) mengingatkan saja betapa bergeloranja semangat djuang rakjat dari Merauke sampai Sabang.

Pada saat itu kita telah mengumandangkan lagu INDONESIA RAYA bersama-sama sebagai lagu perjuangan Nasional kita dari seluruh Rakjat Indonesia termasuk Rakjat Irian Barat.

Djelaslah saudara-saudara bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah djuga mendjadi milik dari pada Rakjat Irian Barat karena Rakjat Irian Barat djuga ikut berdjuang dalam memperebutkan Kemerdekaan Indonesia dari tangan pendjadjah dan Irian Barat telah Merdeka sedjak tanggal 17 Agustus 1945 bersama-sama dengan daerah-daerah bekas Hindia Belanda jang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Kejakinan saja semakin teguh akan kebenaran perdjjuangan rakjat jang tahan udji setelah saja menjaksikan sendiri di setiap Kabupaten jang telah melaksanakan Sidang Dewan Musjawarah PEPERA, Sungguh mendjadikan saja bangga dan terharu.

Bangga karena rakjat dari Kabupaten Merauke, Wanena, Paniai, Fak-Fak dan Sorong dengan tegas telah meyajatakan dan menetapkan bahwa rakjat dan wilayah Irian Barat tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saja terharu akan kesetiaan rakjat terhadap tjita-tjita perdjjuangan Bangsa serta sumpah sakti 28 Oktober 1928 jang berisikan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, Indonesia.

Maka dengan demikian saja dapat mendjelaskan disini bahwa penduduk dari ke 5 Kabupaten jang meliputi Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak dan Sorong berdjumlah 584 ribu djiwa jang telah menjatakan tekadnja dan memutuskan dalam Sidang Dewan Musjawarah PEPERA untuk tetap Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah telah mentjapai djumlah 3/4 dari seluruh penduduk Irian Barat jang berdjumlah 800 ribu djiwa atau 73% dari seluruh penduduk jang berdjumlah 800 ribu djiwa tersebut.

Dimana-mana saja melihat serta menjaksikan sendiri gelora semangat rakjat jang menjala-njala jang rindu akan persatuan dan kesatuan Indonesia dengan Bendera Sang Saka Merah Putih jang berkibar-kibar dengan megahnja serta lentjana Merah Putih jang tersemat didada setiap putra-putri Irian Barat sungguh-sungguh semakin mejakinkan kita semua akan kebenaran perdjjuangan rakjat.

Kemenangan-kemenangan perjuangannya rakyat di 5 Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak dan Sorong tersebut merupakan pertanda bahwa Rakyat Irian Barat benar-benar menjintai Republik Indonesia.

Dan didalam Sidang Musjawarah PEPERA hari ini saja yakin bahwa di Manokwari pun semangat rakyat juga bergelora seiring dengan gelora semangat rakyat di Kabupaten-Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak dan Sorong.

Hal tersebut benar-benar dapat saja mengerti karena saudara-saudara tentu yakin bahwa hanya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kesedjahteraan dan kemakmuran rakyat serta kemajuan pembangunan dalam segala bidang dapat diandalkan.

Selama 6 tahun ini kita telah menjaksikan sendiri betapa sungguh-sungguhnya Pemerintah Republik Indonesia berusaha memajukan kehidupan dan penghidupan rakyat di Irian Barat. Sekolah-sekolah didirikan dimana-mana sampai ke pelosok-pelosok, usaha-usaha serupa dari Swasta diberi bantuan subsidi bahkan sampai di Universitas pun telah didirikan dan telah menghasilkan Sardjana-Sardjana Muda putra daerah Irian Barat, sungguh-sungguh hal yang seperti ini tidak akan pernah terjadi pada masa pendudukan dahulu.

Dalam bidang Kesehatan Rakyat, Pemberantasan Malaria dan sebagainya dilaksanakan dengan tekun dan hampir setiap Kabupaten diberi oleh Pemerintah Dokter-Dokter dan usaha-usaha kearah peningkatan Kesehatan Rakyat ini sedang ditingkatkan dengan didatangkannya Dokter-Dokter Spesialis ke Irian Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam bidang Pemerintahan, Pemerintah Republik Indonesia telah merintis dengan mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Djajapura dan telah pula memberikan kepertajaan yang benar-benar membesarkan hati kami.

Djabatan tertinggi dalam pemerintahan Propinsi dan di Kabupaten-Kabupaten juga di Manokwari ini diserahkan kepada Putra-putra Daerah Irian Barat sendiri dan hal inipun tak akan pernah terjadi pada masa pendudukan dahulu.

..Saudara-saudara adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat karenanya sudah seharusnya saudara-saudara memperhatikan kepentingan dan hari depan rakyat yang saudara-saudara wakili.

Pada waktu kami turun dari Kapal telah disambut dengan pemjataan-pernyataan dari wakil-wakil Rakyat Kabupaten Manokwari ini yang duduk dalam Dewan Musjawarah PEPERA, isinya antara lain ingin tetap Merdeka dalam lingkungan keluarga besar Indonesia, dan saudara-saudara dapat menjuarakan hati nurani rakyat itu kembali dengan tanda sesuai dengan pernyataan saudara-saudara para wakil rakyat.

Kita telah Merdeka dan telah menjadi satu keluarga Indonesia dan kita tidak ingin dipisahkan lagi seperti yang telah menjadi keputusan Sidang Musjawarah PEPERA di Kabupaten-Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak dan Sorong.

Tunjukkanlah keteguhan perjuangan dan kesetiaan saudara-saudara kepada amanat rakyat yang saudara-saudara wakili yaitu Tetap Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih dan selamat bermusjawarah.

PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA - SUDJARWO TJONDRONEGORO SH - PADA SIDANG DMP KABUPATEN MANOKWARI.

Saudara Ketua dan segenap Anggota DMP Kabupaten Manokwari yang saya muliakan,

Para hadirin sekalian yang saya hormati,

Pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa saya dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara di Manokwari ini, setelah saya kurang lebih 31/2 bulan yang lalu yaitu pada tanggal 8 April bertemu dan mengadakan konsultasi/musjawarah dengan DPRD Kabupaten Manokwari di kota ini.

yang sesuai dengan kepentingan rakyat, di Daerah Teluk Tjenderawasih khususnya Irian Barat pada umumnya.

XII. Kepada Wakil Sekretaris Djenderal PBB Tuan ORTIZ SANZ kami mohonkan untuk menjaksikan apa djawaban rakjat jang akan diberikan sebagai pelaksanaan dari pada PEPERA.

XIII. Achimja kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa para Anggota DMP jang terhormat jang merupakan wakil-wakil jang telah dipilih setjara sah oleh rakjat telah siap melaksanakan PEPERA setjara demokratis musjawarah.

XIV. Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkati kita semua dan kiranja Anggota DMP jang terhormat mendapat petundjuk-petundjuk jang dtridhoiNja.

A m i n.

**PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO - PADA SIDANG DMP
KABUPATEN TELUK TJENDERAWASIH.**

Jth. Sdr. Ketua Sidang Dewan Musjawarah PEPERA,

Jth. Bapak Menteri Dalam Negeri,

Jth. Bapak Menteri Luar Negeri,

Jth. Bapak Menteri Penerangan,

J.M. Wakil Sekdjen. P.B.B., Dr. ORTIZ SAINZ,

Jth. Bapak-Bapak Anggota DPR-GR,

Jth. Bapak-Bapak dari Pusat dan Rekan-Rekan dari Daerah, Para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA selaku wakil-wakil rakjat jang saja muliakan,

Para Wartawan Dalam dan Luar Negeri serta para hadirin jang saja hormati.

Sidang Dewan Musjawarah PEPERA jang mulia,

Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa, marilah kita sekalian memandjatkan do'a sjukur dan terima kasih, karena kita semua pada hari ini dapat bertemu dan berkumpul diruangan ini dalam keadaan sehat dan sedjahtera sehingga kita dapat melangsungkan Sidang Dewan Musjawarah Penentuan Pendapat Rakjat Daerah Kabupaten Teluk Tjenderawasih tepat pada waktu jang direntjanakan.

Bahkan karena dirasa tidak perlu membuang-buang waktu sedangkan persiapan-persiapan telah tjukup maka hari Sidang Dewan ini telah diadjudkan 1 (satu) hari dari waktu jang telah ditentukan sebelumnya.

Peristiwa hari ini adalah merupakan peristiwa jang sangat penting dan merupakan puntjak perdjjuangan kita sebagai Bangsa Indonesia dalam menjelesaikan hambatan jang mungkin dapat mengantjam Persatuan. Kesatuan dan Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia jang sangat kita tjintai ini, dan dari peristiwa ini saudara-saudara akan membuat Sedjarah jang ditjatat dengan tinta anak tjutju kita akan keteguhan perdjjuangan saudara-saudara dalam mempertahankan persatuan dan keutuhan saudara-saudara dalam mempertahankan persatuan dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Oleh karenanya saja sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ini terlebih-lebih sebagai orang tua bapak rakyat daerah ini merasa perlu untuk berbitjara dari hati kehati dengan saudara-saudara sekalian para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA dari Kabupaten ini jang saja tjintai.

Dihadapan saudara-saudara sekalian hadir pula Bapak Menteri Dalam Negeri AMIR MACHMUD disertai Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO, SH., dan beberapa orang pedjabat jang bertindak sebagai wakil resmi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan persetudjuan New York jang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 1962.

Dan berdasarkan atas persetudjuan New York itulah maka wakil-wakil Pemerintah Pusat akan bertanja kepada saudara-saudara sekalian selaku Anggota Dewan Musjawayah PEPERA daerah Kabupaten ini suatu pertanjaan :

.. Apakah kita rakyat Irian Barat ingin tetap Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang besar in atau tidak ?

Pada setiap Kabupaten jang telah saja kundjungi dan sidang Dewan Musyawarah PEPERA telah dilangsungkan, rakyat Kabupaten-kabupaten tersebut merasa heran dan benar-benar tertjengang

mendengar pertanjaan jang gandjil dan adjaib itu, bahkan pertanjaan tersebut benar-benar telah menjinggung perasaan rakjat Irian Barat karena apa jang selama ini diperjuangkan oleh rakjat Irian Barat dan telah mendjadi kenjataan masih sadja dipersoalkan, seolah-olah mereka tidak pertjajai akan kesetiaan dan keteguhan hati rakjat Irian Barat sebagai putra-putra Bangsa jang telah Merdeka sedjak tanggal 17 Agustus 1945.

Namun demikian hendaknja saudara djangan salah faham, Pemerintah Republik Indonesia sama Sekali tidak meragukan akan kesempatan rakjatnja jang berada di Iran Barat tetapi oleh karena Pemerintah Republik Indonesia terikat kepada persetudjuan New York tersebut maka terpaksa harus melaksanakan PEPERA ini diwilajahnja sendiri jaitu Irian Barat.

Perlu pula saudara ketahui bahwa pertanjaan jang gandjil dan adjlib serta sangat menjinggung perasaan putra-putra Irian Barat adalah tidak berasal dari rakjat djuga bukan berasal dari Pemerintah Republik Indoonesia tetapi dari luar, tegasnja berasal dari fihak lain.

Saja yakin bahwa Menteri Dalam Negeri Bapak AMIR MACHMUD beserta Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH diapat memaklumi keluhan-keluhan rakjat Irian Barat dan saja sendiri telah menjaksikan bagaimana Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH pada setiap kesempatan dalam Sidang-Sidang Dewan Musjawarah PEPERA Kabupaten-Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak, Sorong, dan Manokwari, beliau selalu meminta maaf dan pengertian sebesar-besarnja kepada seluruh Rakjat karena terpaksa harus menanjakan pertanjaan jang tidak simpatik, gandjil serta sangat menjinggung perasaan setiap putera Irian Barat jang sangat mentjintai Republik Indonesia.

Dan dalam Sidang inilah nanti saudara-saudara dapat menundjukkan dihadapan wakil Sekdjen P.B.B. Tuan ORTIZ SANZ dan para wartawan Dalam dan Luar Negeri serta kepada seluruh Dunia bahwa saudara-saudara benar-benar patriot pentjinta Tanah Air jang teguh berdjuang dan setia kepada tjita-tjita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sidang jang saja muliakan.

Saja sebagai orang tua dapat menghajati perdjuaan saudara-saudara sekalian rakjat Irian Barat dalam merebut kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari daerah lain Indonesia dari tangan Pendjadjah.

Saja saksiakan bahwa kota Serui jang merupakan tempat Pembuangan dr. RATULANGIE pada tahun 1946 dan Seruilah telah menjabarkan semangat kepahlawanan kesegenap pendjuru daerah Irian Barat bahkan semangat kepada bahkan kesegenap Nusantara.

Saja saksiakan pula bagaimana hebatnja perdjuaan saudara-saudara dari Biak ini sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan mentjapai puntjaknja dalam pemberontakan rakjat pada tanggal 14 Maret 1943 di Biak ini jang sekarang ini tempat kita bermusjawarah.

Itulah bukti-bukti tentang perdjuaan rakjat Irian Barat dan sangat banjak bila harus disebutkan satu persatu dan saja tahu sebagai anggota Dewan Musjawarah PEPERA telah ikut serta berdjuaan Irian Barat dalam gelora bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin jang hebat dan dahsjat semangat perdjuaan Kemerdekaan Indonesia itu.

Saja mengenal baik daerah Kabupaten ini dan djuga seluruh rakjatnja, karena jika dan duka rakjat adalah djuga suka duka saja dan apa jang mendjadi tjia-tjita rakjati adalah djuga merupakan tjita-tjita saja.

Djelasnja saudara-saudara bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah djuga mendjadi milik dari pada rakjat Irian Barat karena rakjat Irian Barat djuga ikut mempunjai andil dalam perdjuaan dalam memperebutkan Kemerdekaan Indonesia dari tangan pendjadjah dan ini berarti bahwa Irian Barat telah merdeka sedjak tanggal 11 Agustus 1945 bersama-sama dengan daerah-daerah lain bekas Hindia Belanda jang meliputi wilayah dari Merauke sampai Sabang.

Dan Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantasila dan berundang-undang dasar 1945 adalah djuga milik seluruh rakjat Indonesia termasuk rakjat Irian Barat karena Republik Indonesia adalah hasil dari perdjuaan seluruh rakjat Indonesia termasuk rakjat Irian Barat.

Kejakinan saja semakin teguh Akan kebenaran perjuangannya Rakjat yang benar-benar tahan uji setelah saja menyaksikan sendiri disetiap Kabupaten yang telah melaksanakan Sidang Dewan Musjawarah PEPERA sungguh-sungguh menjadikan saja bangga dan terharu.

Saja bangga karena Rakjat dari Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak, Sorong dan Manokwari dengan suara bulat telah menyatakan dan menetapkan bahwa Rakjat dan Wilayah Irian Barat tidak dapat dipisahkan lagi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Merauke sampai Sabang.

Saja benar-benar terharu akan keteguhan dan kesetiaan Rakjat terhadap tjita-tjita Perjuangan Bangsa serta sumpah Sakti 28 Oktober 1928 yang berisikan Ikrar Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa yaitu Bahasa Indonesia. Setia akan tjita-tjita Pedjuang Pahlawan-Pahlawan Bangsa yang telah gugur yang berserakan di makam-makam Pahlawan di seluruh Tanah Air.

Maka dengan demikian dapat menjelaskan disini bahwa penduduk dari ke-6 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak, Sorong dan Manokwari yang berdjumlah 633 ribu jiwa yang telah menyatakan tekadnya dan memutuskan dalam Sidang Dewan Musjawarah PEPERA untuk tetap Merdeka dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah telah meliputi lebih dari 3/4 dari seluruh Penduduk Irian Barat yang berdjumlah 800.000 jiwa atau lebih dari 79% dari seluruh penduduk diseluruh Irian Barat.

Dimana-mana saja telah menjakinkan sendiri dengan gelora semangat Rakjat yang menjala-njala dengan lentjana Merah Putih yang tersemat didada setiap putera-putera Irian Barat dan Sang Merah Putih yang berkibar-kibar memenuhi angkasa Irian Barat ini.

Hal ini suatu tanda bahwa Rakjat Irian Barat rindu akan persatuan Indonesia dan mentjintai Republik Indonesia dan sungguh-sungguh meyakinkan kita semuanya akan kebenaran Perjuangan Rakjat.

Kemenangan-kemenangan Perjuangan Rakjat di ke-6 Kabupaten yaitu Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak, Sorong dan Manokwari merupakan hasil kemenangan yang sah dan tak ada seorangpun atau,

negara manapun di dunia ini jang dapat mengganggu gugat karunia Tuhan jang terbesar bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Dan didalam Sidang Musjawarah PEPERA hari ini saja jakin bahwa di Biak pun semangat Rakjat djuga bergelora seiring dengan gelora semangat Rakjat di Kabupaten-Kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak, Sorong dan Manokwari.

Hal ini benar-benar dapat saja mengerti, karena hanja dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kesedjahteraan dan kemakmuran Rakjat serta Kemadjuan Pembangunan dalam segala bidang dapat diandalkan.

Selama 6 tahun ini kita menjaksikan sendiri betapa sungguh-sungguhnja Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk memadjukan kehidupan dan penghidupan Rakjat di Irian Barat ini.

Beratus-ratus Guru diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar Rakjat Irian Barat dapat bersekolah bahkan sampai kepelosok-pelosokpun diusahakan adanja sekolah untuk rakjat dan di Djajapura didirikan Perguruan Tinggi jang mempunyai Tjabang-tjabangnja di Manokwari, Sorong dan di Biak ini.

Usaha-usaha serupa dari Swasta diberikan bantuan subsidi, Pemberantasan Buta Huruf dilakukan dengan tekun dimana-mana, sungguh hal ini tak akan pernah terdjadi, pada masa Pendjadjahan dahulu.

Dalam bidang pemerintahan Pemerintah Republik Indonesia telah merintis dengan mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Djajah dan telah pula memberikan kepertjajaan Jang benar-benar membesarkan hati kami, djabatatan tertinggi dalam pemerintahan di Propinsi dan di Kabupaten-Kabupaten diserahkan kepada putra-putra Daerah Irian Barat, Badan Pemerintah Harian di Propinsi semua terdiri dari putra-putra Daerah Irian Barat sendiri dan hal inipun tak akan pernah terdjadi pada masa pendjadjahan dahulu.

Sidang jang saja muliakan.

Saudara-saudara adalah rakjat-rakjat jang dipilih oleh Rakjat dan dari rakjat, karenanja sudah seharusnya Saudara-saudara

memperhatikan kepentingan Rakjat dan hari depan Rakjat jang Saudara-saudara wakili.

Saja telah menerima banjak pernjataan-pernjataan dari Rakjat jang isinja ingin tetap Merdeka dalam lingkungan keluarga besar Indonesia, dan Saudara-saudara sebagai Wakil-wakil Rakjat hendaknja Saudara-saudara dapat menjuarakan hati nurani Rakjat dengan tandas sesuai dengan isi Pernjataan Rakjat tersebut.

Kita telah Merdeka dan telah mendjadi satu keluarga Indonesia dan kita tak ingin dipisah-pisahkan lagi untuk selama-lamanja seperti jang telah diputuskan dalam Sidang Dewan Musjawarah PEPERA di Kabupaten-Kabupaten Merauke, Womona, Paniai, Fak-Fak, Sorong dan Manokwari.

Tundjukkanlah keteguhan perdjungan dan kesetiaan Saudara-saudara Anggota Dewan Musjawarah PEPERA kepada Amanat Rakjat jang Saudara-saudara wakil jaitu keinginan Rakjat untuk tetap, Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih, Selamat Bermusjawarah.

3. PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA SUDJARWO TJONDRONEGORO SH PADA SIDANG DMP KABUPATEN TELUK TJENDERAWASIH.

Saudara Ketua dan segenap Anggota DMP jang saja muliakan Para hadirin sekalian jang saja hormati.

Hari ini saja ikut mengutjap sjukur pada Tuhan Jang Maha Esa dapat menghadiri sidang DMP Kabupaten Teluk Tjenderawasih ini. suatu sidang jang penting dan akan memberikan sedjarah, baik bagi Rakjit Irian Barat chususnja maupun bagi perdjungan Rakjat Indonesia pada Umumnja. Dalam pada itu, pembentukannja dan tugasnja, saja sendiri ikut memusjawarahkannja dengan DPRD Kabupaten Teluk Tjenderawasih kira-kira tiga setengah bulan jang lalu, pada tanggal 9 April. Saja dan Pemerintah mengetahu, bahwa seperti djuga didaerah-daerah Kabupaten lainja berlangsungnja Sidang DMP hari ini harus ditjapai melalui tantangan-tantangan dan kritik

dari banjak pemuka-pemuka dan golongan-golongan rakjat Irian Barat sendiri, jang setjara prinsipil menolak dilaksanakannya PEPERA dari Persetujuan New York itu.

Saja tidak ingin mengulangi perdebatan jang harus saja lakukan disidang Musjawarah DPRD Kabupaten Teluk Tjendrawasih di Biak tanggal 9 April jang lalu itu bahwa banjak pembijara menentang adanja PEPERA karena dianggap tidak perlu dan tidak ada gunanja.

Sidang jang terhormat,

Dihadapan Saudara-saudara sekarang ini terpampang djelas pada kepulauan Indonesia jang indah dan permai. Tanah Air jang merupakan rachmat dan karunia Tuhan jang tidak ternilai harganja, kepada segenap Bangsa Indonesia.

Akan Saudara-saudara tolakkah karunia Tuhan itu?

Nah, nanti kepada Saudara-saudara akan diwajibkan mendjawab suatu pertanjaan dalam PEPERA ini jang akan diadjudkan oleh Pemerintah.

Sekali lagi kami harap Saudara mendjaaab pertanjaan tersebut dengan djujur, ichlas dan berani berdasarkan kepertjajaan jang telah diberikan oleh rakjat jang Saudara-saudara wakili.

Sebagaimana Saudara-saudara ketahui, bahwa sudah 7 Kabupaten di Irian Barat telah mendjawab pertanjaan tersebut setjara tegas dan djelas bahwa Saudara-saudara kita di 7 Kabupaten itu tidak mau dan tidak sudi dipisahkan dari R.I. Dan saat ini rakjat Kabupaten Djajapura liwat Saudara-saudara jang mewakili mereka diberikan hak dan kewadajiban untuk mendjawabnja. Sidang inilah tempatnja jang resmi, sah dan menemtukan sampai keachir djaman atau sampai dunia kiamat.

Semoga Tuhan membimbing kita semua dan merupakan rachmat dan kasihnja kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

2. PIDATO GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT - FRANS KAISIEPO PADA SIDANG DMP KABUPATEN DJAJAPURA.

Jth. Saudara Ketua Sidang musjawarah PEPERA,

Jth. Bapak Menteri Dalam Negeri Ketua Projek Irian Barat dan Team Pelaksana PEPERA dari Pusat,

Jth. Bapak Menteri Luar Negeri,

Jth. Bapak, Menteri Penerangan,.

Jml. Wakil Sekdjen PBB Dr. ORTIZ SANZ

Jml. Para Duta-Duta Besar Negara-Negara sahabat,

Jth. Bapak-bapak Anggota DPR-GR,

Jth. Bapak-Bapak dari Pusat dan rekan-rekan dari Daerah,

Para Anggota Dewan Musjawarah PEPERA selaku wakil-wakil Rakjat jang saja muliakan.

Para Wartawan Dalam dan Luar Negeri serta para hadirin jang saja hormati.

Sidang Dewan Musjawarah PEPERA jang mulia,

Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa serta diiringi Do'a sjukur dan terima kasih bahwa atas Rachmat KaruniaNja maka kita semua dapat berkumpul dalam keadaan selamat sedjahtera di Djajapura hari ini.

Peristiwa hari ini adalah merupakan paristiwa jang hanja akan terdjadi satu kali sadja dalam sedjarah negari kita Republik Indonesia dan tak akan pernah djadi lagi, pula dari peristiwa ini saudara-saudara Para Anggota DMP akan membuat satu sedjarah jang panting jang akan ditjatat dengan, tinta emas.

Itu semuanja akan dapat saudara-saudara wariskan kepada anak tjutju kita, dengan penuh kebanggaan bagi gonerasi-generasi kita jang datang menjaksikan betapa hebatnja perdjuangan serta keteguhan dan kesetiaan Saudara-saudara dalam mempertahankan Persatuan dan Kesatuan serta Keutuhan wilajah Negara Republik Indonesia dari Merauke sampai Sabang jang sangat kita tjintai.

Oleh karena saja sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat jang bertanggung djawab atas keselamatan dan kesedjahteraan

rakjat terlebih-lebih sebagai orang tua. Bapak Rakjat Irian Barat merasa perlu untuk mengemukakan satu dua patah kata dan berbitjara dari hati ke hati dengan saudara-saudara sekalian para Anggota DMP dari Kabupaten ini jang saja hormati.

Hadir pula dihadapan saudara-saudara sekalian Bapak Menteri Dalam Negeri, AMIR MACHMUD disertai oleh Bapak SUDJARWO TJOKRONEGORO SH dan beberapa pedjabat jang bertindak sebagai wakil resmi Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan persetudjuan New York jang ditanda tangani tanggal 15 Agustus 1962 di New York.

Dan berdasarkan atas persetudjuan itulah kepada saudara-saudara para Anggota DMP sekalian akan diadjudkan suatu pertanjaan :

„Apakah kita rakjat Irian Barat ingin tetap Merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang besar ini. atau tidak”.

Sidang jang mulia,

Tentang persetudjuan New York tersebut banjak rakjat jang tidak tahu menahu oleh karena pada waktu persetudjuan tadi dibuat rakjat Irian Barat tidak diikut sertakan oleh Pemerintah djadjahan pada waktu itu. Dan pertanjaan jang terkandung dalam persetudjuan tersebut ketika diadjudkan pada setiap sidang-sidang Dewan Musjawarah PEPERA jang telah dilangsungkan ditiap-tiap Kabupaten, rakjat Kabupaten-kabupaten tersebut benar-benar heran dan tertjengang mendengar pertanjaan jang gandjil dan adjaib itu.

Bahkan pertanjaan tersebut benar-benar telah menjjinggung perasaan rakjat Irian Barat karena merasa bahwa kesetiaan dan keteguhan dalam mempertahankan kesatuan persatuan bangsa dan wilajah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Merauke sampai Sabang.

Namun demikian hendaknja saudara-saudara djangan salah paham, Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak meragukan akan kesetiaan rakjatnja jang berada di Irian Barat tetapi oleh karena Pemerintah Republik Indonesia terikat pada persetudjuan New York tersebut, maka terpaksa melaksanakan PEPERA ini diwilajah sendiri di Irian Barat ini.

Satu hal jang saudara-saudara harus mengerti ialah bahwa pertanyaan jang adjaib dan gandjil tersebut dan djuga sangat menjinggung perasaan putra-putra Irian Barat adalah tidak berasal dari rakjat, djuga bukan berasal dari Pemerintah Repirblik Indonesia tetapi dari luar, tegasnja berasal dari pihak lain.

Saja jakin bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak AMIR MACHMUD beserta Bapak SUDJARWO TJONDROGENERO SH dapat memaklumi kesulitan-kesulitan serta perasaan rakjatnja dan saja sendiri telah menjaksikan bagaimana Bapak SUDJARWO TJONDRONEGORO SH pada setiap kesempatan dalam sidang-sidang Dewan Musjawarah PEPERA di Kabupaten-kabupaten Merauke, Wamena, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari dan Teluk Tjenderawasih, beliau selalu mengharapkan pengertian jang mendalam serta meminta maaf sebesar-besarnja kepada seluruh rakjat Irian Barat karena terpaksa harus menanjakan pertanyaan jang tidak simpatik, gandjil serta sangat menjinggung perasaan setiap putra Irian Barat jang sangat mentjintai Republik Indonesia.

Dan dalam sidang inilah saudara-saudara dapat menundjukkan dihadapan wakil Sekdjen PBB Tuan ORTIZ SANZ dan para Wartawan Dalam dan Luar Negeri serta kepada dunia bahwa saudara-saudara benar-benar patriot pentjinta Tanah Air jang teguh berdjjuang jang setia pada Tjita-tjita Proklarnasi 17 Agustus 1945.

Sidang jang saja muliakan,

Saja sebagai orang tua dapat menghajati perdjjuangan saudara-saudara sekalian rakjat Irian Barat dalam merebut kemerdekaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari daerah Indonesia lainnja dari tangan pendjadjah.

Saja saksikan sendiri pada hari-hari mendjelang Proklamasi 17 Agustus 1945 di Kampung Harapan (dahulu Kota Nica) di Djajapura ini semangat djoang rakjat telah berkobar-kobar dengan dahsjat sehingga segala antjaman dari fihak pendjajah tidak menggentarkan hatinja dan dengan berani berkumpul dan telah menjatakan bersatu dalam perdjjuangan Kemerdekaan Indonesia jangmaha hebat dan bergelora dari Merauke sampai Sabang. Pada saat

itu pula saja saksikan betapa dengan semangatnja lagu INDONESIA RAYA" dikumandangkan di angkasa Irian Barat jang telah membangkitkan setiap insan putra Irian Barat berdjaoang melawan pendidjahan.

Semangat jang menjala-jala tersebut menjebar keseganp pendjuru daerah Irian Barat-bahkan sampai seluruh Nusantara kita ini, karena 3 hari kemudian Proklamasi 17 Agustus 1945 bergelora keseluruh dunia jang menjatakan bahwa Indonesia telah merdeka dengan seluruh rakjat di Wilajahnja jang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Djelaslah saudara-saudara bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah djuga merupakan milik dari pada rakjat Irian Barat, karena rakjat Irian Barat djuga ikut mempunjai andil dalam berdjaoang untuk merebut Kemerdekaan Indonesia dari tangan pendjadjah dan ini berarti bahwa Irian Barat telah merdeka sedjak 17 Agustus 1945 bersama sama dengan daerah-daerah lain bekas Hindia Belanda jang meliputi wilajah dari Merauke sampai Sabang.

Dan Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja Sila serta Undang-undang Dasar 45 adalah djuga milik segenap rakjat Indonesia termasuk rakjat Irian Barat, karena Republik Indonesia adalah hasil dari perdjjuangan rakjat Indenesia dengan Irian Barat tidak terketjual.

Kejakinan saja semakin teguh akan kebenaran perdjjuangan rakjat jang benar-benar sutji dan tahan udji. Saja telah saksikan sendiri disetiap Kabupaten jang telah melaksanakan Sidang Dewan Musjawarah PEPERA sungguh-sungguh mendjadikan saja bangga dan terharu.

Saja merasa bangga karena rakjat saja di kedelapan Kabupaten jaitu Merauke, Djajawidjaja, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Teluk Tjenderswasih dan Japen Waropen (jang telah digabung dalam satu Dewan Musjawarah PEPERA) dengan suara bulat telah menjatakan dan menetapkan bahwa rakjat dan wilajah Irian Barat tidak dapat dipisah-pisahkan lagi dengan negara Kesatuan Republik Indonesia dari Merauke sampai Sabang.

Saja benar-benar terharu akan keteguhan dan kesetiaan rakjat terhadap tjita-tjita dan perdjjuangan bangsa serta sumpah sakti

28 Oktober 1928 jang berisikan,Ikrar:

SATU NUSA
SATU BANGSA
SATU BAHASA
JAITU INDONESIA

Ini semua selaras tjita-tjita perjuangangan pahlawan-pahlawan bangsa jang telah gugur dari keserakahan dimakam-makam Pahlawan dari Merauke sampai Sabang.

Maka dengan demikian dapatlah saja mendjelaskan disini bahwa penduduk dari kedelapan Kabupaten jang meliputi Kabupaten-kabupaten Merauke, Djajawidjaja, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Teluk Tjendrawasih dan Japen Waropen berdjumlah 734.658 djiwa jang telah menjatakan tekadnja dan memutuskan dalam Dewan Musjawarah PEPERA untuk tetap merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meliputi 9/10 (sembilan persepuluh) dari seluruh penduduk Irian Barat jang berdjumlah 800.000 djiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk jang berdjumlah 800.000 djiwa tersebut.

Kemenangan-kemenangan rakjat di kedelapan Kabupaten tersebut adalah merupakan hasil kemenangan jang sjah dan tak ada seorangpun atau negara manapun didunia ini jang dapat mengganggu gugat.

Dan ini adalah karunia Tuhan jang terbesar bagi seluruh Rakjat Indonesia, termasuk Irian Barat karena Tuhan telah menjelamatkan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dari perpetjahan dan kehantjuran.

Dan didalam sidang Dewan Musjawarah PEPERA hari ini saja jakin bahwa di Djajapura semangat rakjat djuga bergelora, semangat djoang kesetiaan jang tidak kalah meluap-luap dengan rakjat dari Kabupaten-kabupaten Merauke, Djajawidjaja, Paniai, Fak-Fak, Sorong Manokwari, Teluk Tjenderawasih dan Japen Waropen.

Hal ini dapat benar-benar saja mengerti karena saudara-saudara tentu jakin bahwa hanja dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

kesedjahteraan dan kemakmuran rakyat serta kemajuan pembangunan dalam segala bidang dapat diandalkan. Kita menjaksikan sendiri selama 6 tahun ini, betapa Pemerintah Republik Indonesia berusaha memajukan kehidupan dan penghidupan Rakyat Irian Barat.

Sekolah-sekolah didirikan sampai ke pelosok-pelosok oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud agar rakyat dapat menjadi pandai bahkan sampai ke perguruan tinggi telah didirikan dan telah menghasilkan Sardjana-sardjana Muda Putra-putra Irian Barat.

Usaha-usaha swasta yang serupa diberi bantuan tenaga guru dan subsidi, pemberantasan buta huruf dilakukan dimana-mana.

Sungguh hal ini tidak akan pernah terdjadi pada masa pendjadjahan dulu. Dalam bidang Pemerintahan Pemerintah Republik Indonesia telah merintis dengan mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Djajapura ini untuk mengisi tenaga-tenaga Pamong Pradja guna menjiapkan dasar menudju kearah otonomi daerah yang sehat dan sempurna. Kepertjajaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat benar-benar telah membesarkan hati kami, djabatan tertinggi dan penting-penting di Propinsi maupun di Kabupaten-kabupaten telah diserahkan kepada putra-putra Irian Barat dan saja yakin bahwa djabatan-djabatan penting lainnja dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia terbuka bagi putra-putra Irian Barat yang berkemampuan.

Hal ini benar-benar tak mungkin akan terdjadi djika kita masih dalam genggamannya pendjadjah dulu.

Sidang yang saja muliakan.

Kabupaten Djajapura adalah merupakan Kabupaten yang terakhir yang melaksanakan PEPERA dan saja benar-benar ingin menjaksikan PEPERA di Djajapura inipun tidak mengetjewakan harapan rakyat.

Saudara-saudara adalah wakil rakyat yang dipilih dari rakyat oleh rakyat sendiri, karena sudah seharusnya saudara-saudara memperhatikan kepentingan rakyat dan hari depan rakyat yang saudarasaudara wakili.

Pernyataan-pernyataan dari rakyat Djajapura ini telah banyak yang saya terima yang isinya antara lain ingin tetap merdeka dalam lingkungan keluarga besar Indonesia, dan saudara-saudara sebagai wakil rakyat hendaknya dapat menjuarakan hati nurani rakyat dengan tegas dan tulus sesuai dengan isi pernyataan-pernyataan rakyat tersebut. Kita telah merdeka dan telah menjadi satu keluarga Indonesia dan kita tidak akan terpisah lagi untuk selama-lamanya seperti yang telah diputuskan dalam sidang-sidang Musjawarah PEPERA di Kabupaten-kabupaten Merauke, Djajawidjaja, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Teluk Tjenderawasih dan Japen Waropen.

Tunjukkanlah keteguhan perjuangan dan kesetiaan saudara-saudara para anggota Dewan Musjawarah PEPERA kepada amanat rakyat yang saudara-saudara wakili yaitu keinginan untuk tetap merdeka dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekian dan terima kasih. Selamat bermusjawarah.

**PIDATO KETUA KELOMPOK PELAKSANA PEPERA -
SUDJARWO TJONDRONEGORO SH. - PADA SIDANG
DMP KABUPATEN DJAJAPURA.**

Saudara Ketua dan segenap Anggota DMP yang saya muliakan Para hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama, saya ikut mengutap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya pada hari ini, dapat menghadiri sidang DMP Kabupaten Djajapura, khususnya karena sidang ini adalah sidang yang terakhir untuk menyelesaikan PEPERA diseluruh daerah Irian Barat.

Kiranya semua anggota sidang Jth. telah mengetahui kewajiban saya sebagai anggota Team Pemerintah didalam sidang DMP ini yakni mengajukan pertanyaan dari persetudjuan New York didalam sidang ini, yang sebenarnya bunyinya djuga Saudara-saudara ketahui semuanya.

Saudara-saudara, mestinya telah mendengar pertanyaan dan uraian tentang hal itu, yang telah saya utjapkan didaerah-daerah Kabupaten

DEPARTEMEN SOSIAL RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jalan Salemba Raya No. 28 Telp. : 310.3591 - 310.3655 Jakarta 10430

M E M O

Nomor : 235 / DINK / I / BKS / VIII / 93
Dari : Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.
Kepada : Yth. Ibu Menteri Sosial R.I.

1. Bersama ini kami laporkan dengan hormat, bahwa sebagai tindak lanjut dari penelitian usulan Calon Pahlawan Nasional asal Irian Jaya, Tim Badan Pembina Pahlawan Pusat telah mengadakan pengumpulan data/penelitian ke Irian Jaya pada tanggal 30 Juli 1993 sampai dengan 2 Agustus 1993.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan laporan hasil pengumpulan data/penelitian oleh Tim Badan Pembina Pahlawan Pusat dimaksud.
3. Demikian mohon menjadi periksa, dan petunjuk Ibu Menteri lebih lanjut.

Jakarta, 7 Agustus 1993.

DIREKTUR JENDERAL
BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL



MUCHRODJI

**LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA/PENELITIAN DALAM RANGKA
MEMANTAPKAN USUL PENGANUGERAHAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
DARI GUBERNUR KDH TK. I/KETUA BADAN PEMBINA PAHLAWAN DAERAH
IRIAN JAYA**

I. D A S A R.

Surat Perintah Perjalanan Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial No. 138/B/VI/BKS/VII/93, tanggal 29 Juli 1993.

II. PELAKSANAAN.

- A. Tanggal 30 Juli 1993 berangkat dari Jakarta.
- B. Tanggal 31 Juli 1993 mengadakan pertemuan dengan:
 - Muspida.
 - DPRD TK. I.
 - Rektor Universitas Cenderawasih.
- C. Tanggal 1 Agustus 1993 mengadakan pertemuan dengan
 - Tim Pengumpul data daerah yang diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Irian Jaya.
 - Tokoh-tokoh masyarakat Irian Jaya.
 - Keluarga dan teman-teman dekat calon Pahlawan Nasional yang diusulkan.

III. HASIL-HASIL

- A. pasukan diperoleh berupa keterangan lisan dan bahan-bahan tertulis.
- B. Aspirasi-aspirasi/kondisi kerawanan daerah Irian jaya yang perlu mendapat perhatian :
 - 1. Perasaan seperti masih dianaktirikan.
 - 2. Masih tebalnya rasa kesukuan, yang mengakibatkan terjadinya persaingan antarsuku.
 - 3. Adanya kecemburuan sosial di kalangan pemuda terhadap para pendatang.
 - 4. Adanya gejala membandingkan keadaan Irian Jaya dengan Papua Nugini yang tingkat kemajuannya lebih rendah, namun mempunyai negara sendiri.
 - 5. Keinginan agar para pejuang Irian Jaya mendapat penghargaan yang wajar.

6. Pengertian dan penghayatan terhadap Pahlawan masih perlu ditingkatkan, karena belum adanya tokoh Irian Jaya Yang menjadi Pahlawan Nasional Yang dapat dijadikan Idola.
7. Belum ada tokoh Pahlawan Nasional berasal dari Irian menyebabkan timbulnya anggapan Irian Jaya belum 100 X masuk wilayah Indonesia."Mereka menganggap wilayah Indonesia Yang paling timur ialah Maluku Yang telah ada Pahlawan Nasional nya

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Masyarakat Irian Jaya saat ini sangat mendambakan adanya Pahlawan Nasional asal Irian Jaya Yang dianugerahkan pada hari Pahlawan tahun 1993 mendatang.

B. S a r a n.

Untuk menanggulangi kerawanan-kerawanan tersebut dan dalam usaha -memupuk rasa kebangsaan (nasionalism), semangat kepahlawanan/kepeloporan dan kebanggaan daerah dalam rangka menyongsong PJPT II dan penekanan pembangunan Indonesia Bagian Timur (IBT), maka

1. Pemerintah perlu pada tahun ini menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh pejuang Yang telah menjadi idola masyarakat Irian Jaya yaitu : Silas Papare (dari Serui), Frans Kaisiepo (dari Biak), dan Marthen Indey (dari Jayapura). Ketiga tokoh tersebut sama-sama mempunyai bobot perjuangan Yang sangat besar bagi kembalinya Irian Barat ke pangkalan R.I. (Riwayat hidup dan perjuangan masing-masing ketiga tokoh tersebut terlampir).
2. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada ketiga tokoh idola masyarakat daerah Irian Jaya tersebut pada saat ini sangat diperlukan, karena penganugerahan gelar Pahlawan Nasional hanya kepada salah seorang atau dua orang di antaranya akan menimbulkan rasa iri dan mempertajam persaingan yang tidak sehat antara suku-suku yang ada Hal ini dapat dimengerti mengingat luasnya Propinsi Irian Jaya dan terbatasnya komunikasi.

3. Dari segi politis dan psikologis maupun jasa-jasa yang telah dibhaktikan ketiga tokoh tersebut, seyogyanya ketiganya dapat dianugtrahi gelar Pahlawan Nasional secara bersamaan demi keutuhan bangsa.

Jakarta, 3 Agustus 1993.

TIM PENDATA/PENELITI.

1. R.P. Soekandarno.
2. Drs. Soparsono.
3. Drs. Amrin Imran.
4. Drs. Soetopo Soetanto.

RIWAYAT HIDUP DAN PERJUANGAN FRANS KAISIEPO

1. Nama : FRANS KAISIEPO.
 - Lahir : Wardo, Biak, 10 Oktober 1921.
 - A g a m a :
 - Keluarga : - Isteri : Anthomina Arwam.
- Anak : 3 orang.
 - Tanggal meninggal : 10 April 1979.
 - Pendidikan : a. Sekolah Rakyat 1928-1931
b. LVVS Korido 1931-1934.
c. Sekolah Guru Normalis di Manokwari 1934-1936.
d. Kursus Bestuur Maret--Agustus 1945.
e. Sekolah Bestuur/Pamong Praja 1952-1954.
2. Perjuangannya.
 - a. Tahun 1945 Frans Kaisiepo berkenalan dengan Sugoro Atmoprasodjo ketika mengikuti Kursus Kilat Bestuur (Pamong Praja) di Kota Nica Holandia (Kampung Harapan Jayapura). Sugoro adalah seorang guru pada Sekolah tersebut. Dari perkenalan dalam jiwa Kaisiepo dan kawan-kawannya mulai tumbuh rasa kebangsaan Indonesia dan kemudian ia dan teman-temannya sering mengadakan rapat, gelap dengan Sugoro membahas penyatuan Nederlands Nieuw Guinea ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tertentu mereka berlatih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Sugoro. Frans Kaisiepo tidak setuju dengan papan nama kursus/sekolah yang diikutinya itu yang bertuliskan "PAPUA BESTUUR SCHOOL"; ia menyuruh Saudaranya Marcus Kaisiepo melepas tulisan PAPUA tersebut untuk diganti dengan kata IRIAN, sehingga tulisan pada papan menjadi "IRIAN BESTUUR SCHOOL".
 - b. Pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kampung Harapan Jayapura telah di kumandangkan lagu Indonesia Raya oleh Frans Kaisiepo, Marcus Kaisiepo, Nicolas Youwe dan kawan-kawan.
 - c. Ide Kemerdekaan Indonesia kemudian berkembangan Yang berasal dari berbagai daerah/Buku. Untuk membina persatuan diantara siswa Kursus/Sekolah Bestuur kemudian dibentuk dewan perwakilan dari berbagai suku. Dewan perwakilan ini dimaksudkan untuk

mempermudah kontak di bawah pimpinan Sugoro. Para anggotanya antara lain : Frans Kaisiepo, Marthen Indey, Silas Papare, G. Saweri, SD. Kawab.

- d. Pada tanggal 31 Agustus 1945 di Bosnik, Biak Timur dilangsung upacara pengibaran bendera Merah Putih Yang dihadiri oleh para tokoh komite Indonesia Merdeka seperti: Frans Kaisiepo, Marcus Kaisiepo, Corinus Krey, M. Youwe. Dalam upacara ini dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- e. Pada tanggal 10 Juli 1946 di Biak didirikan Partai Indonesia Merdeka (PIM) dengan ketuanya Lukas Rumkorem. Salah seorang pencetusnya adalah Frans Kaisiepo yang waktu itu menjadi Kepala Distrik di Warsa, Biak Utara.
- f. Pada bulan juli 1946 Frans Kaisiepo menjadi anggota delegasi pada KONferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai pembicara ia mengganti mana PAPUA dan Nederland Nieuw Guinea dengan kata IRIAN yang diberi pengertian IKUT REPUBLIK INDONESIA ANTI NEDERLAND. Konon kata Irian diambil dari bahasa Biak yang berarti panas, dalam hal ini berarti daerah panas. Frans Kaisiepo termasuk anggota delegasi yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebab wilayah Irian Jaya tidak dimasukkan ke dalam NIT. Sehubungan dengan hal itu ia mengusulkan agar Irian Jaya masuk keresidenan Sulawesi Utara.
- g. Pada bulan Maret 1948 terjadi pemberontakan rakyat Biak melawan Pemerintah Kolouial Belanda, dan Frans Kaisiepo adalah salah seorang perancang pemberontakan tersebut.
- h. Pada tahun 1949 Frans Kaisiepo menolak menjadi Ketua Delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke Konperensi Meja Bundar di Den Haag, sebab tidak meu didikte untuk berbicara sesuai dengan keinginan Belanda. Sebagai konsekuensi penolakannya antara tahun 1954-1961 ia dipekerjakan di distrik-distrik terpencil seperti Ransiki (manokwari), Ayamaru-Teminabuan (Sorong) dan di Mimika (Fak-Fak).
- i. Pada tahun 1961 sewaktu menjabat Kepala Distrik Mimika (Fak-Fak) ia mendirikan partai politik "Irian Sebagian Indonsia (ISI)" yang menuntut penyatuan kembali Nederlands Nieuw Guinea ke dalam Negara Republik Indonesia. Pada masa Trikora ia banyak membantu/melindungi infiltran Pejuang Indonesia yang didaratkan di Mimika sehingga tidak diketahui oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

- j. Pada tahun 1964 ketika menjadi gubernur KDH Propinsi Irian Jaya dan merangkap Ketua DPRDGR, Frans Kaisiepo merupakan salah seorang penggerak Musyawarah Besar Rakyat Irian Barat untuk membicarakan langkah-langkah penyatuan Irian Barat menjelang Pepera 1969. Ia berusaha sekuat-kuatnya memenangkan Pepera. Strategi yang ditempuhnya ialah pemungutan suara dengan sistem perwakilan yang dimulai dari Kabupaten: (Merauke) dan berakhir di Ibu Kota Propinsi (Jayapura). Penyelenggaraan Pepera di Irian Barat sukses dan Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Tiga tahun setelah sukses memenangkan Pepera, pada tahun 1972 ia diangkat menjadi anggota MPR1-RI Utusan Daerah Irian Jaya. Dan dari tahun 1973-1979 Frans Kaisiepo diangkat menjadi anggota DPA-RI.
- l. Pada tanggal 10 April 1979 Frans Kaisiepo meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di depan Taman Makam Pahlawan Cenderawasih.
- m. Atas perjuangan dan jasa-jasanya Frans Kaisiepo menerima penghargaan Trikora dan penghargaan Pepera dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1984 namanya diabadikan menjadi nama Bandara Biak FRANS KAISIEPO menggantikan nama Bandara Mokmer.

Jakarta, 3 Agustus 1993.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BIAK NUMFOR

REKOMENDASI

NOMOR : 464.1/314.14

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya nomor R-323/KS/I/93 tanggal 20 Januari 1993 tentang Pengumpulan Data Calon Pahlawan Nasional, dan Surat Nomor R-365/KS/II/1993 tanggal 17 Februari 1993 tentang : — Rekomendasi.

Mengingat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : MI-101/AU-104/THE-1984 — tanggal 9 Mei 1984 dan Surat Direktorat Perhubungan Udara DJU/22620/UM-237/ 84 tanggal 7 Juli 1984 tentang Pemberian Nama Bandara PRANS KAISJEPO BIAK NUMFOR , maka dengan ini kami berikan Rekomendasi untuk mengusulkan Almarhum PRANS KAISJEPO sebagai Pahlawan Nasional, mengingat :

1. Semasa hidupnya beliau telah berjuang tanpa pamrih untuk mengembalikan Irian-Barat (Irian Jaya) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Beliau dengan berani mengusulkan nama IRIAN menggantikan nama Nedorland Nieuw Guinea (Papua) di Konferensi Malino. Kata IRIAN diartikannya sebagai Daulat Republik Indonesia Anti Nedorland.
3. Semasa beliau menjadi Kepala Distrik di Mimika- Fakfak, telah banyak membantu tentara Trikora yang diterjunkan di Mimika sehingga tidak diketahui oleh tentara Belanda.
4. Semasa beliau menjabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian - Jaya beliau berupaya menaungkan PEPERA tahun 1969 demi keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Almarhum Frans Kaisiepo layak diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari negara berupa gelar Pahlawan Nasional.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Biak, 22 Februari 1993.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BIAK NUMFOR

Dr. SOEDJOKO (Pdt)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya di Jayapura.
2. Yth. Pembantu Gubernur Wilayah II di Manokwari.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BIAK NUMFOR

Jalan Majapahit Kotak Pos 163 Telepon 21702-21602-21002 Biak

Rekomendasi

H o m o r : 464.1 /15.

Bertitik tolak dari fakta Sejarah bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, adalah berkat Perjuangan dan Pengorbanan para Pejuang Kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raga.

Pada Tahunan Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan disebarkan disebarkan Wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya.

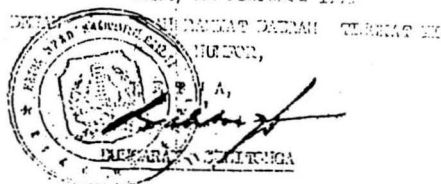
Untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya sementara belum ada Keputusan Pemerintah yang menetapkan salah satu Daerah Indonesia asal Irian Jaya sebagai Daerah Nasional.

Untuk alasan tersebut, kami sebagai Pimpinan DPRD Tingkat II Biak Numfor memberikan Rekomendasi kepada Almarhum Frans Kaisepo untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar diberikan Gelar Daerah Nasional, mengingat perjuangan dan jasa-jasanya kepada Bangsa dan Negara antara lain :

1. Selama hidupnya Beliau telah berjuang tanpa pamrih menentang Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengembalikan Irian Jaya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Beliau adalah Pemimpin Partai Rakyat Irian Sebagian Indonesia (PRI) yang mengusulkan mengembalikan Irian Jaya kepada Ibu PERTI.
3. Beliau dengan berani mengemukakan nama Irian menggantikan nama Belanda Nieuw Guinea di Montreux Melina Galesesi Selatan.
4. Selama menjabat Gubernur Irian Jaya, beliau telah berusaha menentang PERTI (Pergerakan Rakyat Irian) tahun 1969 demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
5. Karena jasanya kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia, oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 431.101/AN-104/AN-1964 tanggal 2 Mei 1964, nama Beliau dan Nama Beliau diganti dengan Pelatikan Nama Frans Kaisepo, Batak.

Rekomendasi ini dibuat untuk di sampaikan sebagaimana mestinya.

Biak, 20 Februari 1972



KOMANDO KESKON MILITER 173
 PANGDA VIKTA BANGSA
 KOMANDO DISTRIK MILITER 1708

Blak, 22 Februari 1993

Nomor : K/03 /II/1993
 Klasifikasi : KONTIDENSIL
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan.

Kepada

Yth. KAPANWIL DEPARTEMEN
 SOSIAL TRJA

di

Jayapura

1. Dasar :

- a. Surat Kapanwil Departemen Sosial Trja Nomor : R-365/KS/II/1993 tanggal 17 Rebruari 1993 tentang Rekomendasi/Keterangan An. Almarhum Frans Kaisepo.
- b. Catatan, Data Kodim 1708/Blak Numfor khususnya terhadap Almarhum Frans Kaisepo.

2. Sehubungan tersebut diatas, dijelaskan bahwa Almarhum Frans Kaisepo semasa hidupnya di Blak tidak ditemukan adanya indikasi terlibat gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 45, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk memenuhi persyaratan Data Calon Pahlawan Nasional Indonesia.



KOMANDO DISTRIK MILITER 1708

W. SHIN SJA
 KASIMIL INF NRP 24273

Tembusan 6

1. Dan Rem 173/FVH.
2. As Intel, Pers Kasdam VIII/Trikora.
3. Bupati KDM TR.JI/Blak Numfor.
4. Sesuai Dm 1708/BH.

KEJAKSAAN NEGERI BIAK

JL. SISINGAMANGARAJA NO.1 TELP. 21079 BIAK

SUAT - KETERANGAN

NOMOR : 713/P-1.8/Betdec.2/1993

Sehubungan dengan permintaan dari Team Pengumpulan Data Pahlawan Nasional Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam mengajukan calon yang akan diusulkan menjadi Pahlawan Nasional untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya pada umumnya dan Daerah Tingkat II Biak Numfor pada khususnya terhadap almarhum :

N a m a	: FRANS KASIEPO
Tempat lahir	: Wardo
Tanggal lahir	: 10 Oktober 1921
Jenis kelamin	: Laki - laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mantan Gubernur KDH. tk. I Irian Jaya periode tahun 1964 - 1973

maka dengan ini saya D.S. SINAGA, SH Kepala Kejaksaan Negeri Biak menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan data-data serta fakta yang di Kejaksaan Negeri Biak selama ini membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum FRANS KASIEPO tidak pernah terlibat/terseang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kasus tindak pidana apapun juga serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Demikian Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -



KAPALA KEJAKSAAN NEGERI BIAK

D.S. SINAGA, SH

PAKSA MADYA. NIP. 230010931

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN POLISI

Surat : 19 Februari 1993

Kepala : 19/20/1993/Artel
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Keterangan tidak terlibat
perkara pidana.

K e n a l a n
Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Sosial Propinsi Irian Jaya
di -
J a y a p u r a

1. Menunjuk Surat Saudara Nomor:R-364/43/II/1993 tanggal 17 Februari 1993 tentang permintaan rekomendasi/keterangan tidak pernah terlibat perkara Polisi Calon pahlawan Nasional An Almarhum Frans Kaisiepo.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dijelaskan bahwa Calon pahlawan Nasional An Almarhum Frans Kaisiepo, tanggal lahir 10 Oktober 1931, pekerjaan Ex Gubernur pertama Propinsi Irian Jaya, mantan Raja Yandori Mado Bial Barat, sepanjang penelitian kami selama hidupnya yang bersangkutan tidak pernah tercatat terlibat dalam suatu perkara pidana/perkara lainnya pada Kepolisian Resort Bial Mufor.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperangkatnya.



Terselenggara :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya.
2. Kepala Kepolisian Daerah Irian Jaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tt.II Bial Mufor.

COL. POL. HRP42120213.



DEWAN HARIAN CABANG ANGKATAN 45
BADAN PENGGERAK PEMBINA POTENSI ANGKATAN 45
 DAERAH TINGKAT II BIAK NUMFOR
 Sekretariat Sementara : Jln. Selat Madura No. 7

BIAR

S U R A T - R E K O M E N D A S I

Nomor : A-03/DHC.45/BINUM/II/1993

1. Dewan Harian Cabang Angkatan-45 Dati II Biak Numfor, menerangkan bahwa :
 Almarhum Frans Kaisiepo, adalah Putra Indonesia kelahiran Biak - Irian Jaya, yang semasa hidupnya telah berjuang - tanpa pamrih untuk Pengembalian Irian Barat (Irian Jaya) kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Jasa-jasa dan Perjuangannya, perlu dihargai dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional, yang menurut pengamatan kami, adalah wajar dan sepadan dengan perjuangan beliau dan layak untuk disandangnya.
3. Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan saksama untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bi a k.
 Pada tanggal : 20 Pebruari 1993.

A N D E W A N H A R I A N C A B A N G A N G K A T A N - 4 5
 D A E R A H T I N G K A T I I B I A K - N U M F O R



t u a ,

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua DHD Angkatan-45
 Prop.Tk.I Irian Jaya
 di Jayapura.
2. Simpanan.

188/280065.

PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT BIAK NUMFOR

Pendapat Tokoh Terkemuka/ Tokoh Masyarakat di Daerah tingkat II Biak Numfor terhadap Calon Pahlawan Nasional dari Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya sebagaimana diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya pada tahun 1993.

Atas nama Tokoh Masyarakat di daerah tingkat II Biak Numfor, yang mengikuti perkembangan dan perjuangan almarhum FRANS KALSIEPO; sewaktu masih hidup dan mengabdikan kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat di Indonesia khususnya di daerah tingkat II Biak Numfor baik dimasa Pemerintahan Belanda dan kembalinya daerah Irian Barat (sekarang Irian Jaya) ke wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Untuk diuculkan sebagai Pahlawan Nasional mengingat :

1. Semasa hidupnya beliau telah berjuang tanpa pamrih menentang Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengembalikan Irian Jaya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Beliau adalah Perintis/pemberi idea dan Pendiri Partai Indonesia Merdeka (PIM) oleh para Pemuda Biak Numfor pada tahun 1946.
3. Beliau adalah pemberi gagasan nama IRIAN; yang artinya dalam bahasa daerah Biak adalah hangat atau panas yang bermaksud kini matahari terbit membawa kehangatan untuk daerah ini.
Dan pula nama IRIAN adalah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland; yang kemudian diperjuangkan di Kopperensi Malino Sulawesi Selatan.
4. Semasa beliau menjabat Gubernur Irian Barat pada tahun 1969 beliau berusaha memenangkan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga dapat berhasil dengan baik.
Serta memperjuangkan penganugerahan Tanda kehormatan Satya Lencana PEPERA kepada Tokoh Masyarakat/ Anggota Dewan Musyawarah PEPERA (IMP) di Irian Jaya.
5. Pemberian nama Bandara Frans Kaisiepo di Biak sebagai kehormatan atas jasa beliau selaku Putra Indonesia asal Irian Jaya yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia di Daerah tingkat II Biak Numfor.

Dengan demikian almarhum FRANS KALSIEPO adalah layak dan mendapat dukungan masyarakat di daerah Biak Numfor serta diusulkan untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional dari Pemerintah dan Bangsa Indonesia.

Demikian Pendapat Tokoh Masyarakat Biak Numfor ini dibuat untuk di - pergunakan seperlunya.

Biak , 20 Februari 1993.

Atas Nama Tokoh-Tokoh Masyarakat Biak Numfor,

(Ernst Akobiarok.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Sosial Propinsi Irian Jaya di Jayapura.
2. Yth. Bupati Kdh. Tingkat II Biak Numfor di Biak.
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Biak Numfor di Biak.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KE.101/AO.104/Phb-84

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LAPANGAN TERBANG "MOKMER"
BIAK MENJADI LAPANGAN TERBANG "FRANS KATSIEMPO" BIAK

MENTERI PERHUBUNGAN,

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 043/GI.3/1983 tanggal 1 Juli 1983 tentang usul penggantian nama lapangan terbang Biak;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 553.2/2842/P.000, tanggal 13 September 1983 tentang tanggapan atas penggantian nama Lapangan Terbang Mokmer menjadi lapangan terbang Frans - Katsiempo.
- a. bahwa almarhum Frans Katsiempo adalah seorang putra Indonesia kelahiran Irian Jaya yang mempunyai tempat tersendiri dihati masyarakat Irian Jaya pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- b. bahwa almarhum telah mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat Irian Jaya sejak tahun 1957 sampai saat meninggal dan aktif berperan serta dalam perjuangan untuk mem persatukan keutuhan wilayah R.I. dari Sabang - Merauke;
- c. bahwa untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa almarhum perlu mengganti nama Lapangan Terbang "MOKMER" Biak menjadi Lapangan Terbang "FRANS KATSIEMPO" Biak.
1. Undang-Undang Nomor 85 tahun 1955 - Lembaran Negara Nomor 159 tahun 1958 tentang Penerbangan;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 164/OT 002/16.1.84

/ Mengetahui ...

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 125 - 1/373/Setwan tertanggal 14 Desember 1983 perihal persetujuan penggantian nama Lapangan Terbang Mokmer Biak dengan nama "Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak".

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA LAPANGAN TERBANG "MOKMER" BIAK MENJADI LAPANGAN TERBANG "FRANS KAISIEPO" BIAK.

Merubah nama lapangan terbang "MOKMER" Biak menjadi lapangan terbang "FRANS KAISIEPO" Biak.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta
Pada tanggal 10 Des 1984

MENTERI PERHUBUNGAN

[Signature]
ROESMIN NOURJADIN

Keputusan ini disampaikan

kepada:

1. Menteri Koordinator Ekuin

2. Menteri bidang EKUIN

3. Menteri Dalam Negeri

4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal

5. Kepala Badan dan para Direktur Jenderal

6. Lingkungan Departemen Perhubungan

7. Inspektur Jenderal PUOD Dep. Dalam Negeri

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan

9. Kepala:

10. Kapervahub seluruh Indonesia

11. Kakawil Direktorat Jenderal Perhubungan

12. Kepala:

13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia

14. Utusan Departemen Perhubungan (3x)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 077 /TK/TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -

M E M U T U S K A N

Menetapkan Menganugerahkan Gelar "PAHLAWAN NASIONAL" disertai dengan Piagam dan "BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA (KELAS III)" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa dan tindak kepalawananannya dalam perjuangan melawan penjajahan Pemerintahan Kolonial Belanda pada umumnya, khususnya dalam perjuangan mempertahankan prinsip kemerdekaan sehingga tindak kepalawananannya yang demikian itu dapat dijadikan teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada ahli waris almarhum yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 077 /TK/TAHUN 1993

TANGGAL 14 SEPTEMBER 1993

NOMOR URUT	N A M A	DAERAH PERJUANGAN	GELAR DAN TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3.	FRANS KAISIEPO (Almarhum)	Irian Jaya	PAHLAWAN NASIONAL DAN BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA

UNTUK PETIKAN :
KORWIS MILITER PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

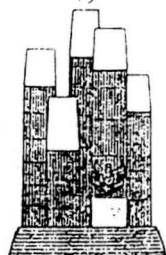
S O E H A R T O



PRANOWO

KOMANDIR JENDERAL TNI

No. 03/P/1993



Piagam Gelar Pahlawan

Presiden Republik Indonesia
mengumumkan

Gelar Pahlawan Nasional
kepada

Dr. Frans Iskandisopo
(Almarhum)

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1969 tentang Tatacara Pengangkatan Gelar Pahlawan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 077/18 Tahun 1993 tanggal 14 September 1993 sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dan untuk keabadian nama dalam perjuangan nasional, pengangkatan dan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada **Irnan Jaya** (Almarhum) dapat dipadatkan sebagai berikut:

tanggal 14 September 1993

Presiden Republik Indonesia

Soeharto

No 0557/01/1993



Diagam Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Adipradana

KEDADA

Nama *Pdt Frans Kaisiepo (Almarhum)*

Pangkat -

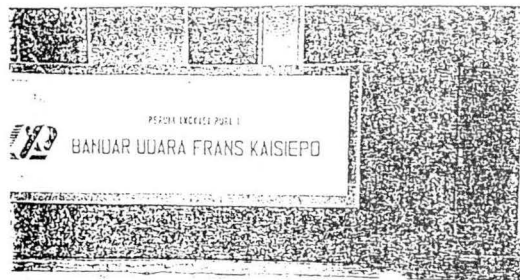
Jabatan *Pahlawan Nasional*

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6, Dst Tahun 1959, dan Keppres RI Nomor 077/11K/1 tahun 1973 sebagai kehormatan tinggi karena berjasa luar biasa terhadap Negara dan Bangsa Indonesia

Jakarta 14 September 1993

Direktori Republik Indonesia

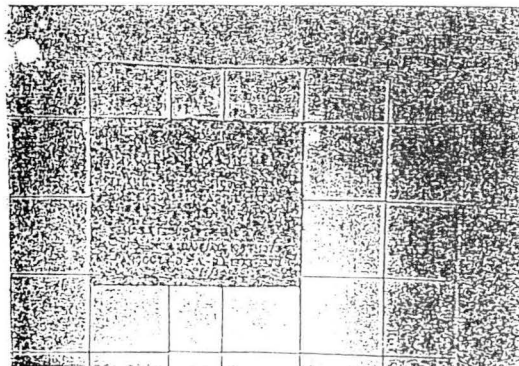
Soeharto



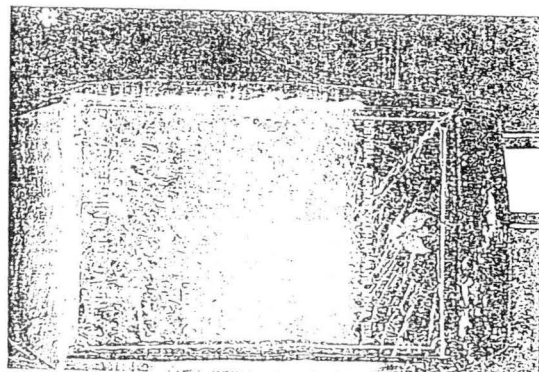
PAPAN NAMA KANTOR PERUM ANGKASA PURA
BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO BIAK



PAPAN NAMA BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO BIAK



PAN NAMA PADA MAKAM ALMARHUM FRANS KAISIEPO



PRASASTI PERESMIAN BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO BIAK

